

HARMONI SOSIAL

Jurnal Pendidikan IPS

- Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta
Syahrul, Amika Wardana
- Pengaruh Kultur Sekolah, Konsep Diri, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Siswa
Fawziah Zahrawati, Nahiyah Jaidi Faraz
- Keefektifan Pendekatan Saintifik Model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* dalam Pembelajaran IPS
Depict Pristine Adi, Muhsinatun Siasah Masruri
- Penguasaan *Civic Skills* Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (Studi Di Universitas Negeri Yogyakarta)
Yayuk Hidayah, Sunarso
- Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran PPKn
Ani Sulianti, Mukhamad Murdiono
- Pemanfaatan Metode *Active Debate* untuk Peningkatan Hasil Belajar dan Karakter Kesantunan Dalam Pembelajaran PPKn di SMP
Dwi Cahyaningtyas, Marzuki
- Implementasi Pendidikan Karakter Demokratis melalui Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas XII
Endrise Septina Rawanoko, Wuri Wuryandani
- Faktor Determinasi Profesionalisme Guru
Syamsuriyanti, Sukirno
- Keefektifan Metode Role Playing terhadap Keaktifan dan Kerja Sama Siswa dalam Pembelajaran IPS
Risva Anggriani, Ishartiwi



Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)
bekerja sama dengan
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta



HARMONI SOSIAL

Jurnal Pendidikan IPS

Penerbit

Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)
bekerja sama dengan
Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Editro in Chief : Zamroni
Associate Editors : Aman
Editorial Board : Sukidjo
: Sukirno
Mukminan
Adi Cilik Pierewan
Samsuri
Taat Wulandari

SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM HARMONI SOSIAL JURNAL PENDIDIKAN IPS
BUKAN MERUPAKAN CERMINAN SIKAP DAN ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI DAN ATAU AKIBAT DARI TULISAN
TETAP TERLETAK PADA PENULIS

Alamat Sekretariat Redaktur dan Tata Usaha:
Program Studi Pendidikan IPS, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Jln. Colombo Karangmalang Yogyakarta 55281
Homepage: <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>
Email journal.pps@uny.ac.id jurnalppsuny@yahoo.com
Harmoni Sosial Jurnal Pendidikan IPS terbit 2 kali setahun
pada bulan Maret dan September

HARMONI SOSIAL
JURNAL PENDIDIKAN IPS
Volume 4, Nomor, 2 September 2017

DAFTAR ISI

1. Analisis Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta..... Syahrul, Amika Wardana	117-130
2. Pengaruh Kultur Sekolah, Konsep Diri, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Fawziah Zahrawati, Nahiyah Jaidi Faraz	131-141
3. Keefektifan Pendekatan Saintifik Model <i>Problem Based Learning</i> , <i>Problem Solving</i> , dan <i>Inquiry</i> dalam Pembelajaran IPS Depict Pristine Adi, Muhsinatun Siasah Masruri	142-152
4. Penguasaan <i>Civic Skills</i> Aktivistis Badan Eksekutif Mahasiswa (Studi Di Universitas Negeri Yogyakarta) Yayuk Hidayah, Sunarso	153-164
5. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran PPKn Ani Sulianti, Mukhamad Murdiono	165-175
6. Pemanfaatan Metode <i>Active Debate</i> untuk Peningkatan Hasil Belajar dan Karakter Kesantunan Dalam Pembelajaran PPKn di SMP Dwi Cahyaningtyas, Marzuki	176-186
7. Implementasi Pendidikan Karakter Demokratis melalui Pembelajaran PPKn pada Siswa Kelas XII Endrise Septina Rawanoko, Wuri Wuryandani	187-196
8. Faktor Determinasi Profesionalisme Guru Syamsuriyanti, Sukirno	197-211
9. Keefektifan Metode Role Playing terhadap Keaktifan dan Kerja Sama Siswa dalam Pembelajaran IPS Risva Anggriani, Ishartiwi	211-221



**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK JALANAN
DI KOTA YOGYAKARTA**

Syahrul *¹, Amika Wardana¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: syahrulkadir7@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, dan (c) dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan di Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas anak jalanan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/*memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) kebijakan pendidikan layanan khusus untuk mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan informal dan nonformal sudah tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan di Kota Yogyakarta; (2) implementasi “akuntabilitas jalur pendek” oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan secara langsung ke rekening masing-masing anak jalanan, sedangkan “akuntabilitas jalur panjang” oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan untuk anak jalanan melalui perantara pengelola PKBM/rumah singgah; (3) kebijakan pendidikan berdampak pada anak jalanan yang sudah mulai berkurang di Kota Yogyakarta,
Kata kunci: *kebijakan pendidikan, anak jalanan, Yogyakarta*

**ANALYSIS OF EDUCATION POLICY FOR STREET CHILDREN
IN YOGYAKARTA**

Abstact

The study aims to investigate (a) the education policy for street children, (b) the implementation of education policy for street children, and (c) the effect of education for street children in Yogyakarta. This study employed the qualitative approach. The research subjects consisting of street children, Head of Education in Yogyakarta, Head of Social, Manpower and Transmigration in Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, and Rumah Singgah Ahmad Dahlan. The data was collected through in-depth interview, observation, field notes, and document analysis. Meanwhile, the data was analyzed using qualitative analysis in one circle among data collection, data categories, memoing, descriptive, clasification, intepretation, and visualisation. The result of studi are follows: (1) a particular service in education policy which eradicates children from street through informal and non-formal education is not relevant with the life reality in Yogyakarta; (2) the implementation of “short path accountability” made by the Head of Social, Manpower and Transmigration is to distribute donation directly into the account of street children. Otherwise, the implementation of “long path accoutability” made by the head of education in Yogyakarta is to distribute donation for street children through the organizer of PKBM/Rumah singgah; (3) the education policy affects the eradication of number of homeless children in Yogyakarta.

Keywords: *education policy, street children, Yogyakarta*

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Indonesia saat ini dikelola sepenuhnya oleh setiap pemerintah daerah sebagai wujud desentralisasi pendidikan. Hal ini diungkapkan oleh Dwiningrum (2011) bahwa desentralisasi pendidikan akan memudahkan akses pada proses implementasi kebijakan pendidikan khususnya bagi anak jalanan. Lebih jauh lagi, diperjelas dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) tentang tata cara penjangkauan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan, yaitu program kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta saat ini dilimpahkan ke rumah singgah karena dianggap efektif dalam mendidik anak jalanan. Di antara anak jalanan tersebut memiliki karakteristik masing-masing, seperti yang dikatakan Dahlan (2014) bahwa ada yang masih berstatus pelajar serta tinggal bersama orang tuanya dan ada yang sudah tidak bersekolah serta tidak tinggal bersama orang tuanya.

Pardede (2008) menjelaskan bahwa dalam konsep diri anak jalanan cenderung negatif disebabkan karena banyak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Anak jalanan tersebut merasa kecewa dan sangat malu dan merasa semua orang beranggapan bahwa dirinya bodoh. Di sisi lain, anak jalanan tersebut merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dan ia juga merasa minder jika dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Maka kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dianggap penting karena anak jalanan perlu mendapatkan keterampilan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini didukung oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun. Kebijakan ini kemudian dikembangkan lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani yang telah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun pada Juni 2015 lalu.

Upaya pendidikan untuk anak jalanan telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap permasalahan anak jalanan. Demikian pula pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk me-

nanggulangi masalah anak jalanan dengan melibatkan berbagai instansi terkait (Aminatun, 2013). Salah satu program kebijakan pendidikan untuk anak jalanan tersebut adalah PKBM. Nurkholis (2014) mengatakan bahwa PKBM memberikan gambaran positif pada program pendidikan anak jalanan. Dia membuktikan dalam penelitiannya di Yayasan Domore Sleman tentang anak jalanan menunjukkan adanya kegiatan pendidikan *calistung* (baca, tulis, hitung) diberikan bagi anak yang putus sekolah dan ingin melanjutkan sekolah kembali.

Hal tersebut di atas diperjelas oleh Pemerintah DIY dalam menanggulangi persoalan anak jalanan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) seperti yang diatur dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011. LKSA merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah DIY, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak. Isi Perda DIY No. 6 Tahun 2011 tentang pemenuhan hak pendidikan, Pasal 29 Ayat (1) (Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2011) setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, (2) pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan layanan khusus anak yang hidup di jalan, (3) pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Itsnaini (2010) mengatakan bahwa salah satu rumah singgah di Kota Yogyakarta telah melakukan pembinaan pada anak jalanan. Hal ini dibuktikan dalam penelitiannya yang menunjukkan beberapa program pendidikan yang dilaksanakan untuk anak jalanan yaitu memberikan bantuan pelayanan pendidikan dengan memberikan pelayanan pendidikan nonformal dan informal yang berbasis kesetaraan. Lebih jauh lagi, Nurwijayanti (2012) mengungkapkan bahwa pendidikan anak jalanan yang dilakukan di Kota Yogyakarta secara informal maupun nonformal di antaranya; dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan di rumah singgah.

Pendidikan informal untuk anak jalanan sebagian besar diselenggarakan di panti sosial anak, panti asuhan anak, dan rumah singgah. Itsnaini (2010) mengatakan bahwa pen-

didikan informal berfungsi memberikan bekal keterampilan yang berbasis pada jiwa wirausaha dan pengembangan bakat, sebagai bekal bagi anak untuk dapat mandiri dan tidak mengamen di jalanan. Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus, seperti yang dikemukakan oleh Demartoto (2012) bahwa anak merasa jalanan dapat menghasilkan uang daripada harus menghabiskan waktu mengikuti pendidikan di rumah singgah. Di samping itu, dalam diri anak jalanan tertanam bahwa kehidupan di jalanan merupakan tempat yang menguntungkan dibanding harus mengikuti pendidikan di rumah singgah.

Itsnaini (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal yang diberikan pada anak jalanan berupa program pendidikan kejar paket A,B,C. Fungsi program ini mempersiapkan anak-anak menjelang mereka masuk sekolah (pendidikan formal) dan memberikan berbagai pelayanan pendidikan. Namun program ini tidak berjalan begitu mulus, Sitompul (2014) mengatakan bahwa tenaga pendidik mengalami kesulitan ketika hendak mengurus anak jalanan dalam mengikuti kejar paket A,B,C yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Ada pun faktor lain yang menyebabkan hal tersebut yaitu kurangnya kerjasama pihak lembaga dengan Dinas Pendidikan selaku lembaga yang berwenang dalam mengurus pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak jalanan. Di samping itu, diperoleh informasi bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY kurang memberikan informasi terkait dengan pendidikan melalui jalur paket A,B,C.

Menilik dari berbagai uraian tersebut, penelitian tentang kebijakan pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta perlu dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta, (2) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta, dan (3) dampak kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, (b) implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan, dan (c) dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan di Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang didasarkan pada subjek penelitian yang menekankan interpretasi serta pemaknaan data (*verstehen*). Subjek penelitian dengan teknik *purposive sampling* terdiri atas anak jalanan, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, PKBM Anak Mandiri, PKBM Reksonegaran, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Kriteria sampel anak jalanan disesuaikan dengan kebutuhan, yakni anak-anak jalanan yang berpropesi sebagai pengamen, gelandangan, pengemis, penjual koran, dan pedagang asongan yang masih berusia remaja atau berusia 5-18 tahun, sedangkan kriteria untuk lembaga adalah telah menyelenggarakan pendidikan untuk anak jalanan. Setelah menjangkau sebanyak mungkin informasi dan telah mencapai titik jenuh, maka dipilih sebanyak 20 sampel untuk dianalisis, sebagaimana diungkapkan Creswell (2014) agar peneliti dapat mengembangkan suatu teori yang lengkap. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan mentriangulasi sumber, metode, dan teori. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif bergerak dalam lingkaran di antara pengumpulan data, pengorganisasian data, pembacaan/ *memoing*, deskripsi, klasifikasi, penafsiran, dan penyajian/visualisasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memahami Kebijakan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mengentaskan anak dari jalanan melalui pendidikan dengan tujuan agar Kota Yogyakarta terbebas dari aktivitas anak jalanan. Oleh karena itu, melalui Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan semua anak jalanan di Kota Yogyakarta untuk sekolah. Keputusan ini juga diperjelas dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 29 bahwa: (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan, (2) pendidikan bagi anak yang hidup di jalan diberikan melalui pendidikan

layanan khusus anak yang hidup di jalan, (3) pendidikan layanan khusus diselenggarakan pada jalur formal, informal dan nonformal.

Pendidikan layanan khusus menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 “adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak-anak yang hidup di jalan melalui berbagai jenjang (tingkat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah) dalam rangka mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bermartabat, kreatif, dapat memiliki kompetensi hidup dan mandiri untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik”. Hal ini berarti bahwa pendidikan layanan khusus adalah adanya kegiatan pendidikan yang hanya diperuntukkan pada anak jalanan dan tidak pada anak-anak di luar kategori anak jalanan dengan model pelaksanaan pembelajaran yang sifatnya fleksibel (Kemendikbud, 2012).

Supriadi (Wawancara Jumat 15 Januari 2016) mengatakan bahwa pendidikan layanan khusus untuk anak jalanan melalui model fleksibel, misalnya: *Pertama*, anak jalanan dapat mengakses pendidikan melalui PKBM/ rumah singgah tanpa dipungut biaya sepersen pun, justru anak jalanan akan mendapatkan beasiswa, *kedua*, anak jalanan di rumah singgah/ PKBM diberi kebebasan, tidak terlalu diikat, bahkan diberi kebebasan apabila ingin kembali ke jalanan, sebaliknya jika ingin kembali lagi ke rumah singgah, *ketiga*, anak jalanan yang mengikuti paket kesetaraan disesuaikan dengan usianya, yaitu (1) usia 15 tahun ke atas yang sudah putus sekolah serta tidak berminat lagi untuk melanjutkan pendidikan akan mengikuti pelatihan kerja dengan mengirimkan langsung anak-anak tersebut ke tempat-tempat pelatihan kerja seperti bengkel, sablon baju, menjahit, servis handphone, potong rambut, laundry, tataboga, dll. (2) Sedangkan untuk anak jalanan yang usianya berkisar antara 6 sampai 14 tahun lebih diprioritaskan untuk masuk ke panti asuhan. Hal ini agar mereka bisa melanjutkan pendidikan formal seperti anak pada umumnya, *keempat*, pembelajaran anak jalanan juga disesuaikan dengan keinginannya, misalnya ada yang mau belajar siang, sore dan malam akan disesuaikan; anak jalanan maunya libur, diliburkan atau jika anak jalanan mau belajar di tempat I, II, atau III juga disesuaikan, *kelima*, anak jalanan tidak terlalu dituntut untuk menguasai materi pelajaran karena akan disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, *keenam*, metode pembelajaran

tidak harus tatap muka karena ada juga belajar mandiri atau disesuaikan dengan kebutuhan anak jalanan.

Namun berdasarkan pada uraian di atas, pendidikan layanan khusus untuk anak jalanan yang diselenggarakan secara fleksibel, melahirkan persoalan baru dalam kebijakan pendidikan untuk anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Sosial DIY dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM yang pernah melakukan penelitian pada penanganan anak jalanan di rumah singgah di DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa model penanganan anak jalanan yang sering dilakukan oleh rumah singgah kadangkala justru memanjakan anak jalanan yang akhirnya menyebabkan jumlah anak jalanan terus meningkat (Suyatna, 2011).

Implementasi Kebijakan Pendidikan untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Implementasi kebijakan pendidikan untuk anak jalanan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui pendidikan nonformal yang berkerjasama dengan PKBM Reksonegaran dan PKBM Anak Mandiri. Sedangkan Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta melalui pendidikan informal yang bekerjasama dengan PSM, Rumah Singgah Anak Mandiri, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan.

Pendidikan Nonformal oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui program pendidikan nonformal yang bermitra dengan PKBM Reksonegaran dan PKBM Anak Mandiri juga telah menamatkan banyak anak jalanan melalui paket A,B,C, misalnya:

Pertama, kegiatan pembelajarannya PKBM Reksonegaran pada hari Selasa jam 13.00-14.30 dan hari Sabtu jam 13.00-14.30. Materi pembelajarannya adalah IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Metode pendidikan yang digunakan adalah: (1) Metode terapi, yaitu terapi dilakukan pada malam-malam tertentu dan terkadang anak jalanan disuruh berenang pada tengah malam, kemudian dilanjutkan dengan meditasi atau yoga. Hasilnya adalah anak jalanan langsung sadar. Metode ini tidak pernah dilakukan oleh rumah singgah lainnya, (2) metode penjenjangan, yaitu Sudarmaji juga mendidik anak

jalanan dengan cara melepas dan membiarkan tetap di jalanan, hingga anak jalanan jenuh, karena menurutnya apabila anak jalanan tidak jenuh sulit untuk mengarahkan mereka, setelah itu kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan kerja di perusahaan Turki yang bermitra dengan PKBM Reksonegaran, dan (3) metode privat, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Sudarmaji dengan membimbing satu per satu anak jalanan (wawancara Sudarmaji Selasa 12 Januari 2016).

Kedua, kegiatan pembelajaran PKBM Anak Mandiri dari jam 13.00-14.30 setiap hari Senin sampai Kamis. Pembelajarannya paket A,B,C menggunakan satu meja yang lumayan panjang sehingga beberapa stafnya juga ikut menyelesaikan tugastugasnya dengan meja yang sama. Proses pembelajaran digabung dalam waktu bersamaan antara paket A,B,C. Kata seorang guru, kegiatan pembelajaran dengan model yang seperti ini sangat menyulitkan karena guru yang mengajar harus selangseling antara paket A,B,C dan peserta didik pun susah fokus dan memahami materi (wawancara Iis dan observasi Selasa 12 dan Kamis 14 Januari 2016).

Dari uraian tersebut, menunjukkan kendala pada implementasinya. Hal ini, karena anak jalanan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran, keterbatasan tenaga pengajar, kurangnya anggaran dan sikap apatis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini diperjelas dalam hasil wawancara dengan Supriadi (Jumat 15 Januari 2016) yang mengatakan bahwa

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak terlalu tau tentang urusan anak jalanan karena anak jalanan telah menjadi tanggung jawab PKBM. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya membantu dalam program penyelenggaraan paket kesetaraan.

Sikap apatis Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di atas membuat kegiatan pendidikan tidak berjalan maksimal, guru yang mengajar di PKBM tidak melengkapi kebutuhan anak jalanan akibat tidak adanya guru tetap dan kurangnya fasilitas pembelajaran. Hal ini dijelaskan dalam Pergub DIY No. 31 Tahun 2012 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) Pasal 23 bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap (1) penerapan prinsip perlin-

dungan anak oleh Tim Perlindungan Anak di dalam kegiatan penjangkauan; (2) penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA.

Pendidikan Informal oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta

Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menjalankan program pendidikan informal bermitra dengan beberapa LKSA, di antaranya: PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Rumah Singgah Anak Mandiri, dan Rumah Singgah Ahmad Dahlan. Secara umum rumah singgah dimaksudkan sebagai wadah pendidikan anak jalanan dimana anak diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, vokasional, dan informasi yang berguna bagi peningkatan taraf hidupnya. Kegiatannya sebagai berikut:

Pertama, program sapaan dan penjangkauan yaitu pemetaan dengan membentuk tim yang terdiri dari 70 orang per kota yang dibagi jadi 3 wilayah Barat, Tengah, dan Selatan. Kemudian membentuk program matrik kegiatan yang terdiri dari 14 kecamatan 45 kelurahan. Kegiatan ini dilakukan oleh PSM dengan cara melakukan kunjungan ke beberapa titik kumpul anak jalanan dan rumah orangtua anak jalanan secara berkala.

Kedua, program pembinaan seperti melakukan pendekatan, motivasi, mediasi, dan negosiasi kepada anak jalanan dan orangtuanya agar tidak turun lagi ke jalanan, mau ikut dalam kegiatan pendidikan formal, orangtua tidak menyuruh lagi anaknya ke jalanan.

Ketiga, program pendampingan dilakukan dengan mengikutkan anak jalanan pada kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, misalnya kerja bakti, diajak shalat, kemudian dikenalkan hukum yang ada di masyarakat, kadang juga didatangkan tokoh-tokoh agama.

Keempat, program pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak jalanan, misalnya pelatihan teknis *handphone*, pelatihan komputer, kursus bhs. Inggris, pelatihan potong rambut, menonton TV, radio, latihan musik, tidur dan makan.

Berdasarkan pada uraian di atas, kegiatan pembelajaran secara informal di rumah singgah menjadi hal yang rutin dilakukan, namun yang menjadi persoalan adalah anak jalanan tidak menetap di rumah singgah. Hal

ini diungkapkan Eka (Wawancara Senin 18 Januari 2016) bahwa “anak jalanan jarang mendapatkan pendidikan karena mereka lebih sering mengamen di jalanan daripada mengikuti pendidikan di rumah singgah”.

Model Pasar Bebas sebagai Jawaban atas Pendidikan Anak Jalanan

Pendidikan model pasar bebas adalah sebuah paradigma baru yang diusung oleh James Tooley sebagai jawaban atas pendidikan informal, nonformal, dan formal yang tidak relevan lagi dengan kehidupan anak jalanan. Pendidikan model pasar bebas ini juga sebagai jawaban atas paradigma *post-education* yang menganggap tidak ada lagi jarak antara pendidikan informal, nonformal, dan formal. Lebih jauh lagi, pendidikan model pasar bebas sejalan dengan program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), seperti yang diungkapkan oleh Dwiningrum (2011, p. 29) bahwa “tujuan dari program MBS adalah berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan”, dalam hal ini anak jalanan memiliki partisipasi dan layanan pendidikan di sekolah formal. Di sisi lain, pendidikan model pasar bebas di sini berusaha untuk lebih kritis terhadap James Tooley, yang menganggap bahwa pendidikan pasar bebas harus lepas dari naungan pemerintah. Hal ini karena pendidikan di Indonesia masih terkendala soal dana, sehingga masih tetap membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Melihat kondisi anak jalanan dengan pendidikan informal dan nonformal, peneliti menemukan banyak hal yang tidak lagi relevan di era sekarang ini khususnya di Kota Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara dengan Nani (Rabu 13 Januari 2016) bahwa program pendidikan informal memiliki banyak persoalan dalam pelaksanaannya, di antaranya: (1) Lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta yang tidak lagi mendidik; teman bergaul dan tetangga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, (2) media sosial masyarakat yang tidak mendidik; internet dan siaran TV hanya mengatarkan anak pada kerusakan berfikir secara rasional, ditambah media yang sudah terlanjur porno justru akan mengembalikan anak-anak pada esensi kebinatangan, dan (c) LKSA di Kota Yogyakarta tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, anak jalanan justru selalu

menghindari berbagai pelatihan yang diselenggarakan di rumah singgah.

Selain persoalan pendidikan informal di atas, pendidikan nonformal juga sudah banyak masalah dalam pelaksanaannya, hal ini didasarkan pada wawancara Sudarmaji (Selasa 12 Januari 2016), Supriadi (Jumat 15 Januari 2016), dan Nunu (Selasa 26 Januari 2016), bahwa: (1) Anak jalanan menganggap bahwa pendidikan nonformal hanya sebagai tempat untuk memperoleh ijazah, (2) anak jalanan malas mengikuti kegiatan pembelajaran paket kesetaraan yang diselenggarakan oleh PKBM, (3) pendidikan nonformal dapat mengurangi minat belajar anak karena mereka terlalu diberi kebebasan, (4) pembelajaran melalui PKBM tidak dapat melengkapi kebutuhan anak jalanan, seperti guru dan perangkat pembelajaran; akibat kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada uraian tersebut, pendidikan model pasar bebas dapat diilustrasikan sebagai berikut: Lembaga pendidikan ibarat sebuah pasar yang hanya berperan sebagai penyedia layanan, segala bentuk kebutuhan sudah tersedia, barang-barang sudah berlabelkan dengan produk dan kualitasnya masing-masing; begitupun dengan guru-guru yang sudah siap mengajar sesuai dengan profesinya masing-masing; pembeli memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; begitupun dengan anak-anak tinggal memilih pelajaran dan guru yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing.

Post-education seperti yang dikatakan oleh Freire (2008, pp. 79-80) bahwa “generasi masa kini ingin melakukan pembebasan dengan kesenangan, cinta, dan tubuh.” Anak jalanan yang menginginkan kebebasan dan tidak ingin terikat dengan pendidikan, dirasa cukup relepan dengan model pendidikan pasar bebas. Sehingga, konsep pendidikan untuk anak jalanan, sebagai berikut: (1) Anak jalanan tidak membutuhkan penilaian dan pengukuran tetapi mereka ingin dihargai bahwa mereka memiliki keunikan masing-masing perindividu, (2) anak jalanan tidak cocok dengan metode belajar hafalan dan *textbook*, mereka membutuhkan model belajar yang mengedepankan kreativitas, dan (3) anak jalanan membutuhkan sistem pendidikan formal yang baru dalam bentuk pendidikan model pasar bebas, yang berarti tidak dalam bentuk sistem pendidikan Indo-

nesia, karena anak jalanan termasuk dalam poin 1 dan 2.

Pendidikan model pasar bebas dapat dimisalkan dalam bentuk pelayanan restoran siap saji, sebagai berikut:

Tabel 1. Pendidikan Model Pasar Bebas

Restoran Siap Saji	Pendidikan Model Pasar Bebas
Delegasi dan Pembiayaan Seseorang membeli roti lapis; dalam membeli roti lapis, anda memintanya dan membayarnya	Delegasi dan Pembiayaan Sekolah sudah menyiapkan mata pelajara yang sudah disesuaikan dengan harga dan guru yang akan mengampuhunya. Anda memilih pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anda
Pelaksanaan Roti lapis pun dibuat untuk anda	Pelaksanaan Guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik
Kualitasnya Anda memakan roti lapis yang menghasilkan informasi yang relevan terkait kualitasnya	Kualitasnya Proses pembelajaran berlangsung, peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi terkait kualitasnya dan sewaktu-waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata peajaran jika itu tidak relevan untuknya
Keberlakuan Anda kemudian memilih untuk membeli atau tidak membeli roti lapis itu di kemudian hari, yang akan memengaruhi keuntungan penjual	Keberlakuan Anda kemudia memilih untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah tersebut atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan memengaruhi sekolah tersebut, apakah itu berdampak negatif atau positif pada masadepan sekolah

Sumber: Dikembangkan dari Tooley (2013)

Delegasi dan Pembiayaan: Kebijakan pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta dengan pendidikan layanan khusus melalui program pendidikan informal, nonformal dan formal menunjukkan bahwa anak jalanan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara gratis dan juga memperoleh beasiswa. Kebijakan ini sangat membantu anak jalanan bahkan telah memberi banyak pengaruh pada anak jalanan seperti anak jalanan dapat mengikuti pendidikan formal. Namun dalam mengefektifkan anak jalanan dalam mengikuti pendidikan formal diperlukan sebuah konstruksi dalam pendidikan formal di sekolah, dalam hal ini “pendidikan model pasar bebas”, yaitu: Sekolah sudah menyiapkan mata pelajaran yang sudah disesuaikan dengan biayanya yang kemudian akan ditanggung oleh pemerintah, begitu pun dengan guru yang akan mengampuhunya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Anak memilih

pelajaran dan guru sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.

Pelaksanaan: Pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta menunjukkan tidak adanya guru tetap dan mata pelajaran yang di ajarkan tidak jelas. Sedangkan, model pasar bebas dalam pelaksanaannya menuntut agar sistem pendidikan formal, yaitu guru dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan peserta didik.

Kualitasnya: Proses pembelajaran anak jalanan di Kota Yogyakarta tidak berjalan maksimal, anak jalanan tidak sepenuhnya mendapatkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini karena anak jalanan tidak memiliki pilihan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Sedangkan pendidikan model pasar bebas, proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan kesepakatan guru dan peserta didik. Peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan; informasi terkait kualitasnya dan sewaktu-waktu peserta didik dapat mengganti guru dan mata peajaran jika itu tidak relevan untuknya.

Keberlakuan: Anak jalanan di Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya memilih pendidikan formal justru memilih kembali lagi ke jalanan. Hal ini karena hidup anak jalanan yang tidak terbiasa dengan aturan, sehingga pendidikan formal tidak relevan dengan kondisi hidup anak jalanan. Pendidikan model pasar bebas menawarkan sebuah solusi, yaitu anak jalanan dapat memilih untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah yang sama atau mencari sekolah lain, yang kemudian akan berpengaruh pada peserta didik, apakah itu berdampak negatif atau positif, dan juga akan memberi pengaruh pada masadepan sekolah.

Implementasi Akuntabilitas Pendanaan Pendidikan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 42 dan diperbaharui dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Pasal 20 dijelaskan bahwa pembiayaan atas kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nani (Wawancara Rabu 13 Januari 2016) mengungkapkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan anak jalanan di Kota Yogyakarta mendapatkan bantuan dari APBD, Dinas Sosnaker-

trans Kota Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pencairan dana tersebut harus mengajukan beberapa persyaratan, yaitu (1) pengelola rumah singgah harus memperlihatkan bukti, berupa adanya rincian pengeluaran anggaran, misalnya anak membeli buku harus ada notanya, (2) setiap anak jalanan harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga yang mendampingi untuk mendapatkan uang, dan (3) harus ada tujuan uangnya untuk apa. Pelaporan pertanggung-jawaban yang agak rumitkan bagi para pengelola rumah singgah dan kadang-kadang ada rumah singgah yang tidak mengajukan laporan karena mereka tidak ingin repot. Persyaratan ini diputuskan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta karena jika tidak, bisa disalahgunakan (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Akuntabilitas Jalur Panjang untuk Anak Jalanan

Struktur pendanaan pendidikan anak jalanan yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Tooley (2013) menyebutnya “akuntabilitas jalur panjang” yaitu pemerintah pusat mengirim bantuan ke daerah setempat, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengelola alokasi dana tersebut (delegasi pertama); bantuan disalurkan ke pengelola PKBM (delegasi kedua); bantuan disalurkan ke anak jalanan (pelaksanaan), masih ada anak jalanan yang tidak mendapatkan beasiswa (pembayaran tidak merata); Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak mengevaluasi berapa banyak anak jalanan yang telah mendapatkan beasiswa dan mengikuti pendidikan di PKBM/sekolah (beasiswa tidak mencukupi); masih banyak anak jalanan yang tidak dapat mengikuti pendidikan (ketercapaian yang belum maksimal).

Berdasarkan pada uraian di atas, dana dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta jelas menggunakan “akuntabilitas jalur panjang” yaitu bantuan disalurkan melalui perantara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan pengelola PKBM, setelah itu kemudian dibagikan kepada anak jalanan. Sehingga dana tersebut melalui proses yang panjang dan lamban karena harus melalui beberapa delegasi. Delegasi tersebutlah yang membuat dana terhambat dan bahkan tidak maksimal sampai pada anak jalanan.

Anak jalanan yang mengikuti pendidikan di PKBM, diberikan beasiswa oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan syarat

ada KMS, yaitu paket C 1.500.000 pertahun, paket B 1.250.000 pertahun, dan paket A 1.000.000 pertahun (Wawancara Supriadi Jumat 15 Januari 2016). Namun yang menjadi persoalan adalah tidak semua anak jalanan memiliki KMS, sehingga masih banyak anak jalanan yang tidak mendapatkan beasiswa.

Akuntabilitas Jalur Pendek untuk Anak Jalanan

Struktur pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, Tooley (2013) menyebutnya “akuntabilitas jalur pendek”, yaitu: Pemerintah pusat mengirim bantuan ke daerah setempat, Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta mengelola dana tersebut (delegasi); bantuan langsung disalurkan ke rekening masing-masing anak jalanan (pelaksanaan); berkurangnya anak jalanan di Kota Yogyakarta (ada pembiayaan); adanya program evaluasi dan penjangkauan anak jalanan di Kota Yogyakarta (informasi yang relevan terkait kualitasnya); masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan bantuan dan tidak semua anak jalanan dapat mengikuti diklat dan pelatihan (keberlakuan yang belum maksimal).

Hal di atas sesuai dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Nani bahwa,

Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan dana untuk anak jalanan melalui rekening masing-masing per anak atau dibuatkan bagi anak jalanan yang tidak memiliki rekening. Dana tersebut dipisah dengan biaya pengelolaan lembaga rumah singgah karena untuk pengelolaan rumah singgah mendapatkan biaya operasional sendiri. Ada juga biaya operasional untuk anak bertemu dengan orang tuanya. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta mendatangi orangtua anak jalanan untuk pendampingan karena jangan sampai anak mendapat biaya justru dimanfaatkan orangtuanya. Adanya pertemuan orangtua anak jalanan dengan pihak Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta bisa memberikan arahan untuk penggunaan uang tersebut karena uang itu hanya untuk kepentingan anak bukan untuk orang tuanya (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Berdasarkan keterangan di atas, kebijakan pendanaan pendidikan anak jalanan di

Kota Yogyakarta oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta jelas menggunakan “akuntabilitas jalur pendek” yaitu bantuan untuk anak jalanan melalui rekening masing-masing per anak atau dibuatkan rekening masing-masing, dipisah dengan biaya anggaran untuk pengelolaan lembaga rumah singgah karena untuk pengelola rumah singgah mendapatkan biaya operasional sendiri. Namun persoalannya adalah akuntabilitas jalur pendek yang digunakan oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta tidak berjalan maksimal karena belum pada konsep akuntabilitas pasar yang dimaksudkan oleh James Tooley yaitu pendidikan dengan model pasar bebas.

Adapun dana penunjang pendidikan untuk anak jalanan melalui lembaga PKSA dari Dinas Sosial DIY dan Kementerian Sosial yang dikelola oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, memberikan bantuan bagi yang tidak tinggal di rumah singgah atau binaan di luar rumah singgah sebanyak 1.000.000 perorang pertahun. Sedang dana dari APBD yang juga dikelola oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta sebesar 2.000.000 perorang pertahun untuk kebutuhan sehari-hari (Wawancara Nani Rabu 13 Januari 2016).

Dampak Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Anak jalanan di Kota Yogyakarta sudah mulai berkurang, beberapa rumah singgah di Kota Yogyakarta sudah tidak terlalu fokus dengan anak jalanan karena anak jalanan sudah mulai tergeser. Dinas Sosial DIY mengungkapkan bahwa rumah singgah dalam sepuluh tahun terakhir telah berkembang dengan pesat, baik dari sisi jumlah maupun jenisnya. Namun perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas rumah singgah, baik dari segi kelembagaan maupun pelayanannya (Dinas Sosial DIY, 2012).

Berdasarkan pada Tabel 2, program pendidikan informal telah memberikan berbagai dampak, yaitu gaya hidup yang diterapkan oleh anak jalanan sebelum masuk ke Rumah Singgah Anak Mandiri antara lain merokok, mabuk-mabukan, mewarnai rambut. Kebiasaan seperti itu kini telah ditinggalkan oleh anak binaan rumah singgah dikarenakan ada sebagian anak binaan yang telah mengenyam pendidikan formal, anak jalanan juga memiliki keterampilan setelah mengikuti berbagai pelatih-

an dan diklat, selain itu berkat kerja keras pendamping yang memberikan pendampingan memperbaiki perilaku mereka (observasi dan wawancara Nunu Selasa 12, 26 dan Kamis 14 Januari 2016).

Tabel 2. Dampak Kebijakan Pendidikan Informal

Pendidikan Informal	Positif	Negatif
Rumah Singgah Anak Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan meninggalkan kebiasaan buruknya Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal Anak jalanan mendapatkan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan Kebanyakan yang berhasil hanya anak rentan jalanan
Rumah Singgah Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan telah mengikuti pendidikan formal Anak jalanan hidup mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan

Begitu pun dengan anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, beberapa anak jalanan sudah sekolah dan ada yang sudah tamat SMA dan bahkan sudah ada yang lanjut kuliah. Beberapa anak jalanan yang pernah mengikuti diklat dan pelatihan telah memiliki usaha sendiri, sehingga anak jalanan tersebut sudah hidup mandiri tidak di rumah singgah lagi, ada yang kost dan ada yang sudah kembali ke orangtuanya (wawancara Eka Senin 18 Januari 2016).

Di sisi lain, pendidikan informal tidak dapat dikatakan telah berhasil maksimal karena masih banyak lagi anak jalanan yang sudah pernah mengikuti program pendidikan informal namun mereka kembali lagi ke jalanan jadi pengamen, penjual koran, pedagang asongan, dan pemulung. Menurut Sudarmaji (wawancara Kamis 14 Januari 2016) anak jalanan yang banyak berhasil di Rumah Singgah Anak Mandiri kebanyakan anak rentan jalanan karena masih ada orangtuanya yang menjalankan usahanya. Eka (wawancara Eka Senin 18 Januari 2016) juga mengatakan bahwa anak jalanan yang mereka bina kembali lagi jadi pencuri, bahkan mereka mencuri di rumah singgah dengan membawa lari sepeda. Anak-anak jalanan seperti Dira dan Sinta putus sekolah karena harus membantu orangtuanya, ada juga yang beralasan harus cari uang, dan ada yang sekolah sambil ngamen karena ikut perintah pimpinannya

di jalanan (wawancara Dira & Sinta Selasa 26 Januari 2016). Begitu pun dengan Ani yang profesinya sebagai penjual koran pada sore hari dan di pagi hari mengikuti pendidikan di sekolah (wawancara Ani Senin 25 Januari 2016).

Tabel 3. Dampak Kebijakan Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal	Positif	Negatif
PKBM Reksonegaran	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan membuka usaha mandiri Ada yang sudah jadi anggota militer 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan
PKBM Anak Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Anak jalanan melanjutkan pendidikan di sekolah formal Anak jalanan membuka usaha mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Anak kembali lagi menjadi anak jalanan

Berdasarkan pada Tabel 3, dampak kebijakan pendidikan nonformal, yaitu anak jalanan yang pernah dididik Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) di PKBM Reksonegaran kebanyakan sudah hidup mandiri dan punya usaha sendiri, di antaranya “ada 3 anak yang sudah berhasil dengan membuka usaha Sosis Goreng di Gamping, jualannya dititip di sekolah dan kampus. Ada juga yang membuat usaha sablon seperti baju Distro, ada juga yang sudah jadi tentara (militer), wira usaha, bekerja di Jakarta, dan kerja di Kalimantan”. Anak jalanan di PKBM Anak Mandiri yang sudah mendapatkan pendidikan dicarikan akses pekerjaan, anak jalanan diberikan modal untuk membuka usaha, anak jalanan telah melanjutkan kembali pendidikan di sekolah formal. Akibatnya mereka kebanyakan sudah tidak lagi di jalan, sekarang yang ada mantan anak jalanan. Perilaku mereka juga sudah bisa terkontrol karena diterapkan aturan yang lebih ketat, mendidik, dan juga menggunakan pendekatan kekeluargaan (wawancara Nunu Selasa 26 Januari 2016).

Selain dari dampak yang telah disebutkan di atas, anak jalanan di PKBM masih banyak yang kembali lagi ke jalanan. Misalnya “ada lima anak jalanan yang ikut kejar paket kesetaraan di PKBM Anak Mandiri namun yang dapat beasiswa hanya satu, sehingga memungkinkan anak tersebut tetap turun ke jalan” (wawancara Nunu Selasa 26 Januari 2016). Begitu pun dengan anak jalanan yang ada di PKB-

M Reksonegaran, ada yang kembali lagi ke jalanan mengamen, menipu, mencuri dan lain-lain. Dampak kebijakan pendidikan pada anak jalanan secara umum akan diuraikan, sebagai berikut;

Dilema Kebijakan Pendidikan pada Anak Jalanan

Dilema (*pertama*) kebijakan pendidikan pada anak jalanan adalah belum adanya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak jalanan. Hal ini karena kurangnya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta dalam mengurus pendidikan anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) bahwa anak jalanan tidak terlalu direspon oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena mereka menganggap bahwa anak jalanan adalah masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta, sebaliknya Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menganggap bahwa pendidikan anak jalanan adalah wilayah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya bertanggungjawab atas pendidikan anak jalanan.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa LKSA dan PKBM yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu: (1) Di Rumah Singgah Ahmad Dahlan, terkadang anak jalanan ada tetapi yang mengajar tidak bisa, kadang juga yang mengajar bisa, anak jalannya tidak ada. Persoalannya karena kebanyakan yang mengajar adalah mahasiswa yang melakukan penelitian, jadi jika mereka sudah selesai kuliah banyak yang kembali ke daerahnya dan sebagian sudah sibuk kerja (Wawancara Eka Senin 1 Februari 2016). (2) Kesulitan dalam mengajar anak jalanan di PKBM Anak Mandiri adalah mengajar paket A,B,C yang harus selang seling. Kemudian juga pembelajarannya digabung sekaligus antara paket A,B,C, jadi jika guru menjelaskan materi belajar paket A, anak yang belajar paket B,C terganggu begitu pun sebaliknya (Observasi Selasa 12, Kamis 14 Januari 2016). (3) Ada kesulitan pada tenaga pendidik di PKBM Reksonegaran karena tenaga pendidik hanya mengandalkan relawan, terkadang ada uang yang diberikan secukupnya. Guru yang mengajar di PKBM Reksonegaran hanya satu dan tidak mungkin menguasai semua materi yang diajarkan pada tingkat SD,

SMP, SMA. Terkadang ada mahasiswa yang mengajar tapi hanya sekedar relawan itu pun dalam rangka penelitian (Observasi Selasa 12, Kamis 14 Januari 2016).

Dilema (*kedua*) kebijakn pada anak jalanan adalah hak identitas. Anak yang hidup di jalan membutuhkan pengakuan dan identitas sebagai warga negara. Hal ini dijelaskan dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 15 bahwa pemenuhan atas hak pelayanan anak yang hidup di jalan meliputi: hak identitas; hak atas pengasuhan; hak atas kebutuhan dasar; hak kesehatan; hak pendidikan; dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum. Pasal 16 (1) Setiap anak yang hidup di jalan berhak memiliki dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak identitas. (2) Dokumen kependudukan meliputi: surat keterangan orang terlantar; kartu tanda penduduk; dan/atau akta pencatatan sipil.

Berdasarkan pada Perda tersebut di atas, anak jalanan yang tidak punya kartu identitas berhak mendapatkan pelayanan, karena melalui kartu identitas tersebut anak jalanan mendapatkan KSM, sehingga dapat memperoleh beasiswa dan pendidikan gratis. Hal ini diperkuat dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 17 Ayat 1, bahwa Dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial atau LKSA dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak yang diampunya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun hal tersebut di atas belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari banyak anak jalanan yang tidak memiliki kartu identitas disebabkan karena proses pengurusan yang rumit. Persoalan ini diungkapkan oleh Eka bahwa para pengelola rumah singgah, sudah berusaha dalam membantu pengurusan kartu identitas pada setiap anak jalanan tetapi masih terkendala pada pengurusan yang sulit. Sehingga pengurus identitas anak jalanan biasanya dibantu oleh Sabtipeksos karena jika pihak rumah singgah yang mengurusnya tidak dilayani (Wawancara Eka Senin 18 Januari 2016).

Di Kota Yogyakarta sebenarnya masih banyak anak jalanan yang belum memiliki kartu identitas. Hal ini karena, orangtuanya sendiri yang memang sudah tidak memiliki kartu identitas. Sehingga keinginan anak jalan untuk mendapatkan beasiswa dan pendidikan

gratis tidak tercapai karena mereka tidak memiliki KMS.

Dilema (*ketiga*) kebijakan pada anak jalanan adalah larangan berempati pada anak jalanan yaitu tidak boleh memberikan uang secara langsung pada anak yang ada di jalanan. Hal ini karena pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan anak dari jalanan. Kebijakan ini diatur dalam Perda DIY No. 6 Tahun 2011 Pasal 7, yaitu: Upaya pencegahan anak di jalanan meliputi kampanye, edukasi, dan informasi mengenai anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan tidak memberikan bantuan uang di jalan. Diperbaharui lagi dalam Perda DIY No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) Setiap orang/ lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum. (2) Pemberian uang dan/atau barang disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Perda di atas, nampaknya sulit untuk ditanamkan pada setiap individu karena naluri manusia sebagai mahluk sosial memiliki sifat empati yang kuat. Hal ini terbukti di sepanjang jalan Malioboro dan beberapa titik lainnya di Kota Yogyakarta, orang dengan jelas memberi uang pada anak-anak yang hidup di jalan. Sehingga sikap empati terhadap anak jalanan sangatlah sulit untuk dihilangkan pada setiap orang khususnya di Kota Yogyakarta. Hanya saja, apabila ada seseorang yang memberikan uang kepada anak jalanan, akan dikenakan denda atau hukuman.

Mendidik Anak Jalanan dan Keuntungan di Dalamnya

Sudarmaji (wawancara Selasa 12 Januari 2016) mengatakan bahwa "Rumah Singgah Anak Mandiri memiliki dana yang banyak dibanding rumah singgah lainnya, anggaran tersebut dari Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dan tetap diabadikan karena tempat untuk mencari duit dan menjual kemiskinan". Hal tersebut tidak sejalan lagi dengan tujuan humanis rumah singgah dan PKBM sebagai lembaga sosial *non-profit* serta berbagai bentuk kegiatan lembaga pendidikan yang tidak mementingkan keuntungan.

Analisis kebijakan pendidikan anak jalanan merupakan penelusuran mencari hakikat dan dampak suatu pendidikan. Tujuan lain, penelitian ini hendak menciptakan cakrawala

baru pemahaman relasional anak jalanan terhadap pendidikan. Bila rasio selalu diperlawanan dengan kehidupan dan materialisme dibenturkan dengan kemanusiaan, maka berdampak pada lahirnya matrealisme baru. Mendidik anak jalanan memang begitu menggiurkan, hal ini karena anak jalanan dapat menjadi modal usah untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Oleh karena itu, pendanaan pendidikan untuk anak jalanan akan berdampak pada beberapa hal, sebagai berikut;

Pertama, pergeseran kerangka kerja pendidikan anak jalanan. Bagi Marx, sifat esensi dan potensi manusia terkait erat dengan kerja. Kerja adalah suatu proses ketika manusia dan alam berpartisipasi dan manusia atas kemauannya sendiri memulai, mengatur, dan mengendalikan hubungan material di antara dirinya dan alam. Oleh karena itu, dengan bertindak kepada dunia luar dan mengubahnya, manusia sekaligus mengubah hakikatnya sendiri. Dia mengembangkan kekuatannya yang sedang tidur dan memaksanya patuh pada kemauannya (Ritzer, 2014).

Pandangan Marx di atas diwakili oleh para pengelola kebijakan pendidikan yang tidak lagi menganggap bahwa mendidik anak jalanan adalah sebuah pekerjaan atas hak-hak humanis anak jalanan, tetapi hal ini telah bergeser pada seberapa banyak uang yang mereka peroleh. Paradigma pendidikan semacam ini telah bergeser pada ideologi kapitalisme. Paradigma lama adalah sebagai relawan atas dasar jiwa sosial, kini bergeser sebagai pekerja sosial yang mendapatkan keuntungan. Relawan adalah tenaga kerja yang murni atas sikap sosial terhadap anak jalanan, sedangkan pekerja sosial dijelaskan dalam Pergub DIY No 31 Tahun 2012 Pasal 1 (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 2012) adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan kepedulian.

Kedua, pergeseran *mindset* pendidikan anak jalanan. Program kemanusiaan untuk membantu dan mendidik anak jalanan telah bergeser pada konsep matrealisme. Humanisasi pendidikan telah bergeser pada paradigma matrealisme. James & Prout (2015) mengatakan bahwa dibutuhkan sebuah paradigma baru dalam kajian sosiologi khususnya konstruksi dan rekonstruksi pada anak, dalam hal ini, kita mesti lebih jeli melihat bagaimana paradigma baru itu ada. Anak jalanan dididik tidak lagi berdasar pada hak-hak atas dasar kemanusiaan,

melainkan seberapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari mereka.

Prinsip-prinsip kemanusiaan kini telah jauh meninggalkan manusia itu sendiri, hal ini diungkapkan Marx (Ritzer, 2014) bahwa ada satu hubungan yang melekat antara *mindset* dan hakikat manusia, dia menganggap bahwa hubungan itu disesatkan oleh kapitalisme. Paradigma ini juga telah bergeser pada ideologi kapitalisme. Paradigma lama adalah sebagai relawan atas dasar kemanusiaan, kini bergeser sebagai pekerja sosial yang mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, paradigma baru dalam pendidikan anak jalanan tidak sepenuhnya mengakui keberadaan anak jalanan, atau dalam terminologi Heideggerian *hiddenness of object*, yaitu anak jalanan dijelaskan melalui penjelasan ontologis, dapat ditemukan karakter Ada (*being*) sebagai substansi, humanis, keutuhan. Namun, Ada (*being*) dalam paradigma baru anak jalanan hanya sebatas entitas tersembunyi (Dewi, 2015).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengentaskan anak dari jalan dengan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan secara fleksibel melalui pendidikan informal dan nonformal berlangsung tidak maksimal. Hal ini karena, pemberian jaminan, perizinan penyelenggaraan, dan standar kriteria layanan pendidikan untuk anak jalanan dianggap terlalu membebaskan dan memanjakan anak jalanan.

Kedua, implementasi program pendidikan informal untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta masih berjalan hingga sekarang, misalnya program sapaan dan penjangkauan, pembinaan, pendampingan, dan pelatihan. Sedangkan program pendidikan nonformal juga masih terlaksana, misalnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta masih menyelenggarakan kejar paket A,B,C melalui PKBM. Namun kedua program pendidikan tersebut di atas dirasa tidak relevan lagi dengan realitas kehidupan di Kota Yogyakarta yang semakin modis sehingga nilai-nilai pendidikan semakin terabaikan.

Ketiga, akuntabilitas jalur pendek oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan untuk anak jalanan melalui

rekening masing-masing per anak, dipisah dengan biaya anggaran untuk pengelolaan lembaga rumah singgah. Sedangkan akuntabilitas jalur panjang oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan melalui perantara pengelola PKBM atau rumah singgah, setelah itu dibagikan kepada anak jalanan.

Keempat, kebijakan pendidikan berdampak pada berkurangnya anak jalanan di Kota Yogyakarta. Namun, program ini kurang didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta karena menganggap anak jalanan adalah masalah sosial yang seharusnya ditangani oleh Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta. Sehingga, kebijakan ini berdampak pada dilema kebijakan pendidikan untuk anak jalanan dan anak jalanan hanya sekedar profit bagi lembaga pemberdayaan dan pendidikan anak jalanan.

Berdasarkan simpulan yang disampaikan tersebut maka dapat disampaikan saran sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan penelitian analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan sebaiknya melibatkan sekolah formal sehingga memperoleh informasi tentang anak jalanan yang telah melanjutkan kembali pendidikan dan bagaimana pendidikan gratis yang mereka peroleh di sekolah formal.

Kedua, pelaksanaan penelitian analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan juga diupayakan agar mengunjungi rumah, keluarga, orangtua anak jalanan sehingga dapat lebih jauh menganalisis program-program, implementasi, dan dampak kebijakan pendidikan tersebut.

Ketiga, penelitian kebijakan pendidikan anak jalanan diupayakan melakukan evaluasi secara keseluruhan dengan menggunakan metode mix dalam mengukur tingkat persentase keberhasilan kebijakan pendidikan anak jalanan.

Daftar Pustaka

- Aminatun, S. (2013). Pemberdayaan anak jalanan melalui sanggar karya anak bangsa. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(4).
- Creswell, J.W. (2014). *Penelitian kualitatif dan desain riset: memilih di antara lima pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, H. (2014). Gerakan nyata dalam penanganan anak jalanan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 38(2).
- Demartoto, A. (2012). Need-based street children management in Surakarta City of Central Java Province of Indonesia. *Asia Social Science*, 8(11).
- Dewi, S. (2015). *Ekofenomenologi: Mengurai disekuilibrium relasi manusia dengan alam*. Tangrang Selatan: CV. Marjin Kiri.
- Dinas Sosial DIY. (2012). *Standar Kelembagaan Organisasi Sosial*. Yogyakarta.
- Dwiningrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Itsnaini, M. (2010). *Pemberdayaan anak jalanan oleh Rumah Singgah Kawah di Kelurahan Kliten, Gondokusuman, Yogyakarta*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- James, A. & Prout, A. (2015). *Contemporary issues in the sociological study of childhood*. London & New York: Routledge.
- Kemendikbud. (2012). *Konsep dan strategi pengembangan pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nurwijayanti, A.M. (2012). Eksploitasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta. *Jurisprudence*, 1 (1)
- Nurkholis, D. (2014). *Program kesejahteraan sosial anak untuk anak rentan jalanan di Yayasan Domore*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pardede, Y. O. K. (2008). Konsep diri anak jalanan usia remaja. *Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah. (1991). *Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah*. Jakarta.

- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011).
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. (2014).
- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan. (2012)
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sitompul, N. (2014). *Evaluasi program penjangkauan anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Bantul Yogyakarta*. Tesis S2. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suyatna, H. (2011). Revitalisasi model anak jalanan di rumah singgah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1).
- Tooley, J. (2013). *Sekolah untuk kaum miskin*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.



PENGARUH KULTUR SEKOLAH, KONSEP DIRI, DAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF SISWA

Fawziah Zahrawati * ¹, Nahiyah Jaidi Faraz ¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

²Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: zahraburhan42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara parsial dan secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian *ex-post facto*. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang berjumlah 2.706 siswa. Sampel penelitian sebesar 366 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah: (1) kultur sekolah berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta dengan sumbangan sebesar 23,3%, (2) konsep diri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta dengan sumbangan sebesar 22,1%, (3) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta dengan sumbangan sebesar 12,5%, dan (4) kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta dengan sumbangan sebesar 36,2%.

Kata kunci: *kultur sekolah, konsep diri, status sosial ekonomi orang tua, perilaku konsumtif*

THE EFFECT OF SCHOOL CULTURE, SELF-CONCEPT, AND SOCIO-ECONOMIC STATUS OF PARENTS ON CONSUMPTIVE BEHAVIOR STUDENTS

Abstract

This study aims to investigate the effect of school culture, self-concept, and socio-economic status of parents partially and simultaneously on consumptive behavior of state senior high school students in the city of Yogyakarta. This was an ex post facto study. The research population was all eleventh grade students in state senior high school in the city of Yogyakarta with total of 2,706 students. The research sample was 366 students. The data were collected through a questionnaire. The data were analyzed by means of the descriptive analysis, simple regression analysis, and multiple regression analysis. The results of the study are: (1) school culture has an effect on consumptive behavior of state senior high school students in the city of Yogyakarta with a contribution of 23.3%, (2) self-concept has an effect on consumptive behavior of state senior high school students in the city of Yogyakarta with a contribution of 22.1%, (3) socio-economic status of parents has an effect on consumptive behavior of state senior high school students in the city of Yogyakarta with a contribution of 12.5%, and (4) school culture, self-concept, and socio-economic status have effects on consumptive behavior of state senior high school students in the city of Yogyakarta with a contribution of 36.2%.

Keywords: *school culture, self-concept, socio-economic status of parents, consumptive behavior*

Pendahuluan

Perilaku konsumtif merupakan fenomena yang telah terjadi cukup lama. Namun, hingga saat ini perilaku tersebut masih menjadi momok di kalangan masyarakat. Perilaku konsumtif paling banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Sebagaimana hasil penelitian Sukari, Larasati, Mudjijono, & Susilantini (2013, p. 159) menyatakan bahwa perilaku konsumtif dilakukan oleh 94,10% kalangan remaja karena mereka mengandalkan *gaya/style* dan selalu ingin mengikuti tren terkini, mereka belum mampu mengatur keuangan dan belum mampu mengendalikan keinginan-keinginan, mereka memiliki ego yang tinggi, senantiasa mengikuti mode demi sebuah gengsi, dan memiliki kecenderungan untuk mencoba hal-hal yang baru.

Berhubungan dengan hal tersebut, berbagai peneliti telah menemukan bahwa perilaku konsumtif telah menjangkiti para siswa Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta, yaitu: penelitian Sukari, Larasati, Mudjijono, & Susilantini (2013, p. i), Hanafie (2014, p. vii), Pangastuti (2014, p. vii), Yunita (2014, p. vii), dan Hidayatun (2015, p.vii). Dari berbagai penelitian tersebut, bahkan ada yang menemukan bahwa perilaku konsumtif siswa Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta sudah tergolong tinggi, yakni penelitian Hidayatun (2015, p.90) yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif siswa dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 60%.

Hal ini tidak mengherankan karena di Yogyakarta terdapat banyak pusat perbelanjaan, tempat berkumpulnya anak muda, tempat wisata kuliner, distro, maupun tempat perbelanjaan alat komunikasi atau IT yang menjadikan remaja mudah dalam memperoleh akses untuk berbelanja (Sukari, Larasati, Mudjijono, & Susilantini, 2013, pp. 26-45). Menilik dari perilaku konsumtif yang dilakukan oleh remaja. Ada berbagai faktor yang mendorong seorang remaja menjadi sosok yang berperilaku konsumtif. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Mangkunegara (2012, pp. 39-48) menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif, yaitu: (1) kekuatan sosial budaya yang terdiri dari faktor kultur, tingkat sosial, kelompok anutan (*small reference groups*), dan keluarga, (2) kekuatan psikologis terdiri dari pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, dan gambaran diri (*self concept*).

Dari berbagai faktor yang telah disebutkan, pada konteks remaja yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas, maka kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa. Hal ini diperkuat oleh hasil temuan Durmaz (2014, p. 40) yang menyatakan bahwa perilaku pembelian seseorang sangat dipengaruhi oleh kultur, yaitu sekitar 60%. Selain itu, hampir sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah, sehingga kultur sekolah memiliki peluang besar untuk mempengaruhi perilaku anak.

Pada bagian lain, adapula faktor internal yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa, yaitu konsep diri. Dalam hal ini Khare & Handa (2009, p.63) menyatakan bahwa ada hubungan antara konsep diri terhadap pemilihan merek barang atau jasa karena hal ini berhubungan dengan upaya seseorang dalam mencari perhatian di antara kalangannya. Merek dapat merepresentasikan konsep diri yang diharapkan oleh tiap-tiap orang. Temuan tersebut secara teoritis diperkuat oleh Kotler & Armstrong (2009, p.172) yang menyatakan bahwa konsep diri menghadirkan gagasan bahwa identitas mereka ditunjukkan dan dicerminkan oleh kepemilikannya, yaitu “kami adalah apa yang kami miliki”, sehingga konsep diri juga memiliki peluang yang besar untuk mempengaruhi anak dalam berperilaku konsumtif.

Selain kultur sekolah dan konsep diri. Adapula faktor eksternal yang mempengaruhi seorang siswa dalam berperilaku konsumtif, yaitu status sosial ekonomi orang tua. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sipunga & Muhammad (2014, p. 67) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi (pendapatan) orang tua berpengaruh terhadap perilaku konsumtif remaja. Sebab, siswa didukung oleh sarana dan prasarana yang mudah diakses dan juga atas dukungan finansial orang tua siswa yang memiliki status sosial ekonomi cukup berada, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dan berusaha untuk mengikuti mode atau tren yang sedang berkembang. Dengan perilaku yang demikian, siswa akhirnya membeli barang bukan karena pertimbangan fungsional atau manfaat, tetapi karena gaya hidup.

Menilik perilaku konsumtif yang terjadi di kalangan masyarakat. Sesungguhnya perilaku tersebut secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Haryanto, 2011,

p. 170). Namun secara mikro dapat menghardikan permasalahan karena menjadikan masyarakat tidak akan pernah terpuaskan dan tidak akan mampu memuaskan kebutuhan konsumsi mereka, sehingga melahirkan masyarakat konsumen yang rakus dan mengidap ketidakpuasan tanpa henti (Piliang, 2003, p. 144).

Kontroversi antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kenyataan bahwa perilaku konsumtif siswa menjadi penghambat dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi aspek afektif dan psikomotorik juga harus menjadi hal yang patut untuk menjadi perhatian. Sebab, ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi.

Upaya yang dilakukan termasuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan (perilaku konsumtif) yang dialami siswa. Dengan mengetahui pengaruh ketiga faktor, yaitu: kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa, maka dapat diupayakan jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga faktor-faktor penyebab siswa berperilaku konsumtif tidak lagi menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kultur Sekolah, Konsep Diri, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta."

Dari pemaparan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) pengaruh kultur sekolah terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, (2) pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, (3) pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, (4) pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta?

Selain itu, yang menjadi hipotesis pada penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh kultur sekolah terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, (2) terdapat pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, (3) terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta, dan

(4) terdapat pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *ex-post facto*. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, terdapat 11 Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai bulan Februari 2016.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang berjumlah 2.706 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional sampling* dengan rumus *Slovin*, sehingga didapatkan besarnya sampel dari populasi untuk taraf kesalahan 5%, yaitu sebanyak 366 siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan model berupa pernyataan semi terbuka untuk variabel status sosial ekonomi orang tua, sedangkan untuk variabel kultur sekolah, konsep diri, dan perilaku konsumtif siswa menggunakan pernyataan tertutup dengan model *likert*.

Uji validitas yang digunakan adalah *construct validity* dengan menggunakan pendapat ahli (*judgment experts*). Setelah angket dinyatakan layak, maka terlebih dahulu angket diujicobakan kepada 110 siswa. Kemudian dilakukan uji validitas menggunakan analisis faktor konfirmatori (CFA). Kesimpulan tentang layak tidaknya analisis faktor dilakukan dapat dilihat dengan menggunakan uji *Kaiser Meyer-Olkin* (KMO). Apabila nilai indeks tinggi (berkisar antara 0,5 sampai 1,0) berarti analisis faktor layak dilakukan (Ghozali, 2011, p. 97).

Berdasarkan hasil uji validitas, terdapat item yang gugur pada instrumen kultur sekolah karena nilai *anti-image matrices correlation* di bawah 0,50, sedangkan untuk instrumen lainnya sudah valid dan setiap itemnya telah menjadi bagian setiap faktor.

Reliabilitas instrumen diketahui dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Indeks keandalan instrumen dengan formula *Alpha* yang digolongkan baik apabila nilai

indeks sama atau lebih besar dari 0,7 (Muijs, 2004, p.105). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena nilai *Alpha Cronbach* setiap instrumen lebih besar dari 0,7.

Teknik analisis data dilakukan dengan Analisis deskriptif kuantitatif, Uji prasyarat analisis, Uji hipotesis dan Sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Analisis deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel serta dapat melakukan representasi obyektif masalah penelitian. Data dari setiap variabel dianalisis dengan menentukan nilai rata-rata dan nilai simpangan baku. Kemudian hasil perhitungan tersebut di kategorikan dengan menggunakan kategori kecenderungan setiap variabel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian asumsi regresi yang berupa uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Keempat hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan teknik analisis yang berbeda. Hipotesis I, II, dan III diuji menggunakan teknik analisis regresi sederhana, sedangkan untuk menguji hipotesis IV diuji menggunakan teknik regresi ganda.

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan setiap prediktor dalam menunjang efektifitas garis regresi untuk keperluan pengadaan prediktor, sedangkan sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan setiap prediktor dalam perbandingan terhadap nilai kriterium.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif diperoleh informasi bahwa perilaku konsumtif siswa berada pada kategori cukup tinggi, yaitu sebanyak 159 (43,3%) siswa, kultur sekolah berada pada kategori baik, yaitu sebanyak 232 (63,4%) siswa menilai demikian, konsep diri siswa berada pada kategori baik, yaitu sebanyak 242 (66,1%) siswa, dan status sosial ekonomi orang tua berada pada kategori sangat tinggi, yaitu sebanyak 213 (58,2%) siswa yang menilai demikian.

Uji Prasyarat Analisis

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov* memperoleh nilai p untuk variabel kultur sekolah sebesar 0,370, nilai p pada variabel konsep diri sebesar 0,262, nilai p pada variabel status sosial ekonomi orang tua sebesar 0,831, dan nilai p pada variabel perilaku konsumtif sebesar 0,105. Oleh karena nilai p dari keempat variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel telah berdistribusi normal.

Hasil uji linearitas dengan memperhatikan pedoman jalur *deviation from linearity* diperoleh nilai p pada variabel kultur sekolah-perilaku konsumtif sebesar 0,427, nilai p pada variabel konsep diri-perilaku konsumtif sebesar 0,405, dan nilai p pada variabel status sosial ekonomi orang tua-perilaku konsumtif sebesar 0,795. Oleh karena nilai p lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang linear.

Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan metode *Variance Inflation Factor* (VIF) diperoleh nilai VIF pada variabel kultur sekolah sebesar 1,364, nilai VIF pada variabel konsep diri sebesar 1,322, dan VIF pada variabel status sosial ekonomi orang tua sebesar 1,058. Oleh karena nilai VIF pada ketiga variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada ketiga variabel.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Spearman's Rho diperoleh nilai p pada variabel kultur sekolah sebesar 0,475, nilai p pada variabel konsep diri sebesar 0,468, dan nilai p pada variabel status sosial ekonomi orang tua sebesar 0,906. Oleh karena nilai p pada ketiga variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain ada kesinambungan tiap-tiap variabel (X) jika dipasangkan dengan variabel (Y).

Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi sederhana memperoleh nilai *constant* untuk variabel kultur sekolah sebesar 52,550, sedangkan koefisien garis regresinya sebesar -0,270. Nilai negatif menunjukkan bahwa kultur sekolah memiliki arah pengaruh negatif terhadap perilaku kon-

sumtif siswa. Artinya, semakin tinggi kultur sekolah, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswanya, begitupula sebaliknya. Selain itu, temuan ini dapat diartikan bahwa bila nilai kultur sekolah bertambah 1, maka nilai perilaku konsumtif akan berkurang sebanyak 0,270. Adapun persamaan garis regresi yang diperoleh sebagai berikut.

$$Y = 52,550 - 0,270X_1.$$

Nilai R^2 variabel kultur sekolah sebesar 0,233. Hal ini menunjukkan bahwa 23,3% perilaku konsumtif siswa dipengaruhi oleh kultur sekolah dan sisanya 76,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk nilai F pada variabel kultur sekolah diperoleh nilai sebesar 110,521 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi tersebut sangat signifikan. Artinya, hipotesis pertama yang menyatakan: "Terdapat pengaruh kultur sekolah terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta," diterima.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil analisis regresi sederhana memperoleh nilai *constant* untuk variabel konsep diri sebesar 54,843, sedangkan koefisien garis regresinya sebesar -0,306. Nilai negatif menunjukkan bahwa konsep diri memiliki arah pengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif siswa. Artinya semakin tinggi konsep diri, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya. Selain itu, temuan ini dapat diartikan bahwa bila nilai konsep diri bertambah 1, maka nilai perilaku konsumtif akan berkurang 0,306. Adapun persamaan garis regresi yang dihasilkan dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = 54,843 - 0,306X_2.$$

Nilai R^2 untuk variabel konsep diri sebesar 0,221. Hal ini menunjukkan bahwa 22,1% perilaku konsumtif siswa dipengaruhi oleh konsep diri dan sisanya 77,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk nilai F pada variabel konsep diri sebesar 103,387 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi tersebut sangat signifikan. Artinya hipotesis kedua yang menyatakan: "Terdapat pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta," diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil analisis regresi sederhana memperoleh nilai *constant* untuk variabel status sosial ekonomi orang tua sebesar 21,405, sedangkan koefisien garis regresinya sebesar 0,276. Nilai positif menunjukkan bahwa status sosial ekonomi orang tua memiliki arah pengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa. Artinya, semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya. Selain itu, temuan ini dapat diartikan bahwa bila nilai status sosial ekonomi orang tua bertambah 1, maka nilai perilaku konsumtif bertambah 0,276. Adapun persamaan garis regresi yang diperoleh dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = 21,405 + 0,276X_3.$$

Nilai R^2 sebesar 0,125 menunjukkan bahwa 12,5% perilaku konsumtif siswa dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tua dan sisanya 87,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk nilai F pada variabel status sosial ekonomi orang tua sebesar 52,201 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi tersebut sangat signifikan. Artinya, hipotesis ketiga yang menyatakan: "Terdapat pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta," diterima.

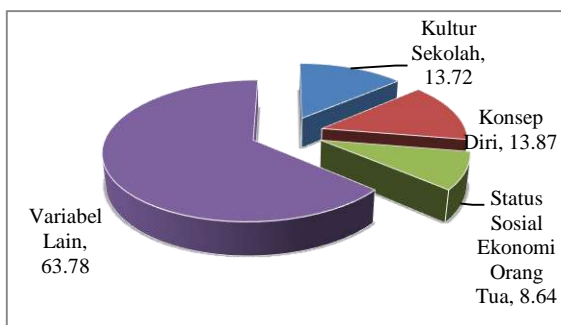
Pengujian Hipotesis Keempat

Persamaan regresi ganda yang diperoleh, yaitu: $Y = 53,275 - 0,159X_1 - 0,192X_2 + 0,190X_3$. Konstanta a sebesar 50,588. Artinya, jika kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua siswa nilainya 0, maka perilaku konsumtif siswa nilainya sebesar 53,275. Selanjutnya, nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,362. Hal ini menunjukkan bahwa 36,2% perilaku konsumtif siswa dipengaruhi oleh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua dan sisanya 63,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk nilai F sebesar 68,509 dengan signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi tersebut sangat signifikan. Artinya, hipotesis keempat yang menyatakan: "Terdapat pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Negeri di Kota Yogyakarta," diterima.

Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif

Sumbangan Efektif

Sumbangan efektif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan setiap prediktor dalam menunjang efektifitas garis regresi untuk keperluan pengadaan prediktor. Sumbangan efektif secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1.

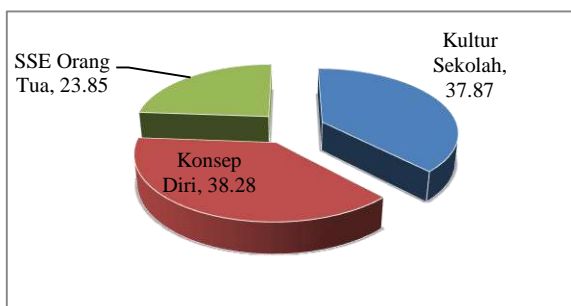


Gambar 1. *Pie Chart* Sumbangan Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kontribusi kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif sebesar 36,22%. Sumbangan efektif kultur sekolah sebesar 13,72%, sumbangan efektif konsep diri sebesar 13,87%, dan sumbangan efektif status sosial ekonomi orang tua sebesar 8,64%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan variabel yang memiliki sumbangan efektif terbesar di antara variabel bebas lain yang diteliti.

Sumbangan Relatif

Sumbangan relatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan setiap prediktor dalam perbandingan terhadap nilai kriterium. Sumbangan efektif secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. *Pie Chart* Sumbangan Relatif

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sumbangan relatif variabel kultur sekolah sebesar 37,87%, sumbangan relatif variabel

konsep diri sebesar 38,28%, dan sumbangan relatif status sosial ekonomi orang tua sebesar 23,85%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel yang memiliki sumbangan relatif terbesar adalah variabel konsep diri, yaitu sebesar 38,28%.

Pengaruh Kultur Sekolah terhadap Perilaku Konsumtif Siswa

Hasil penelitian menemukan bahwa kultur SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang meliputi lingkungan fisik sekolah, aturan sekolah, aneka kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah, visi dan misi sekolah, sikap yang dipegang oleh warga sekolah, semboyan-semboyan yang memotivasi seluruh warga sekolah, hubungan antarwarga sekolah, dan pola keyakinan yang dipegang teguh oleh warga sekolah termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara hasil penelitian dan akreditasi SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang semuanya terakreditasi A.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa kultur sekolah memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa layaknya kultur yang ada di masyarakat, kultur sekolah tanpa disadari mampu mempengaruhi perilaku para warganya. Kultur mampu mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi, bersosialisasi, dan berpenampilan. Hal ini terjadi karena kultur sekolah meliputi aturan-aturan, aneka kebiasaan yang berada di sekolah, sikap yang dipegang oleh warga sekolah, semboyan-semboyan, hubungan antarwarga sekolah, dan pola keyakinan yang pada akhirnya akan membentuk perilaku siswa dalam berinteraksi dengan sesama warga sekolah. Jadi, ketika siswa berada di sekolah yang para warganya berbudaya konsumtif, maka siswa tersebut memiliki kecenderungan untuk berperilaku konsumtif juga karena hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri siswa terhadap kultur yang ada di sekolahnya.

Pada bagian lain, diperoleh informasi bahwa pengaruh kultur sekolah terhadap perilaku konsumtif siswa sebesar 23,3%, sehingga dapat dinyatakan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa. Selanjutnya, arah pengaruh kultur sekolah terhadap perilaku konsumtif, yaitu arah negatif. Artinya, semakin tinggi kultur sekolah, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Hal ini terjadi karena sekolah yang berkultur positif memiliki kemampuan dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga sekolah, sedangkan sekolah yang berkultur negatif akan kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya (Zamroni, 2007, p. 240). Kultur sekolah yang negatif akan menjadikan warga sekolah terfokus pada nilai-nilai negatif yang berada di sekolah (Deal & Peterson, 2009, p. 163). Selain itu, kultur sekolah berhubungan erat dengan kinerja sekolah. Kultur sekolah yang positif cenderung menghasilkan kinerja sekolah yang cukup baik, sehingga prestasi sekolah juga lebih baik, sedangkan kultur sekolah yang negatif cenderung menghasilkan kinerja yang kurang baik, sehingga prestasi sekolah kurang baik (Widyaningsih, 2007, p. 219).

Sekolah yang memiliki kultur positif akan mengarahkan warganya untuk fokus pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan mutu sekolah, sehingga warga sekolah sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang positif, demi mencapai visi dan misi sekolah. Sekolah yang berkultur positif juga memiliki lingkungan sekolah dan ruang kelas nyaman dan kondusif untuk pelaksanaan pembelajaran, selalu mensosialisasikan aturan-aturan yang berada di sekolah sebagai upaya menciptakan suasana tertib di lingkungan sekolah, membiasakan para warga sekolah untuk mengadakan upacara setiap hari besar nasional, hubungan antarwarga sekolah yang baik, siswa memiliki motivasi dan kedisiplinan, guru tepat waktu hadir di kelas karena menikmati proses belajar mengajar bersama siswa, berbagai kebiasaan positif hadir di tengah-tengah warga sekolah, seperti kebiasaan untuk memberi salam, dan adanya keyakinan antarwarga sekolah bahwa mereka mampu mencapai prestasi yang membanggakan.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kultur sekolah yang positif sangat penting untuk diciptakan, dijaga, dan dipelihara keberadaannya. Agar dapat dijadikan modal untuk memajukan mutu pendidikan dan pegangan dalam memecahkan masalah yang berada di sekolah, seperti perilaku konsumtif siswa.

Pengaruh Konsep Diri terhadap Perilaku Konsumtif Siswa

Hasil analisis deskriptif kuantitatif menemukan bahwa konsep diri siswa yang

meliputi: pengetahuan tentang diri, pengharapan terhadap diri, dan penilaian tentang diri, baik yang bersifat akademis maupun non akademis berada pada kategori baik. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa konsep diri memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Konsep diri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa, sebab cakupan dari konsep diri yang meliputi pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti apa ia memandang dirinya akan tercermin dari keseluruhan perilakunya.

Temuan ini didukung oleh penelitian Mocanu (2013, p. 141) tentang "*Brand Image as a Function of Self-Image and Self-Brand Connection*," menyatakan bahwa menggunakan barang atau jasa tertentu dapat meningkatkan citra diri seseorang. Sejumlah aspek yang menarik dan penting tentang perilaku dan sikap konsumsi remaja, yakni mengonsumsi barang atau jasa yang bermerek dapat memberikan rasa aman, ketenangan pikiran, persahabatan, dan penerimaan sosial. Tidak hanya merek pakaian modis dan aksesoris yang muncul untuk menggantikan kepribadian dan preferensi pribadi, tetapi juga ada tanda-tanda bahwa mengenakan pakaian tertentu dianggap lebih penting daripada perilaku seseorang itu sendiri.

Hasil penelitian ini juga menemukan pengaruh konsep diri sebesar 22,1% terhadap perilaku konsumtif siswa. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa selain konsep diri. Selanjutnya, arah pengaruh konsep diri terhadap perilaku konsumtif, yaitu arah negatif, sehingga dapat diprediksi bahwa semakin tinggi konsep diri siswa, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Perilaku seseorang merupakan representasi dari konsep dirinya yang meliputi bagaimana pengetahuan, pengharapan, dan penilaian tentang dirinya, sehingga konsep diri memiliki pengaruh terhadap penentuan tingkah laku seseorang. Adapun karakteristik siswa yang memiliki konsep diri positif dapat dilihat dari pengetahuan tentang dirinya. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan yang bersifat akademis dan non akademis, seperti pengetahuan tentang cita-cita, bakat, minat, potensi diri, penampilan, dan rasa sosial. Pengharapan siswa untuk dapat mencapai cita-cita, menjadi orang yang sukses, menjadi pribadi yang rendah hati, bermanfaat bagi orang lain, mem-

banggakan orang tua, dan berani menghadapi tantangan juga merupakan karakteristik siswa yang memiliki konsep diri positif.

Selain itu, siswa yang memiliki konsep diri positif juga memiliki penilaian yang positif terhadap dirinya, seperti kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan konsep diri yang positif untuk meminimalisir perilaku konsumtif siswa.

Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua terhadap Perilaku Konsumtif Siswa

Hasil analisis deskriptif kuantitatif memperoleh informasi bahwa status sosial ekonomi orang tua yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan orang tua siswa termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pendidikan terakhir orang tua siswa yang didominasi oleh lulusan Perguruan Tinggi (PT), pekerjaan ayah dan ibu didominasi oleh wiraswasta, dan pendapatannya kebanyakan berkisar >Rp. 1.500.000 - ≤ Rp. 3.000.000 setiap bulan.

Selanjutnya, hasil penelitian juga menemukan bahwa status sosial ekonomi orang tua memberi pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Hal ini terjadi karena secara finansial siswa masih tergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu, dengan adanya dukungan status sosial ekonomi dari orang tua, maka siswa akan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh hal yang mereka inginkan. Sebagaimana hasil penelitian Sipunga & Muhammad (2014, p. 67) yang menyatakan bahwa penghasilan orang tua mempunyai kaitan erat dengan pola konsumsi remaja. Remaja dengan penghasilan orang tua yang tinggi mempunyai peluang yang besar untuk berperilaku konsumtif. Remaja akan lebih mudah mewujudkan pencapaian status sosial yang diinginkan. Perilaku konsumtif remaja yang digambarkan dalam 4 indikator, yaitu: ingin tampak berbeda dengan orang lain, kebanggaan diri, ikut-ikutan, dan pencapaian status sosial.

Pada bagian lain, penelitian ini menemukan pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa sebesar 12,5%, sehingga dapat dimaknai bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa. Penelitian ini juga menemukan arah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa,

yaitu arah positif, sehingga dapat diprediksi bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua siswa, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Ini dikarenakan seorang anak yang memiliki orang tua dengan status sosial ekonomi atas, memiliki perbedaan dalam menghabiskan waktu luangnya, jika dibandingkan dengan seorang anak yang berasal dari orang tua dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah. Hal ini, pada akhirnya akan berdampak pada perbedaan pola perilaku pembelian (konsumsi) barang atau jasa. Sebab, semakin tinggi pendapatan orang tua, maka semakin besar kesempatan untuk membelanjakan uang pemberian dari orang tua. Siswa dengan status sosial ekonomi (pendapatan) orang tua yang tinggi dengan mudah mendapatkan akses berbelanja, begitupula sebaliknya.

Pengaruh Kultur Sekolah, Konsep Diri, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa terhadap Perilaku Konsumtif Siswa

Hasil penelitian menemukan bahwa kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua siswa secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama terhadap perilaku konsumtif siswa sebesar 36,2%.

Penelitian ini menemukan bahwa jika ketiga variabel dianalisis secara bersama-sama, maka konsep diri merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi perilaku konsumtif siswa yang dapat dilihat dari nilai sumbangan efektif konsep diri sebesar 13,87%. Hal ini disebabkan oleh karena barang atau jasa yang dikonsumsi telah menjadi elemen vital dalam membentuk identitas seseorang dan refleksi atasnya: siapa kita, persepsi kita terhadap diri sendiri, dan penilaian atas harga diri kita seluruhnya dipengaruhi oleh apa yang kita miliki (Lee, 2006, p.45), sehingga siswa cenderung memiliki hasrat untuk mengonsumsi barang mewah sebagai upaya untuk mewujudkan konsep diri yang diidamkan.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kultur sekolah yang sifatnya berada di luar diri siswa juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku konsumtif siswa. Hal ini terlihat jelas dari nilai sumbangan efektif konsep diri dan kultur sekolah yang tidak jauh berbeda. Konsep diri

memiliki sumbangan efektif sebesar 13,87%, sedangkan kultur sekolah memiliki sumbangan efektif yakni sebesar 13,72%. Jadi, selisih kedua variabel tersebut hanya sebesar 0,15%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa yang menjadi bagian dari suatu sekolah, memiliki kecenderungan untuk terpengaruh oleh kultur sekolah tersebut. Kultur yang sifatnya berada di luar diri siswa, memiliki daya paksa, dan pada akhirnya membentuk pribadi serta perilaku siswa tersebut.

Pada bagian lain dari variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini, ada variabel status sosial ekonomi orang tua yang memiliki sumbangan efektif terendah yakni 8,64%. Menilik hal tersebut, meskipun Piliang (2011, p. 416) menyatakan bahwa konsumsi sebagai suatu sistem diferensiasi, yaitu sistem pembentukan perbedaan-perbedaan status, simbol, dan prestise sosial. Namun, pada kenyataannya masyarakat pada saat ini telah bergerak mendekati masyarakat tanpa kelompok-kelompok status tetap, tempat pengadopsian gaya-gaya hidup (tampak pada pilihan *fashion*, aktivitas waktu luang, barang konsumen, ciri-ciri jasmani) yang dulu tetap bagi kelompok-kelompok spesifik, telah dikalahkan, demikian yang dinyatakan oleh Featherstone (Ritzer & Smart, 2011, p.828), sehingga pengaruh status sosial ekonomi tidak terlalu besar.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kultur sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Adapun besar pengaruhnya, yaitu 23,3%. Nilai koefisien garis regresinya sebesar -0,270 yang menunjukkan bahwa kultur sekolah memiliki arah pengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif siswa. Artinya, semakin tinggi kultur sekolah, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Konsep diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Adapun besar pengaruhnya, yaitu 22,1%. Nilai koefisien garis regresinya sebesar -0,306 yang menunjukkan bahwa konsep diri memiliki arah pengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif siswa. Artinya, semakin tinggi konsep diri, maka semakin rendah perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Status sosial ekonomi orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Adapun besar pengaruhnya, yaitu 12,5%. Nilai koefisien garis regresinya sebesar 0,276 yang menunjukkan bahwa status sosial ekonomi orang tua memiliki arah pengaruh positif terhadap perilaku konsumtif siswa. Artinya, semakin tinggi status sosial ekonomi orang tua, maka semakin tinggi pula perilaku konsumtif siswa, begitupula sebaliknya.

Kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa. Adapun besar pengaruhnya, yaitu 36,2% terhadap perilaku konsumtif siswa.

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut.

Pihak sekolah memperhatikan kebijakan di sekolah yang terkait upaya untuk menciptakan, menjaga, dan memelihara kultur sekolah yang positif.

Orang tua siswa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dalam mengatasi perilaku konsumtif yang dialami oleh anak.

Peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain selain kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua. Selain itu, peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan kuesioner untuk memperoleh data, tetapi juga menggunakan metode wawancara.

Ada beberapa saran yang disampaikan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pihak sekolah disarankan untuk memperhatikan nilai-nilai yang berada di sekolah. Nilai tersebut terwujud dalam semboyan-semboyan dan sikap yang dipegang oleh warga sekolah, seperti sikap disiplin. Selain itu, pihak sekolah juga disarankan untuk mengadakan sosialisasi tentang dampak dari perilaku konsumtif.

Orang tua disarankan membiasakan anak untuk menabung dan memberikan pengertian akan dampak buruk dari berperilaku konsumtif, sedangkan siswa disarankan untuk membentuk dan mengembangkan konsep diri yang positif dengan jalan mengembangkan sifat-sifat positif yang ada di dalam diri, seperti percaya diri.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari variabel lain, di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif siswa. Misalnya: iklan, *life style*, *brand image*, *brand personality congruence*, atau *purchasing power*.

Daftar Pustaka

- Deal, T.C. & Peterson, K.D. (2009). *Shaping school culture; pitfalls, paradoxes, & promises*. (2nd Ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- Durmaz, Y. (2014). The influence of cultural factors on consumer buying behaviour and an application in Turkey. *Global Journal of Management and Business Research: E Marketing*, 14 (1), 37-44.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. (5th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafie, Z. (2014). *Hubungan antara konformitas dengan perilaku konsumtif remaja terhadap produk distro ada siswa kelas X SMA N 4 Yogyakarta*. Skripsi S1, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haryanto, S. (2011). *Sosiologi ekonomi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hidayatun, U. (2015). *Pengaruh intensitas penggunaan media sosial dan dukungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2014/2015*. Skripsi S1, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lee, M.J. (2006). *Budaya konsumen terlahir kembali; arah baru modernitas dalam kajian modal konsumsi dan kebudayaan*. (Terjemahan Nurhadi). London: Routledge. (Buku asli diterbitkan tahun 1993).
- Khare, A. & Handa, M. (2009). Role of individual self-concept and brand personality congruence in determining brand choice. *Innovative Marketing*, 5(4).
- Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). *Prinsip-prinsip pemasaran* (12th Ed.). (Terjemahan Bob Sabran). New York: Pearson Education, Inc. (Buku asli diterbitkan tahun 1997).
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2012). *Perilaku konsumen*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mocanu, R. (2013). Brand image as a function of self-image and self-brand connection. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 1(3).
- Muijs, D. (2004). *Doing quantitative research in education with SPSS*. California: SAGE Publications Ltd.
- Pangastuti, B.K.D.G. (2014). *Hubungan antara konsep diri dengan perilaku konsumtif siswa kelas XI SMA BOPKRI 2 Yogyakarta*. Skripsi S1, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Piliang, Y. A. (2003). *Hipersemiotika; tafsir cultural studies atas matinya makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Piliang, Y. A. (2011). *Dunia yang dilipat; tamasya melampaui batas-batas kebudayaan* (3rd Ed.). Bandung: Matahari.
- Ritzer, G. & Smart, B. (2011). *Handbook teori sosial*. (Terjemahan oleh Muttaqien, Widowatie, & Waluyati). London: SAGE Publications. (Buku asli diterbitkan tahun 2001).
- Sipunga, P.N. & Muhammad, A.H. (2014). Kecenderungan perilaku konsumtif remaja ditinjau dari pendapatan orang tua pada siswa-siswi SMA Kesatrian 2 Semarang. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 3(1).
- Sukari, Larasati.T.A., Mudjijono, & Susilantini. E. (2013). *Perilaku konsumtif siswa SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta:

- Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.
- Widyaningsih, T. S. (2007). Hubungan kultur sekolah dengan kinerja sekolah di SMP Negeri Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 10(2).
- Yunita, R. (2014). Hubungan antara *self esteem* dengan perilaku konsumtif siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Skripsi S1, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (prakondisi menuju era globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.



**KEEFEKTIFAN PENDEKATAN SAINTIFIK MODEL *PROBLEM BASED LEARNING*,
PROBLEM SOLVING, DAN *INQUIRY* DALAM PEMBELAJARAN IPS**

Depict Pristine Adi *¹, Muhsinatun Siasah Masruri¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: pdepik@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keefektifan antara pembelajaran: (1) antara model *Problem-Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry*; (2) model *Problem-Based Learning* dan model *Problem Solving*; (3) model *Problem-Based Learning* dan model *Inquiry*; dan (4) model *Problem Solving* dan model *Inquiry*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis eksperimen semu dengan *posttest-only control group design* yang sudah dimodifikasi sesuai dengan *quasi-experimental research*. Pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi yaitu berupa jumlah peserta didik, nilai raport sebagai skor awal, perangkat pembelajaran, dan tes hasil belajar. Analisis data menggunakan *one way anava* pada taraf signifikansi 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model *Problem-Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* terdapat perbedaan keefektifan. Hasil analisis yang menyatakan hipotesis nihil diterima hanya terdapat dalam pengujian hipotesis yang kedua, yakni tidak terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik dengan model *Problem-Based Learning* dan *Problem Solving*; sedangkan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik model *Problem-Based Learning* dan *Inquiry*; hipotesis keempat menunjukkan terdapat perbedaan keefektifan pendekatan saintifik model *Problem Solving* dan *Inquiry*.

Kata kunci: keefektifan pendekatan saintifik, PBL, PS, Inquiry

***THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC APPROACH OF PROBLEM BASED LEARNING,
PROBLEM SOLVING, AND INQUIRY IN TEACHING AND LEARNING SOCIAL STUDIES***

Abstract

This research aims to reveal: (1) the differences among Problem-Based Learning, Problem solving, and Inquiry; (2) the effectiveness of Problem-Based Learning and Problem Solving model; (3) the effectiveness of Problem-Based Learning and Inquiry model; and (4) the effectiveness of Problem Solving and Inquiry model. This research was quantitative research with quasi experiment as a method. It used the post test-only control group design modified in accordance with the quasi-experimental research. The research data were obtained through documentation of the number of learners, raport book score as the initial score, learning devices, and evaluation. The data analysis technique was one way ANOVA at the significance level of 0.05. The results show that there is a significance difference in learning by using the scientific approach of Problem-Based Learning, Problem Solving, and Inquiry. The null hypothesis is accepted in the second hypothesis testing. There is no effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem-Based Learning and Problem Solving; in the third hypothesis testing, there is an effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem-Based Learning and Inquiry; and in the fourth hypothesis testing, there is an effectiveness difference in the scientific approach with the model of Problem Solving and Inquiry.

Keywords: the effectiveness of scientific approach, PBL, PS, Inquiry

Pendahuluan

Kegiatan pembelajaran harus memiliki kualitas interaksi yang baik sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di sekolah yang menjadi objek penelitian ini. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama bulan Agustus tahun 2015 di SMPN 1 Sumberbaru, SMPN 3 Tanggul, dan SMPN 1 Sumberbaru Kabupaten Jember bagian Barat menunjukkan bahwa dalam Kegiatan pembelajaran IPS terdapat beberapa masalah yang fundamental, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan ini diasumsikan akibat dari tiga sebab yaitu, kegiatan pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran, yang menjadi permasalahan adalah belum ada keterpaduan materi, dan penggunaan tema-tema yang kurang sesuai dengan kondisi dan situasi. Data hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa buku dan sumber belajar yang digunakan oleh pendidik belum menunjukkan keterpaduan materi pembelajaran sehingga memaksa pendidik untuk melakukan pembelajaran dengan disiplin ilmu yang konvensional.

Permasalahan utama dalam dunia pendidikan adalah bagaimana cara pendidik menggunakan pendekatan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara menyeluruh, efektif, dan efisien. Banyak teori yang menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, seperti tulisan Syaiful & Aswan (2010, pp. 53-69) bahwa pendekatan dalam pembelajaran meliputi: pendekatan behavioristik, pendekatan kelompok, pendekatan bervariasi, pendekatan edukatif, pendekatan keagamaan, dan pendekatan kebermaknaan. Semua pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik umum peserta didik pada saat ini, akan tetapi para pendidik belum seluruhnya dapat menerapkan secara efektif dan efisien.

Pendekatan saintifik (*scientific approach*) merupakan pendekatan yang mengarah pada kompleksitas dalam kegiatan pembelajaran. Paradigma pendekatan saintifik mengarah ke dalam berbagai hal, seperti yang dikatakan Sudarwan (Majid, 2014 p.194) bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang bercirikan penonjolan dimensi peng-

amatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran.

Pada faktor pendidik, masalah yang terjadi adalah kemampuan pengelolaan kelas yang belum memadai, metode pembelajaran belum bervariasi, pendekatan pembelajaran belum saintifik, dan belum terjadi keseimbangan antara beban belajar dan alokasi waktu. Hasil observasi mengungkapkan bahwa pendidik juga memperoleh tugas selain mengajar, sehingga pendidik sering meninggalkan kelas. Organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kurang maksimal dalam meningkatkan kompetensi pendidik sehingga pendidik kurang terampil dalam membuat variasi dan menggunakan model-model pembelajaran. Selain itu, pendekatan saintifik belum begitu dikenal oleh pendidik karena sosialisasi dari belum sampai ke pelosok-pelosok yang jauh dari jangkauan.

Pada faktor peserta didik, permasalahan yang terjadi adalah pada daya serap peserta didik kurang memadai, motivasi belajar rendah, konsentrasi peserta didik terpecah karena jumlah peserta didik melampaui kapasitas rombongan belajar. Hal ini berakibat pada kurang efektivitasnya proses pembelajaran sehingga hasil belajar peserta didik banyak yang belum memenuhi Kriteria Kelulusan Minimum (KKM). Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik yang berupa nilai formatif, sumatif, dan nilai rapot. Hasil observasi menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik lebih dari 50% berada di batas bawah sesuai KKM untuk formatif, dan 40% berada di bawah rata-rata, yang mengakibatkan 25% nilai rapot peserta didik berada dibawah rata-rata kelas.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, diperlukan suatu inovasi yang mampu membuat siswa merasa dilibatkan secara langsung selama proses pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran sehingga siswa terlibat secara langsung dan lebih aktif selama proses pembelajaran. Seperti yang dihasilkan dari penelitian Johnston (Hillman, 2003, p. 8) yang menunjukkan bahwa pembelajaran *Problem Based Learning* merupakan pembelajaran yang tidak membosankan dan menjadikan peserta didik merasa tidak terasingkan didalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan peserta didik sibuk dengan pembentukan konsep secara sendiri.

Tidak hanya itu, penelitian Gok & Silay (2010) juga menunjukkan bahwa *Pro-*

blem Solving lebih efektif pada pembelajaran kooperatif daripada pengajaran tradisional. Begitu pula dengan hasil penelitian Balim (2009, p.16) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran *Inquiry* merupakan salah satu dari berbagai metode pengajaran di mana peserta didik aktif mengikuti panduan pendidik mereka, hal ini diyakini dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran lebih daripada metode pengajaran tradisional yang sering dilakukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Abdi (2014, p. 40) mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan-temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pencapaian peserta didik yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran *Inquiry* dan peserta didik yang menggunakan metode pengajaran tradisional.

Di sisi lain, Sani (2014, p. 54) menjelaskan bahwa pendekatan saintifik merupakan metode ilmiah yang digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran untuk mengupayakan peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan ilmu yang didapatkannya. Dengan demikian peserta didik mampu menelaah materi pembelajaran dengan sendirinya. Sampai saat ini model pembelajaran yang banyak digunakan oleh pendidik adalah metode ceramah. Dengan metode ceramah peserta didik cenderung bosan dan malas-malasan sehingga perlu adanya aktivitas peserta didik yang dilandasi kegiatan ilmiah, yaitu: model pembelajaran berbasis masalah, penyelesaian masalah, dan *Inquiry*. Menurut Borrow (Huda, 2013, p. 271) pembelajaran berbasis masalah atau *problem based learning* (PBL) adalah model pembelajaran yang didasarkan pada suatu masalah diperoleh melalui proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran penyelesaian masalah yang sering dikenal *Problem Solving* (PS) adalah model pembelajaran yang mengarah pada pemecahan masalah secara langsung oleh peserta didik (Huda, 2013, p. 275). Meskipun hampir sama dengan *Problem Based Learning* (PBL) akan tetapi *Problem Solving* mengarah kepada model pemecahan masalah dan pendidik memberikan masukan adanya metode

lain untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai dengan mendapatkan solusi.

Disamping model *Problem Based Learning* dan *Problem Solving*, IPS juga dapat dipelajari dengan model *Inquiry*. Dua pendekatan ini merupakan pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan melibatkan peserta didik dalam merumuskan pertanyaan yang mengarahkan untuk melakukan investigasi dalam upaya membangun pengetahuan dan makna baru (Sani, 2014, p. 88).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) mengetahui perbedaan keefektifan antara model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry*; (2) mengetahui perbedaan keefektifan model *Problem Based Learning* dan model *Problem Solving*, (3) mengetahui perbedaan keefektifan model *Problem Based Learning* dan model *Inquiry*; (4) mengetahui perbedaan keefektifan model *Problem Solving* dan model *Inquiry*.

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan perbedaan keefektifan model *problem based learning* (PBL), *problem solving* (PS), dan *Inquiry* dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri Kabupaten Jember bagian Barat. Selain itu, berdasarkan karakteristik model pembelajaran tersebut dapat diperoleh informasi tentang keunggulan dan kelemahan model-model pembelajaran tersebut. Sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pendidik dalam menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materinya. Kemudian hasil penelitian dapat memprediksi kesulitan-kesulitan belajar peserta didik dalam rangka menentukan model pembelajaran yang akan digunakan lebih lanjut serta dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi pendidik dalam menentukan model terkait dengan materi dan waktu yang tersedia agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif jenis eksperimen semu dengan Desain *Posttest-only Control Group Design* yang sudah dimodifikasi sesuai dengan *Quasi-Experimental Research*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2016, tahun ajaran 2015/2016 dan dilakukan di Kabupaten Jember bagian Barat pada kelas VIII di SMPN 1 Semboro, SMPN 3

Tanggul, SMPN 1 Sumberbaru sebagai kelas eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah tiga kelas yang dipilih dari masing-masing sekolah yakni dari Kelas VIII C SMPN 1 Semboro, VIII F SMPN 3 Tanggul, VIII A SMPN 1 Sumberbaru, dengan jumlah 113 peserta didik yang memiliki proporsi berikut.

Tabel 1. Populasi Penelitian

No	Kelas/Sekolah	Jumlah
1	SMP N 1 Semboro	40
2	SMP N 3 Tanggul	37
3	SMP N 1 Sumberbaru	36
	Jumlah	113

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *proportional sampling* (sampel proporsional) yakni pengambilan sampel secara proporsional sehingga semua anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel apabila memiliki kriteria yang telah ditentukan

Berdasarkan distribusi nilai pada persentase kurva standar, peneliti mengambil sampel dengan persentase kurva standar 13,53% dan 34,13% sehingga diperoleh sampel setiap kelas sebesar 23 peserta didik yang diperoleh dengan cara proporsional pada kelas eksperimen sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang sudah ditentukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang dikumpulkan untuk dokumentasikan berupa jumlah peserta didik, nilai yang digunakan sebagai data awal penelitian yaitu nilai Rapot, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, kisi-kisi *posttest*, tes hasil belajar.

Validasi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni validitas rasional, dan validaitas butir soal.

Validitas rasional dalam penelitian ini menggunakan validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*) Berkaitan dengan pertanyaan “sejauh mana item tes mencakup keseluruhan materi atau bahan yang ingin diukur”. Sejauh mana suatu tes memiliki bukti validitas ini ditetapkan menurut analisis rasional terhadap isi tes, yang penilaiannya didasarkan atas pertimbangan subjektif individual. (Mardapi, 2012, p.18). Penentuan

validitas rasional mengacu pada pendapat ahli (*expert judgment*). Dalam penelitian ini validitas rasional digunakan pada instrumen angket jenis kecerdasan, sikap nasionalisme, dan tes hasil belajar dengan mempertimbangkan catatan dan saran dari *expert judgment*.

Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Sehingga uji validitas menggunakan rumus *korelasi biserial* (Arikunto, 2015, p.90-93) berikut.

$$\gamma_{pbi} = \frac{Mp - Mt}{St} \sqrt{\frac{p}{q}}$$

Keterangan:

- γ_{pbi} = koefisien korelasi biserial
 Mp = rerata sekor dari subjek yang menjawab betul dari item yang dicari validitasnya.
 Mt = rerata skor total
 St = standar deviasi dari skor total
 p = proporsi siswa yang menjawab benar
 ($p = \frac{\text{banyak siswa yang benar}}{\text{jumlah seluruh siswa}}$)
 q = proporsi siswa yang menjawab salah
 ($q = 1 - p$)

Setelah memperoleh nilai kemudian dikonsultasikan dengan tabel korelasi *product moment* dengan taraf kepercayaan 95%. Jika lebih besar dari rtabel maka soal tersebut dikatakan valid.

Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau ajeg. Reliabilitas menunjuk kepada keajegan pengukuran. Keajegan suatu hasil tes adalah apabila dengan tes yang sama diberikan kepada kelompok siswa yang berbeda, atau tes yang berbeda diberikan pada kelompok yang sama akan memberikan hasil yang sama. Jadi, berapa kalipun dilakukan tes dengan instrumen yang reliabel akan memberikan data yang sama. Untuk memperoleh reliabilitas soal prestasi belajar digunakan rumus KR-20 (Arikunto, 2015, pp. 100-115) sebagai berikut.

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(\frac{S^2 - \sum pq}{S^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

n = banyaknya butir pertanyaan

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians)

p = proporsi subjek menjawab soal dengan benar

q = proporsi subjek menjawab soal dengan salah

$(q = 1 - p)$

$\sum pq$ = jumlah hasil perkalian antara p dan q

Setelah memperoleh nilai kemudian dikonsultasikan dengan tabel korelasi *product moment* dengan taraf kepercayaan 95%. Jika lebih besar dari r_{tabel} maka soal tersebut dikatakan reliabel.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji asumsi berupa uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Uji prasyarat merupakan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak sehingga langkah selanjutnya tidak menyimpang dari kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang akan diuji normalitasnya pada penelitian ini adalah nilai *posttest* yang diperoleh pada akhir pembelajaran. Nilai tersebut akan diuji dengan menggunakan uji normalitas saphiro wilk menggunakan alat bantu aplikasi analisis data dengan ketentuan kriteria : jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi ($p > 0.05$), maka data berdistribusi normal.

Uji Homogenitas dilakukan untuk menentukan homogen atau tidaknya varians data yang diperoleh. Data yang digunakan untuk uji homogenitas varians hasil *posttest* peserta didik. Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat menggunakan alat bantu aplikasi analisis dengan ketentuan kriteria : jika probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi ($p > 0.05$), maka data homogen.

Pada uji hipotesis digunakan anova 1 arah yang merupakan Jenis Uji Statistika Parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel. Sebelumnya telah dilakukan uji prasyarat (uji normalitas dan

homogenitas) yang memberikan hasil bahwa sampel homogeny dan data setiap kelompok sampel terdistribusi normal. Untuk itu dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan anova 1 arah. Untuk itu dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan anova 1 arah dengan persamaan sebagai berikut.

$$[X] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p Y_{ij}$$

$$[A] = \sum_{j=1}^p \frac{\left(\sum_{i=1}^n Y_{ij} \right)^2}{n}$$

$$[Y] = \frac{\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p Y_{ij} \right)^2}{np}$$

$$[AS] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p Y^2_{ij}$$

$$\begin{aligned} \text{SSTO} &= [AS] - [Y] \\ \text{SSBG} &= [A] - [Y] \\ \text{SSWG} &= [AS] - [A] \end{aligned}$$

Tabel ANAVA untuk rancangan acak lengkap seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Rancangan ANAVA

Source	SS	Df	MS	F	F _{tabel}
Between groups	SSBG	$p-1$	SSBG/ $(p-1)$	MSBG/ MSWG	$F_{(0,05; p-1; p(n-1))}$
Within groups	SSWG	$p(n-1)$	SSWG/ $p(n-1)$	-	-
Total	SSTO	$np-1$	-	-	-

Kriteria pengujian hipotesis pada taraf signifikan 0.05 adalah jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima, sebaliknya jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Nilai F dapat diperoleh dari tabel distributif. Kriteria pengujian hipotesis alternatif (H_a) diterima pada taraf signifikan 0.05 adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, sebaliknya jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_a ditolak (Sugiyono, 2013, p.139).

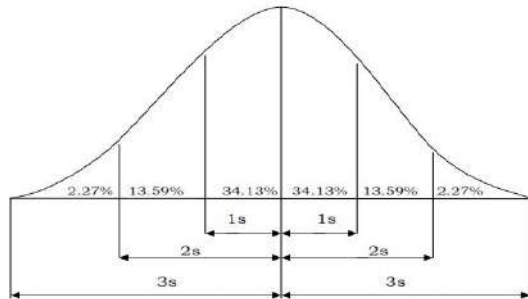
Peneliti juga menggunakan alat bantu analisis untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji anava 1 jalur dengan ketentuan kriteria: jika probabilitas lebih besar daripada taraf signifikansi ($p > 0.05$), maka terpaksa H_0 diterima dan H_a ditolak. Begitu pula apabila probabilitas lebih kecil daripada taraf signifikansi ($p < 0.05$), maka terpaksa H_a ditolak dan H_0 diterima

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi data merupakan gambaran data yang diperoleh untuk mendukung pemba-

hasan hasil penelitian. Secara umum data disajikan setelah mendapatkan *treatment* berupa model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* yang diterapkan pada masing-masing kelompok sampel. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil analisa nilai rapor pada semester sebelumnya. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proportional sampling* (sampel proporsional) yakni pengambilan sampel secara proporsional sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun untuk menentukan sampel dilakukan dengan membuat rentang data nilai peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan kurva normal standar, diambil peserta didik dengan rentang nilai tertentu (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah) untuk dijadikan sampel.



Gambar 1. Kurva Normal Standar

Tabel 3. Distribusi Nilai Rapor Peserta Didik Populasi

No	% Kurva Normal	Nilai A	Nilai B	Nilai C
1	2.7 %	75-77	75-77	76-78
2	13.53%	78-80	78-80	79-81
3	34.13%	81-83	81-83	82-84
4	34.13%	84-86	84-86	85-87
5	13.53%	87-89	87-89	88-90
6	2.7 %	90-92	90-92	91-93

Keterangan:

- A : ASMPN 1 Semboro
- B : BSMPN 3 Tanggul
- C : SMPN 1 Suberbaru

Berdasarkan distribusi nilai pada persentase kurva standar, peneliti mengambil sampel dengan persentase kurva standar 13,53% dan 34,13% sehingga diperoleh sampel setiap kelas sebesar 23 peserta didik untuk dijadikan kelas eksperimen dengan distribusi data seperti Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Data Nilai Rapor Kelompok Sampel

Deskripsi	Treatment		
	PBL	PS	ID
jumlah	1897	1864	1864
rata-rata	82.48	81.04	81.04
standar deviasi	2.87	2.16	2.31
varians data	8.26	4.68	5.32
nilai tertinggi	86	87	87
nilai terendah	78	78	78

Ketiga kelompok sampel kemudian diberikan *treatment* berupa penerapan pendekatan saintifik dengan model *Problem-Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry*. Setelah diberikan *treatment* dilakukan *posttest* atau evaluasi akhir untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Instrument tes hasil belajar berupa soal tertulis dengan 10 soal pilihan ganda. Sebelum tes ini diberikan kepada siswa, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrument tes. Tes pilihan ganda diuji validitas rasional dan validitas butir soal atau validitas item, kemudian soal yang valid diuji reliabilitasnya menggunakan uji KR-20.

Uji validitas butir soal atau validitas item dilakukan terhadap 40 siswa. Sehingga nilai r_{tabel} adalah 0,312. Butir soal dikatakan valid apabila memiliki nilai r lebih besar dari r_{tabel} . Berdasarkan hasil uji validitas, dari 15 soal pilihan ganda yang tersedia ada 10 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas berdasarkan 10 soal yang valid, diperoleh nilai r sebesar 0,76 yang berarti nilai ini lebih besar dari r_{tabel} sehingga instrument soal dikatakan reliabel.

Tabel 5. Validitas Soal Pilihan Ganda

Nomor soal	Nilai r_{hitung}	Keterangan	Jumlah soal	
			Valid	Tidak valid
1	-0.06	Tidak Valid	10	5
2	-0.01	Valid		
3	0.23	Tidak Valid		
4	0.52	Tidak Valid		
5	0.22	Valid		
6	0.24	Valid		
7	0.19	Valid		
8	0.36	Valid		
9	0.39	Valid		
10	0.43	Valid		
11	0.20	Tidak Valid		
12	0.47	Valid		
13	0.43	Valid		
14	0.48	Valid		

15	0.38	Tidak Valid
----	------	-------------

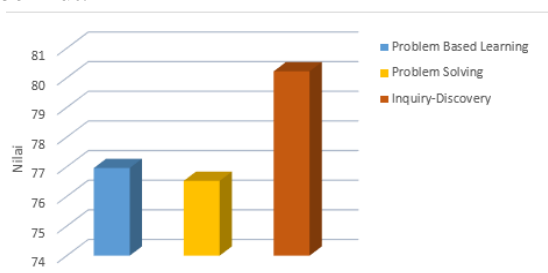
Soal yang sudah valid dan reliabel kemudian digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah diberikan *treatment*. Berdasarkan hasil dari tes ini dapat diketahui keefektifan pembelajaran model *Problem Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry* pada peserta didik setelah diberikan *treatment*.

Hasil dari tes hasil belajar dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 6. Deskripsi Hasil Tes Hasil Belajar (*posttest*)

Deskripsi	PBL	PS	Inquiry
Rata-rata	76.96	76.52	80.22
Standar deviasi	5.17	4.87	5.53
Varians	26.68	23.72	30.63
Skor maksimum ideal	85	85	90
Skor minimum ideal	70	65	70

Dari deskripsi hasil belajar tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Hasil Belajar (*posttest*)

Uji normalitas menggunakan uji Saphiro Wilk dengan bantuan aplikasi pengolahan data. Uji normalitas Saphiro Wilk ini digunakan karena merupakan analisis univariat dengan jumlah sampel pada setiap perlakuan < 30 dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0.05$. Untuk uji normalitas disajikan dalam Table 7.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (*posttest*)

Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
.104	69	.059	.979	69	.315

Berdasarkan Tabel 7, tampak bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 3.15 dan bernilai lebih dari 0,05 sehingga ketiga kelompok sampel memiliki data yang terdistribusi

normal Proses uji normalitas tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Uji homogenitas yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji homogenitas Bartlett karena jumlah kelompok sampel yang diujikan lebih dari 2 kelompok sampel. Dengan taraf signifikansi 5% atau $\alpha = 0.05$. Hasil output dari aplikasi pengolahan data disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar (*posttest*)

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.563	2	66	.217

Berdasarkan Tabel 8, tampak bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0,217 dan bernilai lebih dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa sampel dinyatakan homogen.

Uji asumsi berikutnya adalah uji hipotesis. Pada hipotesis pertama untuk mengidentifikasi perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran *Problem Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry* terhadap hasil belajar peserta didik, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_a =$ Terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry* atau $H_a: \mu_i \neq \mu_j$ dengan $i \neq j$.

Untuk kebutuhan analisis maka dirumuskan hipotesis nihil sebagai berikut: $H_0 =$ Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry* atau $H_0: \mu_{PBL} = \mu_{ps} = \mu_{(I-D)}$

Tabel 9. Hasil Uji Anova Satu Jalur pada Hipotesis 1

Goal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Between Groups	281.420	2	140.710	4.182	0.20
Within Groups	2220.783	66	33.648		
Total	2502.203	68			

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh < 0.05, sehingga H_0 ditolak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning, Problem Solving, dan Inquiry* .

Untuk kebutuhan hipotesis yang kedua, akan dilakukan analisis untuk mengidentifikasi perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan Problem Solving terhadap hasil belajar peserta didik, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha= Terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Problem Solving, atau $H_a: \mu_{PBL} \neq \mu_{ps}$.

Untuk kebutuhan analisis maka dirumuskan hipotesis nihil sebagai berikut:

H0= Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Problem Solving atau $H_0: \mu_{PBL} = \mu_{ps}$

Tabel 10. Hasil Uji Anova Satu Arah pada Hipotesis 2

Goal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Between Groups	11.500	1	11.500	.389	.536
Within Groups	1299.478	44	29.534		
Total	1310.978	45			

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh > 0.05 , sehingga H0 tidak dapat ditolak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Problem Solving.

Untuk kebutuhan hipotesis yang ketiga, akan dilakukan analisis untuk mengidentifikasi perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan Inquiry terhadap hasil belajar peserta didik, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha= Terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Inquiry , atau $H_a: \mu_{PBL} \neq \mu_{(I-D)}$

Untuk kebutuhan analisis maka dirumuskan hipotesis nihil sebagai berikut:

H0= Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Inquiry atau $H_0: \mu_{PBL} = \mu_{(I-D)}$

Tabel 11. Hasil Uji Anova Satu Arah pada Hipotesis 3

Goal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Between Groups	253.565	1	253.565	6.960	.011
Within Groups	1603.043	44	36.433		
Total	1856.609	45			

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh < 0.05 , sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Based Learning dan Inquiry .

Untuk kebutuhan hipotesis yang keempat, akan dilakukan analisis untuk mengidentifikasi perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran Problem Solving dan Inquiry terhadap hasil belajar peserta didik, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha= Terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Solving dan Inquiry , atau $H_a: \mu_{PS} \neq \mu_{(I-D)}$

Untuk kebutuhan analisis maka dirumuskan hipotesis nihil sebagai berikut:

H0 = Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Solving dan Inquiry atau $H_0: \mu_{PS} = \mu_{(I-D)}$

Tabel 12. Hasil Uji Anova Satu Arah pada Hipotesis 4

Goal	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Between Groups	157.065	1	157.065	4.490	.040
Within Groups	1539.043	44	34.978		
Total	1696.109	45			

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh < 0.05 , sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang belajar dengan model Problem Solving dan Inquiry .

Sesuai dengan harapan dari peraturan pemerintah tentang pendidikan, inovasi dalam bidang pembelajaran termasuk pembelajaran IPS di tingkat SMP memang sangat dibutuhkan-

kan. Inovasi dalam proses belajar mengajar salah satunya adalah inovasi yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam penerapan suatu model pembelajaran. Namun, terdapat permasalahan yang signifikan yaitu penerapan suatu model pembelajaran yang ada tidak dapat menjamin keberhasilan dan keefektifan untuk diterapkan pada setiap pokok bahasan. Oleh karena itu perlu dilakukan uji coba eksperimen dengan menggunakan beberapa model pembelajaran.

Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan saintifik model PBL, PS, dan *Inquiry* pada materi pokok pranata sosial sebagai upaya pengendalian sosial pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Semboro, SMP Negeri 3 Tanggul, dan SMP Negeri 1 Sumberbaru. Beberapa hal yang diselidiki dalam penelitian ini diantaranya adalah mendeskripsikan keefektifan dari ketiga model pembelajaran dalam pendekatan saintifik dan menentukan adanya perbedaan keefektifan dari masing-masing model pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Berikut ini akan disampaikan pembahasan dari masalah yang telah diselidiki.

Pertama membahas tentang perbedaan keefektifan pendekatan saintifik model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry*

Salah satu dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini adalah masih rendahnya prestasi belajar peserta didik di SMP Negeri Kabupaten Jember Bagian Barat. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar peserta didik adalah kurangnya variasi dan inovasi pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di kelas masih berpusat pada guru sehingga menyebabkan peserta didik kurang aktif. Untuk itu diperlukan inovasi yang bisa membuat peserta didik merasa tidak bosan sehingga menjadi aktif selama pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi. Pada penelitian ini, model yang digunakan adalah model *Problem Based Learning* (PBL), *Problem Solving* (PS), dan *Inquiry*. Dari ketiga model tersebut tentu memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik inilah yang ingin digali peneliti sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari ketiga model tersebut.

Ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari ketiga model tersebut dianalisis dari hasil *posttest* peserta didik. Nilai *posttest* didapatkan setelah peneliti menerapkan masing-masing model pembelajaran pada kelas-kelas

eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model pembelajaran PBL pada kelas eksperimen di SMPN 1 Semboro, model pembelajaran PS di SMPN 3 Tanggul, dan model pembelajaran *Inquiry* di SMPN 1 Sumberbaru.

Untuk mengetahui perbedaan keefektifan dari ketiga model yang diterapkan dilakukan uji statistik dengan uji *One way anova*. Dalam penelitian ini, terdapat tiga kelompok sampel yang diujikan sehingga uji *One way anova* ini sesuai dalam penggunaannya untuk menguji keefektifan dari model yang diterapkan.

Berdasarkan hasil analisis *One way anova*, diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi. Dengan demikian, berarti hipotesis nol (H_0) penelitian yang berbunyi “tidak terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dengan *Problem Solving*, dan *Inquiry*” ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan keefektifan dari belajar dengan perlakuan model *Problem Based Learning*, *Problem Solving* dan *Inquiry*.

Kedua membahas tentang Perbedaan keefektifan pembelajaran peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dan model *Problem Solving*

Penelitian ini juga menguji perbedaan keefektifan antara model PBL dan PS. Dari kedua model tersebut tentu memiliki karakteristik pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis penyelesaian masalah. Kedua model pembelajaran ini memiliki kemiripan karakteristik yang berbasis pada masalah sebagai objek pembelajaran. Dengan adanya kemiripan karakteristik inilah yang ingin digali peneliti sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari kedua model tersebut.

Ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari kedua model tersebut dianalisis dari hasil *posttest* peserta didik. Nilai *posttest* didapatkan setelah peneliti menerapkan setiap model pembelajaran pada kelas eksperimen dengan perlakuan model pembelajaran *Problem Based Learning* pada kelas eksperimen di SMPN 1 Semboro, model pembelajaran *Problem Solving* di SMPN 3 Tanggul.

Untuk mengetahui perbedaan keefektifan dari kedua model yang diterapkan dilakukan uji statistik dengan uji *One way anova*. Berdasarkan hasil analisis *One way Anova*, diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari

taraf signifikansi yakni $0.536 > 0.05$. Dengan demikian, berarti hipotesis nol (H_0) penelitian yang berbunyi “tidak terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dengan *Problem Solving*” dengan terpaksa diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keefektifan dari belajar dengan model *Problem Based Learning* dengan *Problem Solving* sama.

Ketiga membahas tentang perbedaan keefektifan pembelajaran peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dan model *Inquiry*

Dari kedua pembahasan sebelumnya, peneliti juga menguji perbedaan keefektifan antara model PBL dan *Inquiry*. Dari kedua model tersebut tentu memiliki karakteristik pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis menemukan. Ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari kedua model tersebut dianalisis dari hasil *posttest* peserta didik. Nilai *posttest* didapatkan setelah peneliti menerapkan setiap model pembelajaran pada kelas eksperimen dengan perlakuan pembelajaran model PBL pada kelas eksperimen di SMPN 1 Semboro, pembelajaran model *Inquiry* di SMPN 1 Sumberbaru.

Dengan diketahui terdapat dua kelompok sampel yang diujikan peneliti menggunakan uji *One way anova* untuk menguji keefektifan dari model yang diterapkan. Berdasarkan hasil analisis *One way anova* tersebut diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi yakni $0.011 < 0.05$. Dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H_0) penelitian yang berbunyi “tidak terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang belajar dengan model PBL dan *Inquiry*” ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan keefektifan dari belajar dengan perlakuan model PBL dengan *Inquiry*.

Keempat membahas tentang Perbedaan keefektifan pembelajaran peserta didik yang belajar dengan model *Problem Solving* dan model *Inquiry*

Untuk yang terakhir peneliti juga menguji perbedaan keefektifan antara model PS dan *Inquiry*. Dari kedua model tersebut memiliki perbedaan karakteristik yaitu pembelajaran berbasis pada penyelesaian masalah dan pembelajaran berbasis pada konsep menemukan. Karakteristik inilah yang ingin digali peneliti sehingga dapat diketahui ada atau tidak-

nya perbedaan keefektifan dari kedua model tersebut. Ada atau tidaknya perbedaan keefektifan dari kedua model tersebut dianalisis dari hasil *posttest* peserta didik yang didapatkan setelah peneliti menerapkan perlakuan pada setiap model pembelajaran pada kelas eksperimen dengan perlakuan model pembelajaran PS pada kelas eksperimen di SMPN 3 Tanggul, model pembelajaran *Inquiry* di SMPN 1 Sumberbaru.

Dengan diketahui terdapat dua kelompok sampel yang diujikan peneliti menggunakan uji *One way anova* untuk menguji keefektifan dari model yang diterapkan. Berdasarkan hasil analisis *One way anova* tersebut diperoleh nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi yakni $0.040 < 0.05$. Dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H_0) penelitian yang berbunyi “tidak terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran antara peserta didik yang belajar dengan model PS dan *Inquiry*” ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan keefektifan dari belajar dengan perlakuan model PS dan *Inquiry*.

Secara umum dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model PBL, PS, dan *Inquiry* memiliki perbedaan keefektifan. Akan tetapi dalam hasil analisis yang kedua yaitu mencari perbedaan keefektifan pembelajaran model PBL dan PS diketahui terdapat kesamaan keefektifan hal ini kemungkinan dikarenakan kemiripan karakteristik dari kedua model pembelajaran yakni sama-sama menitikberatkan pada keaktifan peserta didik dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkup materi upaya pranata sosial dalam penanggulangan penyimpangan sosial.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran yang signifikan antara peserta didik yang belajar dengan model *Problem Based Learning* di SMPN 1 Semboro, *Problem Solving* di SMPN 3 Tanggul, dan *Inquiry* di SMPN 1 Sumberbaru, (2) Tidak terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran yang signifikan antara peserta didik SMPN 1 Semboro yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dan Peserta didik SMPN 3

Tanggul yang belajar dengan model *Problem Solving*, (3) Terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran yang signifikan antara peserta didik SMPN 1 Semboro yang belajar dengan model *Problem Based Learning* dan peserta didik SMPN 1 Sumberbaru dengan model pembelajaran *Inquiry*, (4) Terdapat perbedaan keefektifan pembelajaran yang signifikan antara peserta didik SMPN 3 Tanggul yang belajar dengan model *Problem Solving* dan peserta didik SMPN 1 Sumberbaru dengan model pembelajaran *Inquiry*.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mendapatkan perlakuan yang tidak seperti sehingga peserta didik mendapatkan stimulus baru dan mampu memberikan respon baik atas stimulus yang diberikan oleh pendidik, hal ini dapat diketahui dari pernyataan bahwa peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya mendengarkan pendidik dalam menjelaskan materi pembelajaran, akan tetapi juga mengkonstruksi sendiri pemahaman dari apa yang dijelaskan oleh pendidik.

Penelitian ini juga memiliki keterbatasan penelitian hal ini dapat diketahui dengan adanya permasalahan dilapangan seperti wilayah sekolah yang terletak pada pusat keramaian, perbedaan sikap, dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik; Jam pelajaran yang diberikan sekolah untuk peneliti bersifat merata dan beragam dari jam pertama sampai dengan jam terakhir, dimana menurut peneliti cukup mempengaruhi suasana pembelajaran di dalam kelas; Populasi penelitian yang terdiri dari tiga sekolah yang berbeda, sehingga walaupun secara umum dapat dikatakan setara, akan tetapi tiga sekolah yang berbeda tidak akan mungkin setara sepenuhnya, terutama dalam proses pembelajaran pada masing-masing sekolah

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dikritisi dengan keterbatasan penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Pendekatan saintifik model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* melalui penelitian ini telah menunjukkan hasil yang berbeda dalam keefektifan pembelajaran. Pendidik pada pembelajaran IPS disarankan untuk menggunakan pendekatan saintifik sebagai alternatif pendekatan dalam pembelajaran IPS; (2) Pendidik perlu pula memperhatikan kompetensi dasar dan tujuan

pembelajaran untuk memilih dan/atau menelaah pendekatan saintifik model *Problem based learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* sebagai model pembelajaran yang mampu meningkatkan keefektifan pembelajaran IPS; (3) Perlu adanya penelitian lanjutan untuk menguji keefektifan pendekatan saintifik model *Problem Based Learning*, *Problem Solving*, dan *Inquiry* dengan melibatkan aspek lain sebagai kontrolnya, seperti sikap dan keterampilan peserta didik.

Daftar Pustaka

- Abdi, A. (2014). The effect of inquiry-based learning method on students' academic achievement in science course. *Universal Journal of Educational Research*, 2(1).
- Arikunto, S. (2015). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. (2nd Ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Balim, A., G. (2009). The effects of discovery learning on students' success and inquiry learning skills. *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research*, 35.
- Mardapi, D. (2012). *Pengukuran penilaian & evaluasi pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Gok, T & Silay, T. (2010). The effects of problem solving strategies on students' achievement, attitude and motivation. *Lat. Am. J. Phys. Educ.* 4(1).
- Hillman, W. (2003). Learning how to learn: problem based learning. *Australian Journal of Teacher Education*, 28(2).
- Huda, M. (2014). *Model-model pengajaran dan pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, A. (2014). *Pembelajaran tematik terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sani, R. A. (2014). *Pembelajaran saintifik untuk implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful & Aswan. (2010). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.



**PENGUASAAN *CIVIC SKILLS* AKTIVIS BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
(STUDI DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA)**

Yayuk Hidayah *¹, Sunarso¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: yayukhidayah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan, program, hambatan, upaya BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* aktivisnya. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif. Penentuan subjek dengan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara. Teknik keabsahan data teknik triangulasi. Teknik analisis dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian (1) peranan BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* adalah *Partner* kampus, fasilitator, pengabdian, selain itu BEM UNY mengalami dilema terkait kaderisasi dan diversifikasi gerakan. (2) program BEM UNY yang dapat meningkatkan *civic skills*, forum sekretaris kementerian, lembar pemantauan, sekolah kader bangsa, sosialisasi 100 hari kinerja BEM, dialog kebangsaan. (3) hambatan internal upaya meningkatkan *civic skills*, keterbatasan sumber daya manusia, banyaknya program kerja, keuangan. Hambatan eksternal, hal teknis dan perubahan kondisi sosial politik. (4) Upaya internal mengatasi hambatan peningkatan *civic skill*, perekrutan kader secara sistematis, mengutamakan program kerja, menjalin kemitraan. Upaya eksternal pengaktifan papan pengumuman, rapat kementerian secara rutin, pembacaan situasi sosial.

Kata kunci: *civic skills, BEM UNY*

***THE MASTERY OF CIVIC SKILLS OF STUDENT EXECUTIVE BOARD ACTIVISTS
(A STUDY IN STATE UNIVERSITY OF YOGYAKARTA),***

Abstract

This study aims to describe the role, program, obstacles, BEM UNY efforts in improving the skills of civic activists. Using qualitative research approaches. Determining the subject with purposive sampling. Data collection techniques of observation, documentation, interviews. Technique authenticity of data triangulation technique. Mechanical analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study (1) UNY BEM role in improving the civic skills are Partner campus, facilitator, devotion, besides UNY BEM has a dilemma related to the regeneration and diversification of movement. (2) UNY BEM program to improve civic skills, forum secretary ministry, monitoring sheets, school cadre nation, socialization 100 days performance of BEM, national dialogue. (3) internal barriers efforts to improve civic skills, limited human resources, the number of work programs, finances. External barriers, technical issues and changes in political and social conditions. (4) Efforts to overcome internal barriers to increase civic skills, recruitment of cadres systematically, prioritize work program, a partnership. Efforts to external activation bulletin boards, regular ministerial meetings, reading social situations.

Keywords: *civic skills, BEM UNY*

Pendahuluan

Status mahasiswa merupakan status yang disandang oleh calon intelektual yang sedang menempuh ilmu di perguruan tinggi, universitas, institut, atau akademi yang mempunyai fungsi dan peran. Mahasiswa mengembangkan diri di bidang keilmuan yang ditekuni sehingga memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab intelektual. Mahasiswa secara umur dan psikologis dapat dikategorikan sebagai tahapan menuju dewasa, hal ini disampaikan oleh Pudjiwati bahwa "mahasiswa berusia antara 18-30 tahun. Dalam kerangka psikologi perkembangan, usia mahasiswa merupakan fase peralihan antara fase remaja akhir menuju dewasa awal". (Suyasa & Leny, 2006, p. 8). Dalam negara berkembang mahasiswa mempunyai peran yang aktif pada posisi sentral di dalam perubahan sosial-politik, sehingga para ahli tidak mengabaikan fungsi mereka dalam sistem sosial politik baik di negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia. Mahasiswa sebagai bagian dari tatanan masyarakat akan secara aktif terlibat dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab 1 Pasal 1 ayat 15 di sebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi (Republik Indonesia., 2012, p. 5).

Aktivitas mahasiswa di perguruan tinggi selain kegiatan pembelajaran di ruang kelas, juga terdapat aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa yang membentuk kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi tempat untuk mengembangkan fungsi dan perannya sebagai mahasiswa, seperti pengembangan personal intelektual yang berguna nantinya untuk terjun ke masyarakat. Terdapat dua jenis organisasi kemahasiswaan, yaitu organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan antar-perguruan tinggi.

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah para mahasiswa untuk berproses baik dalam pembelajaran dan pendidikan yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan secara formal dan non formal. Dalam sebuah organisasi banyak kegiatan yang harus dilakukan dengan melibatkan anggota organisasi. Organisasi yang aktif dan baik akan melatih para anggotanya dalam hal akademis maupun

nonakademis. Misalnya, pelatihan membuat karya tulis, membuat penelitian yang bekerja sama dengan dosen atau pihak kampus, *training* kepemimpinan bagi anggota dan calon anggota, dan membuat kegiatan yang membutuhkan kepanitiaan maka akan melatih jiwa kepemimpinan anggota organisasi. Dalam berorganisasi juga dilatih untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain, selain itu akan dilatih juga untuk menyusun strategi dan bisa mengatur waktu, diri sendiri dan orang lain. Sehingga organisasi mahasiswa dapat membentuk keterampilan seorang mahasiswa menjadi lebih produktif dengan partisipasinya dalam kepengurusan.

Organisasi kemahasiswaan memiliki banyak peranan penting di kampus. Pengalaman mengajarkan banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan di kampus, masyarakat, bangsa dan bernegara yang mengalami perubahan karena peran serta dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa tersebut. Istilah mahasiswa sebagai "*the agent of change*", merupakan benar adanya karena banyak perubahan yang terjadi karena peran mahasiswa. Di kampus, organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengeksplor berbagai kemampuan diri, memperluas wawasan, serta integritas kepribadian.

Peran serta organisasi di kampus yang lainnya adalah sebagai sarana bagi pihak kampus untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang suatu saat dibutuhkan oleh kampus. Koordinasi yang baik dengan organisasi kampus akan lebih mudah merekrut sumberdaya manusia yang bermanfaat dibanding menyeleksi satu per-satu mahasiswa. Banyak hal yang didapat dengan adanya organisasi mahasiswa yang tidak ada dalam perkuliahan. Dengan berorganisasi mahasiswa terlatih jiwa kepemimpinannya untuk mengatur diri sendiri, orang lain, dan organisasi tersebut. Dalam sebuah organisasi tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen yaitu, "*planning, organizing, actuating, controlling*".

Secara umum, mahasiswa dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu mahasiswa yang aktif pada organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa apatis terhadap organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa yang aktif pada organisasi kemahasiswaan merupakan mahasiswa yang berpartisipasi secara penuh dengan menjadi pengurus atau anggota di dalam organisasi kemahasiswaan, sedangkan mahasiswa yang apa-

tis terhadap organisasi kemahasiswaan merupakan mahasiswa yang menganggap bahwa organisasi kemahasiswaan hanyalah mengganggu kegiatan akademik dan lebih baik untuk tidak aktif di organisasi. Hal ini memang merupakan masalah yang sudah sangat lama terjadi karena tidak lepas juga dari anggapan bahwa organisasi kemahasiswaan hanyalah yang melakukan demonstrasi, kericuhan. Selain itu anggapan negatif yang sering muncul seperti adalah aktivis kampus yang cenderung membuat mahasiswa lama dalam perkuliahan dan berakibat *drop-out*.

Sebenarnya banyak ilmu yang didapat dengan berorganisasi. Setiap individu yang ada dalam organisasi memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Dalam berorganisasi akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, baik itu dengan yang lebih muda, sebaya dan yang lebih tua. Tidak hanya itu, dalam berorganisasi juga bisa mendapatkan pengalaman bagaimana berbicara dan menghadapi orang-orang penting, misalnya berkomunikasi dengan dekanat, dan rektorat. Begitu juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang langsung terjun ke masyarakat, akan terlatih bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam hal pengembangan potensi pemuda, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yaitu:

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Republik Indonesia., 2009, p. 4)

Kemampuan *soft skills* yang di dapat mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan salah satunya adalah kemampuan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi ketrampilan intelektual dan keterampilan partisipasi warga Negara yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*).

Peran organisasi kemahasiswaan sangatlah penting karena membekali mahasiswa dengan *soft skills* yang tidak ada di perkuliahan. Senada dengan hal itu, Billings, & Terkla, mengungkapkan bahwa budaya yang ada di kampus memiliki dampak positif pada kegiatan pada keterlibatan masyarakat.

"...A structural equation model was developed, and findings revealed that the campus environment had a significant positive impact on civic values and beliefs and a positive indirect effect on civic engagement activities..." (Billings & Terkla, 2011, p. 1)

Branson mengidentifikasi tiga komponen penting dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak-watak kewarganegaraan). (Branson, 1999, pp. 4-6) Komponen pertama, *civic knowledge* "berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara" (Branson, 1999, pp. 8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kedua, *civic skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan).

Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Thomas Jefferson, penulis *Declaration of Independence* dan presiden Amerika Serikat ketiga, mengungkapkan bahwa pengetahuan, keterampilan (*skills*) dan perilaku warganegara yang demokratis tidak muncul secara alamiah, tetapi harus diajarkan secara sadar melalui sekolah kepada setiap generasi (Adnan, 2005, p. 67)

Senada dengan pendapat tersebut Charles & Patrick (1999, p. 1) mengatakan bahwa “untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi sekolah harus mendidik generasi muda (*young citizen*) memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi”.

Dengan demikian, hal yang terpenting dari warga negara adalah pertama-tama memiliki pengetahuan kewarganegaraan (politik, hukum, dan moral) lalu memiliki keterampilan intelektual dan akhirnya akan membentuk suatu watak atau karakter yang menjadi sikap dan kebiasaan. Sikap dan kebiasaan dari keterampilan partisipasi dan keterampilan intelektual warga negara tersebut misalnya kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan lain-lain. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan dalam perguruan tinggi merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk berproses dalam pembelajaran yang diperoleh melalui kegiatan yang dilaksanakan secara non formal.

Pada dasarnya organisasi kemahasiswaan terbagi menjadi 2 (dua) kelembagaan, yaitu lembaga legislatif yang bertugas sebagai pengawas jalannya kerja-kerja organisasi (fungsi kontrol) dan lembaga eksekutif yang menjalankan seluruh kerja-kerja organisasi. Peranan BEM merupakan pusat sentral dan pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan di kalangan masrakat mahasiswa universitas. BEM universitas harus mengambil keputusan dan kebijakan dalam tatanan mahasiswa. BEM merupakan ujung tombak dalam menjalankan tata pemerintahan di kalangan mahasiswa dan biasa menyampaikan aspirasi baik berupa kesejahteraan, keamanan baik secara lisan maupun dalam tulisan. BEM menaungi element yang berada di universitas dana memiliki jalur koordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Bagi mahasiswa penjalanan fungsi BEM merupakan praktik-praktik dari *civic skills* pada tahapan awal sebelum nantinya lulus dan hidup bermasyarakat. Melalui BEM akan ada latihan sikap kritis dan peka terhadap lingkungan. Banyaknya sumber dalam mendapatkan informasi di BEM merupakan salah satu keunggulan yang ada di BEM, karena struktur terbagi menjadi beberapa bagian sesuai ranah kerja sehingga segala kegiatan dalam pencapaian tujuan akan sesuai karena melalui beberapa tahapan. Mahasiswa yang aktif di BEM terlatih dengan sikap kritis dalam penyampaian aspirasi dan memberikan solusi yang *reliable*,

realistic, dan *argumentative*. Sebagai agen perubahan, setidaknya dalam tatanan BEM mampu melakukan perubahan minimal dalam dua (2) tahap. Yaitu pertama perubahan untuk yang sulit diubah, dalam hal ini adalah diri pribadi. Ke dua perubahan yang dapat kita lakukan melalui organisasi sehingga memberi dampak bagi mahasiswa lain, dan juga masyarakat luar.

BEM dalam menjalankan perannya memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai koordinasi yang menjadi penghubung komunikasi antara rektorat dengan mahasiswa atau UKM. Lalu peran citra universitas di kancah nasional maupun lokal baik dalam kegiatan kemahasiswaan bersifat akademik maupun non akademik dan fungsi bantuan administrasi misalnya sebagai sarana menampung aspirasi mahasiswa, yang selanjutnya ditindak lanjuti sesuai prosedur.

Kepengurusan di BEM UNY, terdiri dari berbagai mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan, seperti dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Seni dan Bahasa namun, belum semua mahasiswa menyadari pentingnya untuk tetap konsisten di BEM UNY. Pemanfaatan Sarana melalui BEM sebagai fungsi administratif pun belum di sadari mahasiswa secara umum, sehingga masih ada mahasiswa yang mengkotak-kotakan diri antara mahasiswa yang aktif dan biasa saja. Sejatinya mahasiswa yang mengikuti BEM atau berkontribusi akan dapat menyalurkan ilmunya dan mengembangkan dirinya baik secara akademik maupun non akademik.

Proses belajar di kampus pada dasarnya hanya memberikan ilmu dalam bidang akademik saja bagi mahasiswa. Disini mahasiswa perlu mendapatkan pembelajaran di luar dari akademik yang menunjang kebutuhan mahasiswa baik berupa kedisiplinan, pertanggungjawaban, jiwa sosial hingga bekerjasama dalam satu *team*. Hal-hal tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dan dengan dunia kerja nantinya. Salah satu cara mendapatkan kemampuan itu adalah dengan mengikuti organisasi. Hal-hal yang dapat dipelajari misalnya BEM sebagai lembaga eksekutif kampus mengadakan *event*, panitia bagian acara akan menghubungi narasumber untuk dijadikan pembicara dan bagian acara akan berhu-

bugan langsung dengan pihak pembicaraan. Disaat itu, terjadi negosiasi antara panitia acara mengenai biaya pembayaran pembicara, tanpa adanya koordinasi dengan bendahara dan panitia lain. Semenantara keuangan yang ada tidak mencukupi untuk membiayai tersebut. Sehingga terjadi konflik antara panitia acara dengan bendahara dan pihak lain. Dalam situasi ini, panitia terdapat proses evaluasi dan koordinasi demi terlaksananya *event*. Permasalahan seperti ini bukan hanya klasik apologetik seperti buruknya kualitas sumber daya di BEM, kurangnya partisipasi, atau banyaknya jumlah panitia tetapi permasalahan ini bersifat sistemik dan mengakar.

Di sisi lain, sebagai mahasiswa, yang senantiasa bersikap aktif dan kritis, melalui BEM, sejatinya terdapat pembelajaran tentang berdemokrasi, dan dari sinilah tahapan keterampilan warga negara terjadi. Namun sering kali, keberadaan BEM belum dapat tumbuh dan berkembang menjadi *social society* dan memiliki *bargaining positioning* dalam merespon mensikapi kebijakan dan mengakomodir aspirasi dan menjadi juru bicara mahasiswa. Tidak jarang juga di temui banyak yang menyatakan diri sebagai “aktivis kampus”, tetapi justru mengarah ke pembenaran terhadap analisa negatif dan cenderung “arogan”. Hal seperti ini jika tidak segera di analisa dengan tetap, maka keberadaan BEM hanya akan menjadi simbol dari eksistensitas mahasiswa di kampus.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para para aktivis BEM UNY (November 2015) di sekretariat BEM UNY menunjukkan bahwa *civic skill* aktivis BEM UNY berpeluang untuk semakin berkembang seiring dengan penjalanan program-program dari setiap bidang, selain itu pola berfikir, bertindak, aktivis BEM UNY yang sesuai dengan tatanan nilai sosial mengarah pada upaya pengembangan kemampuan bakat dan minat, maka dapat disimpulkan bahwa melalui BEM UNY, aktivis berkesempatan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan perubahan yang didasari dengan ilmu pengetahuan.

Civic skills merupakan salah satu komponen dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang berkesinambungan dengan tiga fungsi pokok Kajian Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana pengembangan warganegara yang demokratis yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intel-*

legence), membina tanggung jawab warganegara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*). Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intelektual skills* (keterampilan intelektual) dan *participation skills* (keterampilan partisipasi).

Kirlin (2002, pp. 54-55) dalam “*Civic Skills Building: The Missing Component in Service Programs?*” menyatakan “civic skills terdiri dari cognitive and participatory skills disamping adanya civic knowledge”. Antara civic skills terutama cognitive skills and civic knowledge tidak bisa dipisahkan sebagaimana dikemukakan bahwa Branson (1999, p. 50) bahwa “*Intellectual skills in civics and government are inseparable from content*”. Selain itu, The National Standards for Civics and Government and the Civics Framework for the 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP) mengelompokkan *civic skills* categorize these skills as identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking, and defending positions on public issues. (Branson, 1998, p. 1) pengkategorian ini didasarkan atas penelusurannya dari berbagai pandangan para ahli sebelumnya mengenai *civic skills*. Amadeo, Purta, Barber 2004, p. 1) memberikan contoh tentang penjabaran *civic skills* yang terdiri atas keterampilan berpikir (aspek kognitif, intelektual) disebut dengan “*intellectual civic skills, cognitive civic skills* atau *civic thinking skill* dan keterampilan dalam hubungannya dengan kemampuan berpartisipasi terlibat dalam kebijakan publik disebut *participatory skills* atau *civic participation skills*”.

Salah satu cara yang dapat melatih *civic skills* proses penguasaan *civic skills* bagi mahasiswa adalah melalui keikutsertaannya dalam organisasi kampus. Hasil penelitian Kirlin *The Role of Civic Skills in Fostering Civic Engagement* menemukan bahwa ada keterkaitan antara program kurikuler “*youth development*” programs dalam partisipasi masyarakat. (Kirlin, 2003, p. 1). Selanjutnya hasil penelitian Foubert & Grainger *Effects of Involvement in Clubs and Organizations on the Psychosocial Development of First-Year and Senior College Students* memberikan pe-

mahaman bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan psikososial, terutama dalam membangun dan memperjelas tujuan, perencanaan masa depan, manajemen hidup, dan budaya partisipasi (Foubert & Grainger, 2006, p.17).

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. (1) peranan BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* para aktivisnya, (2) program BEM UNY yang dapat meningkatkan *civic skills* para aktivisnya, (3) hambatan dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY, dan (4) upaya BEM UNY mengatasi hambatan dalam meningkatkan *civic skills*?

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) untuk mengetahui peranan BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* para aktivisnya, (2) untuk mengetahui program BEM UNY yang dapat meningkatkan *civic skills* para aktivisnya. (3) untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY, (4) Untuk mengetahui upaya BEM UNY mengatasi hambatan dalam meningkatkan *civic skills*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan penguasaan *civic skills* aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang beralamat di Jl. Colombo No.1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang di tujukan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (BEM REMA UNY) lantai 1 Gedung *Student Centre* dengan *Setting* tempat di dalam dan luar ruangan, Penelitian dilaksanakan pada Desember 2015 – Maret 2016 diawali dengan kegiatan prapenelitian pada bulan November 2015, kemudian dilakukan dengan penyusunan proposal, seminar dan revisi proposal selama 1 (satu) bulan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, benda, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Objek dalam penelitian ini berupa “*social situation*” yang menurut Spradly *social situation* atau situasi social yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan akti-

vitas (*activity*)” (Sugiyono, 2014, p. 49). Maka dari itu, objek penelitian dalam penelitian ini berupa gagasan/pikiran, pengalaman, kebijakan yang berlaku, tempat, aktivis BEM UNY dalam penguasaan *civic skills*. Penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian merupakan narasumber, partisipan dan informan.

Penelitian kualitatif, tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu. Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian merupakan narasumber, partisipan dan informan. Penentuan sumber data penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan subyek yang mengetahui permasalahan penelitian dengan kriteria (1) mereka yang terlibat aktif di dalam BEM UNY, (2) mereka yang pernah aktif di BEM UNY, (3) mereka yang terlibat interaksi dengan BEM UNY, (4) mereka yang berperan penting di birokrasi dan berpengaruh terhadap BEM UNY.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada sumber data untuk dijawabnya. Dokumentasi dengan pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen, di antaranya adalah sejarah BEM UNY, struktur BEM UNY, tugas pokok dan fungsi BEM UNY, dokumen, sarana dan prasarana yang dimiliki BEM UNY serta dokumen lainnya yang relevan dengan fokus penelitian. Observasi dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi yang terjadi selama di lapangan, baik berupa perilaku dan kondisi fisik selama berlangsungnya penelitian

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, maka dapat di sajikan hasil dan pembahasan (1) peranan BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* para aktivis berdasarkan hasil penelitian terdapat dalam beberapa aspek, meliputi keterampilan intelektual yang secara bertahap mengalami peningkatan dengan adanya keluasan wawasan, berpikir kritis, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan dalam menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan warga

Negara. BEM UNY mempunyai peranan yang dapat dimanfaatkan aktivis BEM UNY, sebagai penghantar atau katalisator pengembangan diri mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil rektor III UNY terungkap bahwa BEM sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang mempunyai peranan penting bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan baik BEM atau UKM di UNY berperan sebagai *partner* dari UNY untuk menjangkau potensi mahasiswa dan sebagai wadah untuk mahasiswa dalam bereksplorasi.

Selain terdapat peranan BEM UNY dalam peningkatan *civic skills* adalah sebagai *Partner UNY* yakni sebagai fasilitator yang berfungsi mempermudah penjangkauan aspirasi dalam rangka pemecahan masalah. Peranan selanjutnya adalah pengabdian, BEM UNY bertanggung jawab menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Terakhir adalah peranan BEM UNY dalam fungsi pengkaderan yaitu untuk melahirkan kader-kader yang mandiri dalam berpikir, bersikap, maupun dalam bertindak.

Peranan BEM UNY dalam penguasaan *civic skills* aktivis BEM UNY berkembang baik dalam ranah partisipasi nyata dan tidak nyata. Peningkatan keterampilan partisipasi aktivis BEM UNY meliputi keikutsertaan secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program kerja yang telah ditentukan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Partisipasi nyata adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar pencapaian kebutuhan tujuan. Partisipasi nyata ini adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan yang dapat menunjang keberhasilan program. Sedangkan partisipasi tidak nyata adalah partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota BEM UNY. Partisipasi sumbangan ide adalah buah pikiran konstruktif untuk menyusun program atau memperlancar pelaksanaan program untuk mewujudkan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan para aktivis BEM UNY. Sementara diranah intelektual warga Negara peranan BEM UNY dalam penguasaannya adalah BEM UNY diibaratkan sebagai bentuk pemerintahan tingkat universitas yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa UNY secara umum, subjek kerja BEM UNY merupakan maha-

siswa UNY dan BEM UNY merupakan pengembangan dari aspirasi mahasiswa UNY. Sementara Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) seperti partai politik dan UKM sebagai BUMN yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan ketata negaraan. Disinilah titik peran BEM UNY dalam penguasaan *civic skills* yakni secara bertahap melatih aktivis untuk menguasai *civic skills* melalui miniatur Indonesia.

Disisi lain menjadi catatan penting dalam penelitian ini adalah BEM UNY mengalami dilema dalam hal kaderisasi dan diversifikasi gerakan, hal ini dikarenakan adanya homogenitas pengaruh pada BEM UNY sehingga menjadikan aktivis BEM yang ada di UNY tidak heterogen dalam hal penentuan strategi, argumen dan transfer nilai kepada penerus yang akan datang. Ketidak heterogenan gerakan ini mengakibatkan kekecewaan pada sistem kaderisasi yang berjalan di BEM UNY yaitu masih adanya fenomena pragmatis dan berbernuansa kepentingan beberapa pihak yang ingin mempertahankan integritasnya, sementara disisi lain BEM merupakan titik temu seluruh aktivis gerakan mahasiswa dari berbagai latar belakang gerakan mahasiswa. (2) terdapat program kerja BEM UNY yang dapat meningkatkan *civic skills* aktivisnya. Program kerja tersebut berasal dari *Grand design* dari pimpinan BEM UNY yang kemudian menjadi arahan dari kerja-kerja kementerian untuk menentukan program kerja di tiap kementerian. Berdasarkan hasil wawancara terhadap presiden mahasiswa BEM UNY 2015, terungkap bahwa BEM UNY 2015 memiliki *grand design* sebagai arahan dari kerja-kerja kementerian. Kementerian sekretaris kabinet dalam *Grand design* berfungsi sebagai tata kelola administrasi lembaga, rumah tangga, dan personalia memiliki program kerja yang dapat meningkatkan *civic skills* yaitu forum sekretaris kementerian, lembar pemantauan pengurus. Forum sekretaris kementerian merupakan forum seluruh sekretaris kementerian untuk berkumpul dan menentukan resolusi untuk program kerja. Sekretaris merupakan asisten pimpinan yang memiliki keahlian mengurus, menerima tanggung jawab tanpa diarahkan atau diawasi, berinisiatif dan penuh pertimbangan, serta mengambil keputusan sesuai dengan ruang lingkup wewenang tugasnya. Dengan demikian, maka forum ini merupakan proses mengelola dan mengatur segala sesuatu yang ber-

hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan pimpinan dalam rangka kelancaran BEM UNY. Sementara itu lembar pemantauan pengurus melatih disiplin, pengendalian diri.

Kementerian keuangan dalam *Grand design* berfungsi sebagai pengatur keuangan BEM UNY. Kementerian keuangan memiliki program kerja yang dapat meningkatkan *civic skills* karena dalam program kerja kementerian keuangan transparansi merupakan hal yang diutamakan, sehingga para aktivis dilatih untuk bertanggung jawab. Program kerja tersebut antara lain kantin kejujuran sederhana di dalam sekretariat. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dalam *Grand design* berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan kaderisasi, *open recruitment*, pembinaan dan pengkaryaan. Program kerja kementerian PSDM yang dapat meningkatkan *civic skills* adalah sekolah kader bangsa. Program kerja sekolah kader bangsa merupakan tahapan awal dalam menyiapkan para pemimpin dimasa depan, dalam program kerja ini akan terlatih jiwa kepemimpinan yang merupakan salah satu ranah intelektual, hal ini sesuai dengan pendapat Priambodo bahwa: mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya yang memegang jabatan sebagai pemimpin, cenderung mempunyai wawasan yang luas tentang perkembangan dunia luar maupun tentang hal-hal yang terjadi di seputar kampus (Suyasa & Leny, 2006, p.8).

Sekolah kader bangsa memberikan karakter yang harus dimiliki aktivis sebagai awal memasuki dunia kampus sehingga mampu menyikapi fenomena yang ada dan mampu beradaptasi lebih tepat, materi dalam sekolah kader adalah kepemimpinan, *public speaking*, problematika bangsa kontemporer. Sekolah kader bangsa diharapkan akan melahirkan kader yang menentukan keberhasilan pembangunan sebagaimana pernyataan Bass secara tersirat menjelaskan bahwa ada hubungan antara berkontribusi organisasi terhadap kepemimpinan di masa mendatang

...The investigation of transformational leadership has been the confirmation of the utility of transformational leadership for increasing organizational satisfaction, commitment, and effectiveness, To do this, the meaning of transformational and transactional leadership and the Full Range of Leadership will be discussed and how the components of transformational and tran-

sactional leadership contribute to learning organization will be examined... (Bass, 2000, p. 2)

Kementerian dalam negeri BEM UNY dalam *Grand design* berfungsi berfungsi sebagai jaringan internal kampus. BEM sebagai organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat Universitas selain wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi juga menjadi jembatan antara mahasiswa dan kampus. Kementerian dalam negeri BEM UNY bertanggung jawab dalam pernyataan sikap terhadap isu-isu kontemporer baik melalui aksi maupun propaganda di dalam kampus, membangun komunikasi dengan lembaga, dan memberikan kephahaman pentingnya berpolitik bagi seluruh mahasiswa UNY. Program kerja yang dapat meningkatkan *civic skills* aktivisnya adalah sosialisasi 100 hari kinerja BEM UNY. Peningkatan *civic skills* dari progam sosialisasi 100 hari kinerja BEM UNY yaitu sikap kritis dan bertanggung jawab. Berbagai kegiatan memungkinkan berpikir kritis, mengutarakan pendapat, berbicara di depan umum, melatih kepedulian pada lingkungan sekitar dapat terlatih di sini karena sosialisasi dilaksanakan di sekitar kampus UNY dan bertujuan agar seluruh mahasiswa UNY mengetahui program kerja BEM UNY selama 100 hari yang sudah terlaksana. Selain program kerja sosialisasi 100 hari BEM UNY, program lain yang dapat melatih penguasaan *civic skills* adalah MOU (musyawarah ormawa UNY). MOU merupakan forum seluruh ormawa UNY bertemu dan berdiskusi untuk suatu tujuan. Dalam forum ini, aktivis dapat terlatih dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah mencari solusi yang terbaik dengan pengambilan keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. MOU dapat juga melatih dalam mengungkapkan pendapat, memaknai keadilan dari suatu keputusan, karena setiap keputusan dalam MOU memiliki nilai kesepakatan dan nilai ini tidak ada paksaan. Kesepakatan dari MOU yang telah disetujui bersama anggota MOU bertanggungjawab dalam melaksanakannya. Selain itu, dalam MOU aktivis dapat bertemu dengan berbagai karakter yang berbeda sehingga aktivis akan belajar untuk menstabilkan antar sesama.

Kementerian luar negeri BEM UNY dalam *Grand design* berfungsi sebagai jaringan eksternal kampus mencakup membangun dan

menjalin hubungan baik antar kampus. Dunia kampus dikenal sebagai miniatur dari sebuah Negara maka kementerian luar negeri BEM UNY sebagai pintu penghubung ke dunia luar menjadi pendamping bagi kementerian lain dalam rangka pengawalan isu-isu yang berkaitan dengan sosial, politik, hukum. Program kerja yang dapat meningkatkan *civic skill* adalah diskusi FBD (forum BEM DIY) untuk persiapan HARDIKNAS. Program kerja diskusi FBD mampu membangun kebiasaan berpikir kritis dalam menyikapi berbagai gejala kehidupan yang terjadi di lingkungan. Selain itu, kemampuan dalam berkomunikasi yang sering dilakukan di dalam forum kegiatan BEM, dapat melatih pola komunikasi dan alur penyampaian argumen terhadap berbagai karakter orang dari latar belakang lintas budaya. Harper berpendapat

“...the acquisition of cross-cultural communication skills, the development of care for other disenfranchised groups, and the pursuit of social justice via leadership and student organization membership” (Harper & Quayle, 2007, p. 1).

Kementerian kesejahteraan mahasiswa dalam *grand design* BEM UNY mempunyai tugas advokasi dan layanan kesejahteraan mahasiswa. Program kerja yang dapat meningkatkan *civic skills* aktivis adalah NGOREKSI (ngobrol bareng birokrasi). Dalam program kerja NGOREKSI aktivis akan memiliki keluwesan dan kemampuan penyesuaian untuk menghadapi pribadi yang berbeda satu sama lain selain itu keterampilan memimpin dan menjadi fasilitator juga akan mengembangkan sikap memimpin, mengendalikan, mengambil tanggung jawab, terhadap situasi di sekitar yang akan mengasah kemampuan berempati. N, Eisenberg menjelaskan bahwa “sosialisasi merupakan suatu proses anggota masyarakat mempelajari norma-norma dan nilai-nilai sosial dimana individu menjadi anggota masyarakat atau dalam suatu organisasi.” (Eisenberg & Spinrad, 2004, p. 9)

Kementerian kajian, riset dan politik dalam *grand design* mempunyai tugas mengkaji, mengadakan riset dan kontrol kebijakan publik. Kementerian kajian, riset dan politik dalam melaksanakan programnya didominasi untuk melakukan riset, kajian dalam isu tertentu. Dengan demikian, maka wawasan kebangsaan meliputi ideologi, politik para

aktivis secara bertahap akan meningkat. Program kerja yang dapat meningkatkan *civic skills* aktivis adalah dialog kebangsaan, diskusi sospol se-DIY.

Program dialog kebangsaan berusaha untuk menghadirkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam setiap perubahan tatanan kenegaraan. Hal ini merupakan indikator tatanan kenegaraan yang demokratis, karena hubungan antara mahasiswa dengan rakyat terlihat pada fungsinya sebagai *social control*. Dalam perjalanan fungsi ini, mahasiswa selain di sibukan dengan kegiatan akademik, juga terdapat kegiatan berkumpul dalam satu visi misi dalam sebuah organisasi kemahasiswaan khususnya pada BEM.

Keterampilan intelektual kewarganegaraan dalam BEM secara bertahap bertingkat. Keterampilan intelektual kewarganegaraan dalam BEM adalah kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan dengan lingkungan serta mempresentasikan konsep yang meliputi, deskripsi, klasifikasi, definisi, sebab akibat, proses, analisis, dan pemecahan masalah. Dalam peningkatan kemampuan intelektual bukan hanya sekedar mentransfer pengalaman intelektual dalam ruang lingkup mengevaluasi dan memaparkan informasi, tetapi juga internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Program kerja diskusi sospol se-DIY melatih aktivis untuk melatih keterampilan intelektual antara lain mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik.

Dalam kehidupan sehari-hari, warga Negara bersinggungan langsung dengan kehidupan politik. Diskusi sospol se-DIY berlatar belakang dari pentingnya sosialisasi politik. Kehidupan politik telah menghasilkan variasi pendapat, tentang perilaku politik. Seringkali warga Negara hanya melihat perilaku tersebut, oleh karena itu sosialisasi politik merupakan salah satu yang harus dijalankan. Sosialisasi politik memiliki fungsi untuk menetapkan dan memelihara sistem politik, proses ini dilakukan untuk mendapatkan orientasi politik individu maupun masyarakat secara umum yang berkaitan dengan partisipasi politik.

Keterampilan warga negara (*Civic skill*) dapat membuat seseorang mengidentifikasi atau memberi makna yang berarti pada sesuatu seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan

minoritas. *The National Standards of Civic and Government dan The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEPP)* membuat kategori mengenai kecakapan intelektual yaitu “*identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking, and defending positions on publik issues*” (Margaret, 1999, p. 8). Sementara Kecakapan intelektual merupakan kemampuan untuk mendeskripsikan dengan jelas kecenderungan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masyarakat yang demokratis berpartisipasi merupakan komponen yang berpengaruh untuk mempraktikkan ide tentang demokrasi. (Budiardjo, 1996, p. 185) menyatakan “dalam negar-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik”. Dengan demikian pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi menunjukkan warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut.

Hambatan dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY ada dua faktor, yaitu hambatan internal dan eksternal. Penguasaan *civic skills* aktivis BEM UNY merupakan proses yang berkelanjutan dan terjadi secara terus-menerus. Namun dalam kenyataannya sering muncul permasalahan atau hambatan, Hambatan tersebut dapat berasal dari dalam diri aktivis sendiri maupun dari luar. Hambatan tersebut mempersulit peningkatan *civic skills* aktivis BEM UNY secara maksimal. Hambatan internal BEM UNY merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi peningkatan *civic skills* aktivis. Faktor internal BEM UNY mempengaruhi peningkatan *civic skills* meliputi keterbatasan sumber daya manusia, banyaknya program kerja, dan keuangan. Berdasarkan wawancara terhadap presiden mahasiswa Haris Fadhillah terungkap bahwa terdapat hambatan selama ia aktif di BEM UNY 2015 adalah dalam hal koordinasi internal, hal ini disebabkan karena ada beberapa dari pengurus BEM UNY 2015 yang juga aktif dalam organisasi lain. Senada dengan Haris, saat di wawancarai mengenai hambatan yang muncul dalam peningkatan *civic skills* Isman Wiratmati wakil presiden mahasiswa BEM UNY 2015. Hasil pengamatan kepada menteri BEM REMA UNY menunjukkan bahwa terdapat banyak program kerja yang diusung di setiap kementerian, se-

hingga memerlukan koordinasi yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih program kerja. Sementara hambatan eksternal dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY adalah yang berada di luar BEM UNY yang dapat mempengaruhi proses penguasaan *civic skills* aktivis. Hambatan eksternal yang muncul meliputi hal teknis dan perubahan kondisi sosial dan politik.

Upaya BEM UNY mengatasi hambatan dalam meningkatkan *civic skills* berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut dilakukan secara eksternal dan internal. Dalam pelaksanaan aktivitas di dalam BEM UNY terdapat beragam permasalahan dari berbagai sisi yang dapat mempengaruhi penguasaan *civic skills* aktivis. Permasalahan ini harus segera diselesaikan agar tidak terjadi menjadi boomerang bagi BEM UNY. Penyelesaian masalah BEM UNY dalam menghadapi hambatan peningkatan *ci-vic skills* dilakukan dengan cara diskusi sesama anggota maupun dari inisiatif pimpinan. Upayan internal dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu perekrutan kader secara sistematis, mengutamakan program kerja, dan menjalin kemitraan. Sementara upaya eksternal meliputi pengaktifan papan pengumuman, rapat kementerian secara rutin, dan melakukan pembacaan situasi sosial. pengaktifan papan pengumuman dilakukan oleh kementerian sekretaris kabinet, lalu rapat kementerian secara rutin dilakuka oleh setiap kementerian sesuai dengan jadwalnya dengan tujuan terciptanya koordinasi yang efektif, dan melakukan kajian pembacaan situasi sosial dan politik dilakukanss oleh kementrerian kajian, riset dan politik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. (1) Peranan BEM UNY dalam meningkatkan *civic skills* aktivis adalah sebagai *Partner* UNY, yaitu bisa bekerja sama antara rektor dan BEM UNY dengan menjadi *partner* yang “baik”, memberikan kritik dan saran yang membangun kepada rektor untuk kesejahteraan mahasiswa UNY, sebagai fasilitator yang meliputi aspiratif yaitu berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa UNY dengan pihak rektor, pengabdian yaitu BEM UNY bertanggung jawab menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi

salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sebagai sarana pengembangan bakat, yaitu sebagai *community organizer* berupa sekelompok orang yang bekerja bukan hanya pada tingkat pelaksanaan program kerja, namun juga menyangkut masalah perubahan yang terjadi disekelilingnya. Pengembangan sains dan teknologi, yaitu aktivis BEM UNY dapat menyalurkan bakat dan minat, belajar bergaul dan berinteraksi secara sehat, meningkatkan kreatifitas dan jiwa kepemimpinan. Fungsi kaderisasi yaitu menciptakan kondisi yang dinamis untuk melahirkan kader-kader yang mandiri dalam berpikir, bersikap, maupun dalam bertindak. BEM UNY menjadi katalisator menuju optimalisasi peran mahasiswa sebagai makhluk intelektual dan makhluk sosial. (2) Program BEM UNY yang dapat meningkatkan *civic skills* para aktivis adalah sebagai berikut. Program kerja kementerian sekretaris kabinet meliputi forum sekretaris kementerian, membuat matrikulasi program kerja, pembuatan dan pengawasan jadwal piket, pembuatan dan pengelolaan papan pengumuman, lembar pemantauan pengurus. Program kerja kementerian keuangan meliputi pengelolaan dana DIPA BEM REMA UNY, pengelolaan khas pengurus BEM REMA UNY, kantin kejujuran sederhana di dalam sekretariat BEM UNY.

Program kerja kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) meliputi sekolah kader bangsa, forum komunikasi kaderisasi PSDM Se-DIY. Program kerja kementerian Dalam Negeri (MENDAGRI) meliputi sosialisasi 100 hari kinerja BEM REMA UNY, MOU (musyawarah ormawa UNY). Program kerja kementerian Luar Negeri BEM REMA UNY meliputi rapat kerja nasional BEM SI (badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia), diskusi FBD (forum BEM DIY) untuk persiapan Hardiknas dan 17 tahun reformasi. Program kerja kementerian Kesejahteraan Mahasiswa (MENKESMA) meliputi NGOREKSI (ngobrol bareng birokrasi), audiensi UKT dengan dewan Pembina. Program kerja kementerian kajian, riset dan politik (MENKARISPOL) meliputi dialog kebangsaan, diskusi sospol se-DIY, diskusi sosial politik se-DIY tentang ekonomi nasional. (3) Hambatan yang muncul dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia,

banyaknya program kerja dan keuangan. Hambatan eksternal meliputi hambatan teknis dan perubahan kondisi sosial, politik. (4) Upaya BEM UNY mengatasi hambatan dalam meningkatkan *civic skills* aktivisnya berupa upaya internal dan eksternal. Upaya internalnya berupa: Melakukan perekrutan secara sistematis, mengutamakan keefektifan program kerja, menjalin kemitraan. Upayan eksternal meliputi: Pengaktifan papan pengumuman, rapat kementerian secara rutin, melakukan pembacaan situasi sosial, politik

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak sebagai berikut. (1) pengurus BEM UNY diharapkan menciptakan hubungan keorganisasian yang harmonis dengan staf di kementerian/devisi dan pengurus inti BEM UNY, memfasilitasi staf di kementerian/devisi untuk mengembangkan potensi dengan memberikan *reward* bagi staf yang memiliki prestasi, memberikan kesempatan kepada staf di kementerian/devisi dan pengurus inti untuk mengikuti pelatihan keorganisasian. (2) Universitas Negeri Yogyakarta diharapkan memberikan *reward* terhadap mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan berprestasi baik, memberikan kesempatan dan memfasilitasi aktivis BEM UNY untuk mengikuti pelatihan dengan dukungan dana dan perijinan, memberikan pembinaan kepada mahasiswa UNY selain kegiatan akademik juga bergabung di organisasi kemahasiswaan untuk pengembangan bakat. (3) mahasiswa UNY diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu sarana pengembangan bakat yang menjadi bekal ketika terjun ke masyarakat. (4) Komunitas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KNI)) diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi dan sedikit sumbangan pikiran dalam rangka sebagai usaha mentransmisikan *civic skills* sehingga dapat meneguhkan jati diri pendidikan kewarganegaraan konteks Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amadeo, J-A. Torney-Purta, J., Barber, C. (2004). *Attention to media and trust in media sources: analysis of data from the IEA Civic Education Study (Fact sheet, 8 pages)*. College Park:

- Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement.
- Charles, B & Patrick, J (1999). *Principles and practices of education for democratic citizenship international perspective and projects*. Bloomington: ERIC Publications.
- Bass, B., M. (2000). The future of leadership in learning organizations. *The journal of leadership studies*, 7(3)
- Billings, M.,S. & Terkla, D.,G. (2011). Using a structural equation model to describe the infusion of civic engagement in the campus culture. *The Journal of General Education*, 2(60).
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. (Terjemahan Syafruddin, M. Yasir Alimi, M. Nur Khoirun). Yogyakarta: LkiS.
- Budiardjo, M. (1996). *Teori-teori politik dewasa ini*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Foubert, J., D., & Grainger, L., U. (2006). Effects of involvement in clubs and organizations on the psychosocial development of first-year and senior college students. *NASPA Journal*, 43(1).
- Harper, S., R, & Quaye, S.,J. (2007). *Student organizations as venues for black identity expression and development among african american male student leaders*. Philadelphia: Penn libraries.
- Kirlin, M. (2002). The missing component in service programs?. *Journal Civic skill building*, 35(03).
- Kirlin, M. (2003). *The role of civic skills in fostering civic engagement*. Fresno. CIRCLE (The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement).
- Adnan, M. F. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Era Demokratisasi. *Jurnal DEMOKRASI*, 4(1).
- Eisenberg, N & Spinrad, T.,L (2004). Emotion-related regulations: harpening the definition. *Journal child development*. 75(2).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. tentang Kepemudaan*
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Suyasa, & Leny, T. Y. S. (2006). Keaktifan berorganisasi dan kompetensi interpersonal. *Jurnal Phronesis*, 8(1), 71-99.
- Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.



**PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP
KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK
DALAM PEMBELAJARAN PPKn**

Ani Sulianti *¹, Mukhamad Murdiono¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: anisulianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap: (1) keterampilan berpikir kritis dan (2) hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Lumajang. Penelitian ini merupakan penelitian *quasi experiment*. Instrumen yang digunakan adalah observasi dan tes. Data dianalisis dengan menggunakan uji-t. Hasil penelitian, adalah sebagai berikut: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Lumajang pada Kompetensi Dasar menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan Bhineka Tunggal Ika. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 3 Lumajang pada Kompetensi Dasar menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan Bhineka Tunggal Ika.

Kata kunci: *inkuiri, keterampilan berpikir kritis, hasil belajar.*

***THE INFLUENCE OF INQUIRY LEARNING MODEL ON CRITICAL THINKING SKILLS
AND STUDENT LEARNING OUTCOMES IN PPKn LEARNING***

Abstract

This research aims to determine the effect of inquiry model on: (1) critical thinking skills and (2) learning outcomes in learning civic education of the students of SMA Negeri 3 Lumajang. This research is a quasi experiment. The data were collected through observation and test. The data were analyzed by using the t-test. The result of this research are as follows. (1) There is a significant effect of inquiry model in critical thinking skill in learning civic education of the students of SMA Negeri 3 Lumajang on the basic competence "analyze indicators of threats to the country in building national integration with unity in diversity". (2) There is a significant effect of inquiry model on the learning outcomes in learning civic education of the students of SMA Negeri 3 Lumajang on basic the competence "analyze indicators of threats to the country in building national integration with unity in diversity".

Keywords: *inquiry, critical thinking skills, outcomes*

Pendahuluan

PPKn mempunyai peranan penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Dalam mencapai hal tersebut, perlu dikembangkan dan ditransformasikan ke dalam bentuk model pembelajaran yang inovatif yaitu model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Hal ini sejalan dengan pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 dimana peserta didik aktif, kooperatif, dan kritis sehingga mampu menghantarkan peserta didik kepada pengalaman-pengalaman dan praktik konsep-konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang kelas dan luar kelas (Samsuri, 2013, pp. 6-7).

Untuk mendorong kemampuan keterampilan berpikir kritis peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal atau kontekstual, baik secara individu maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan model pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah yang terjadi dalam pembelajaran PPKn. Keterampilan berpikir kritis tergantung pada perilaku berkarakter yang dimiliki siswa (Puskur, 2010, p. 3).

Model pembelajaran inkuiri akan dapat menjembatani atau memberi solusi terhadap pembelajaran PPKn di sekolah yang masih menyimpan berbagai persoalan mengenai model pembelajaran yang diterapkan. Diharapkan dengan adanya model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PPKn untuk keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik dalam upaya penyelesaian isu-isu kontroversial dengan baik dan menjadi warga negara yang cerdas dan baik.

Tujuan PPKn salah satunya adalah untuk mengembangkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global, yang memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Terdapat tiga komponen yang dipelajari dan dikembangkan dalam pembelajaran PPKn yaitu (1). *civic knowledge*, (2). *civic skills*, dan (3). *civic dispositions* (Samsuri, 2006, p. 35).

Tuntutan kualitas pembelajaran, diperlukan sebuah inovasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan model pembelajaran yang mampu memenuhi tuntutan

kebutuhan peserta didik. Model pembelajaran dengan mendiskusikan isu-isu aktual diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik, yang meliputi tuntutan kebutuhan belajar peserta didik (kelompok maupun individu), dan tuntutan dinamika eksternal. Untuk itu, dibutuhkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Dalam pembelajaran PPKn, sangat dibutuhkan adanya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelajaran PPKn sehingga peserta didik dapat menggali informasi dari segala aspek sumber atau informasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenangkan, dan dapat memberikan suatu pelajaran yang baik bagi peserta didik. Peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber atau *literatur* yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik.

Peserta didik dituntut lebih aktif dalam menggali segala informasi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang diinginkan. Guru mengetahui apakah peserta didik sudah mempunyai peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis dan dapat dilihat atau diukur dari hasil belajar yang diteliti peserta didik.

Melalui model pembelajaran inkuiri, secara langsung akan membangkitkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam menanggapi permasalahan, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Selain itu, untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang akan dikembangkan, yaitu keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya tahu teori, tetapi juga dapat mengimplementasikan teori yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Hamdayama (2014, p. 31), inkuiri berasal dari kata *to inqueri* (*inquiry*) yang berarti ikut serta atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Model pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.

Kelebihan dari model pembelajaran inkuiri Shoimin (2014, pp. 86-87), yaitu sebagai

berikut: (a) merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna., (b) dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka., (c) merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman., (d) dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.

Hasil dari pra-observasi pada tanggal 24 desember 2015 pada salah satu guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang, memberikan penjelasan bahwa: fakta di lapangan menunjukkan belum semua guru memahami dan menerapkan model pembelajaran inkuiri disebabkan kurangnya keinginan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas keilmuan maupun kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran. Paradigma yang perlu dibangun adalah guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar di kelas. Guru harus mempunyai banyak inovasi pembelajaran yang membuat peserta didik akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam menanggapi isu yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Model pembelajaran inkuiri digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Selama ini model pembelajaran PPKn yang digunakan cenderung monoton, sehingga kurang menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran PPKn. Guru dituntut untuk dapat melakukan inovasi model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat peserta didik agar dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar.

Hasil belajar peserta didik dapat diukur melalui kemampuan peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, hasil belajar peserta didik ini juga akan mempengaruhi keterampilan berpikir kritis peserta didik yang dimana akan banyak menggali informasi dari berbagai sumber sehingga dalam hasil belajar peserta didik akan terlihat secara signifikan dalam kemampuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

Hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn kurang signifikan. Karena guru hanya menggunakan model pembelajaran

yang sama setiap pembelajaran di kelas, sehingga peserta didik merasa bosan dengan model pembelajaran yang digunakan. Seharusnya guru mempunyai inovasi yang lebih menarik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik mencapai 83% nilai yang kurang dari standar kriteria ketuntasan minimal yaitu 73, yang terdiri dari jumlah peserta didik dalam satu kelas yaitu berjumlah 34 peserta didik. Kegiatan pembelajaran di kelas peserta didik cenderung pasif sedangkan guru yang lebih aktif, sehingga hasil belajar peserta tidak maksimal.

Winkel (Purwanto, 2014, pp. 39), Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap. Belajar merupakan proses yang disengaja untuk mengubah tingkah laku peserta didik ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat sama dikemukakan Newby (2000, p. 8) mendefinisikan "*learning occurs when experience cause a relatively permanent change in an individual's knowledge or behavior*". Dengan belajar akan mengakibatkan perubahan pengetahuan individu dan perilaku secara permanen.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. (1) Mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang, dan (2) mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Lumajang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *quasi eksperiment* atau eksperimen semu. Desain penelitian berbentuk *randomized control group pretest-posttest design* ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	Pretest	Treatment	Posttest
Eksperimen	T ₁	X ₁	T ₂
Kontrol	T ₁	X ₂	T ₂

Keterangan:

T_1 = Nilai *pretest*

T_2 = Nilai *posttest*

X_1 = Kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri

X_2 = Kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah.

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Lumajang yang beralamat di Jalan Jenderal Panjaitan No. 79 Lumajang, Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016 pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan memberikan perlakuan sebanyak 4 kali pada Kompetensi Dasar menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan Bhineka Tunggal Ika.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMA Negeri 3 Lumajang tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari beberapa jurusan. Jurusan tersebut yaitu IPA dan IPS yang masing-masing jurusan menjadi 3 kelas dan 2 kelas yaitu IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan IPA 1, IPA 2.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan kriteria pada kelas yang dijadikan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol, alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian di SMA Negeri 3 Lumajang.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. (1) Observasi, untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik sebelum dan setelah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri maupun kelas kontrol yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-basic learning*). (2) Tes, yang digunakan berupa tes tertulis yang berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 50 butir soal dengan 5 alternatif jawaban a, b, c, d, dan e.

Analisis data yang digunakan adalah analisis uji-t. Sebelum dilakukan uji-t terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jika kedua kelas distribusi normal dan homogen, maka dilakukan uji-t dengan bantuan *software SPSS 16.0 foe windows*.

Kriteria pengujian, antara lain. (1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat perbedaan antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan

peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). (2) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat perbedaan antara peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum menguji hipotesis dilakukan uji prasyarat analisis data yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas variabel dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov smirnov*. Kriteria penerimaan normalitas adalah jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka distribusinya dikatakan normal, sebaliknya jika lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ maka distribusinya dikatakan tidak normal. Di bawah ini disajikan hasil perhitungan untuk semua variabel pada Tabel 2.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Normalitas

No	Data	Sig (p)	Keterangan
1	<i>Pretest</i> eksperimen 1	0,834	Signifikansi > 0,05 = normal
2	<i>Posttest</i> eksperimen 1	0,344	Signifikansi > 0,05 = normal
3	<i>Pretest</i> eksperimen 2	0,837	Signifikansi > 0,05= normal
4	<i>Posttest</i> eksperimen 2	0,824	Signifikansi > 0,05 = normal
5	<i>Pretest</i> control	0,174	Signifikansi > 0,05= normal
6	<i>Posttest</i> control	0,579	Signifikansi > 0,05= normal
7	Keterampilan berpikir kritis eksperimen 1	0,141	Signifikansi > 0,05= normal
8	Keterampilan berpikir kritis eksperimen 2	0,927	Signifikansi > 0,05 = normal
9	Keterampilan berpikir kritis control	0,608	Signifikansi > 0,05= normal

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016)

Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS, dapat diketahui bahwa sebaran data normal. Dari hasil perhitungan normalitas dalam penelitian ini berdistribusi normal, karena mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada ($p > 0,05$). Jadi, data ini telah memenuhi syarat untuk dianalisis.

Setelah dilakukan uji normalitas sebaran data, selanjutnya dilakukan uji homo-

genitas. Dengan bantuan program SPSS, dihasilkan skor yang menunjukkan varians yang homogen. Syarat agar varians dikatakan homogen apabila signifikan lebih besar dari 0,05 atau $F_{hitung} < F_{tabel}$. Di bawah ini disajikan hasil uji homogenitas pada Tabel 3.

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Homogenitas Varians

No	Data	Fhitung	Ftabel	db	Sig	Keterangan
1	Hasil Belajar Eksperimen 1 dengan Kontrol	1,767	4,00	1:60	0,189	Homogen
2	Hasil Belajar Eksperimen 2 dengan Kontrol	0,143		1:59	0,707	Homogen
3	Keterampilan berfikir kritis Eksperimen 1 dengan Kontrol	0,934		1:60	0,338	Homogen
4	Keterampilan berfikir kritis Eksperimen 2 dengan Kontrol	1,034		1:59	0,313	Homogen

(Sumber: Data primer yang diolah, 2014).

Dari hasil perhitungan uji homogenitas variabel dengan program SPSS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data tersebut mempunyai varians yang homogen, karena nilai signifikansi lebih besar dari 5% ($p > 0,05$) atau memiliki $F_{hitung} < F_{tabel}$. Jadi, data tersebut telah memenuhi syarat untuk dianalisis.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang”. Analisis yang digunakan adalah Analisis uji-t dengan bantuan program SPSS. Syarat data bersifat signifikan apabila p lebih kecil dari 0,05. Di bawah ini disajikan hasil uji-t keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa besar t_{hitung} adalah 3,058 dan nilai t_{tabel} dengan db 60 pada taraf signifikansi 1% sebesar 2,000. nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau Nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,003 < 0,01$). Dengan demikian hasil uji-t tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang antara yang menggunakan model pembelajaran inkuiri (kelas

eksperimen 1) dengan model pembelajaran *problem basic learning* (kelompok kontrol). Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan hipotesis diterima, yakni penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji-t Keterampilan Berfikir Kritis Peserta Didik Kelas Eksperimen 1 dengan Kelas Kontrol.

Data	Mean	Sig	t hitung	t tabel	Keterangan
Ekperimen 1 (model inkuiri)	46,21	0,003	3,058	2,000	Sangat Signifikan
Kontrol (model PBL)	40,76				($P := 0,003 < 0,01$)

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Di bawah ini disajikan hasil uji-t keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol pada Tabel 5.

Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji-t Keterampilan Berfikir Kritis Peserta Didik Kelas Eksperimen 2 dengan Kelas Kontrol

Data	Mean	Sig	t hitung	t tabel	Keterangan
Ekperimen 2 (model inkuiri)	47,61	0,000	4,245	2,000	Sangat Signifikan
Kontrol (model PBL)	40,75				($P := 0,000 < 0,01$)

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Dari Tabel 5 juga dapat diketahui nilai t_{hitung} adalah 4,245 dan nilai t_{tabel} dengan db 60 pada taraf signifikansi 1% sebesar 2,000. nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau Nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Dengan demikian hasil uji-t tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang antara yang menggunakan model pembelajaran inkuiri (kelas eksperimen 2) dengan model pembelajaran *problem basic learning* (kelompok kontrol). Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan hipotesis diterima, yakni penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpi-

kir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kelas eksperimen 1 dan 2 yang sama-sama menggunakan model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Efektivitas tersebut juga dapat dilihat pada hasil *gain score* yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil *Gain Score* Keterampilan Berpikir Kritis

Kelas	<i>Gain Score</i>	Kategori
Eksperimen 1 (model inkuiri)	0.72	Efektivitas tinggi
Eksperimen 2 (model inkuiri)	0.74	Efektivitas tinggi
Kontrol (model PBL)	0.64	Efektivitas sedang

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa pada peserta didik kelas eksperimen 1 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0.72 dalam kategori efektivitas tinggi. Kemudian pada kelas eksperimen 2 yang juga menggunakan model pembelajaran inkuiri memperoleh skor 0.74 dalam kategori efektivitas tinggi. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0.64 dalam kategori efektivitas sedang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima yaitu penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil *gain score*.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang”. Analisis *uj-t* dengan bantuan program SPSS. Syarat data bersifat signifikan apabila *p* lebih kecil dari 0,05. Di bawah ini disajikan hasil uji-t hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 dapat diketahui nilai t_{hitung} adalah 4,498 dan nilai t_{tabel} dengan db

60 pada taraf signifikansi 1% sebesar 2,000. nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau Nilai *p* lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Dengan demikian hasil uji-t tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang antara yang menggunakan model pembelajaran inkuiri (kelas eksperimen 1) dengan model pembelajaran *problem basic learning* (kelompok kontrol). Dengan adanya perbedaan tersebut menunjukkan hipotesis diterima, yakni penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang.

Tabel 7. Rangkuman Hasil Uji-t Hasil Belajar Peserta Didik Dalam Pembelajaran PPKn Kelas Eksperimen 1 dengan Kelas Kontrol

Data	Mean	Sig	t hitung	t tabel	Keterangan
Ekperimen 1 (model inkuiri)	62,97	0,000	4,498	0,000	Sangat Signifikan
Kontrol (model PBL)	52.61				($P := 0,000 < 0,01$)

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Di bawah ini disajikan hasil uji-t hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol pada tabel 8.

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji-t Hasil Belajar Peserta didik Kelas Eksperimen 2 dengan Kelas Kontrol

Data	Mean	Sig	t hitung	t tabel	Keterangan
Ekperimen 2 (model inkuiri)	63,43	0,000	5,349	2,000	Sangat Signifikan
Kontrol (model PBL)	52,61				($P := 0,000 < 0,01$)

(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Dari Tabel 8 juga dapat diketahui nilai t_{hitung} adalah 5,349 dan nilai t_{tabel} dengan db 59 pada taraf signifikansi 1% sebesar 2,000. nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau Nilai *p* lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Dengan demikian hasil uji-t tersebut menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang antara yang menggunakan model pembelajaran inkuiri (kelas eksperimen 2) dengan model pembelajaran *problem basic learning* (kelompok kontrol). Dengan adanya

perbedaan tersebut menunjukkan hipotesis diterima, yakni penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kelas eksperimen 1 dan 2 yang sama-sama menggunakan model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Efektivitas tersebut juga dapat dilihat pada hasil *gain score* yang disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil *Gain Score* Hasil Belajar

Kelas	<i>Gain Score</i>	Kategori
Eksperimen 1 (model inkuiri)	0,31	Efektivitas sedang
Eksperimen 2 (model inkuiri)	0,31	Efektivitas sedang
Kontrol (model PBL)	0,06	Efektivitas rendah

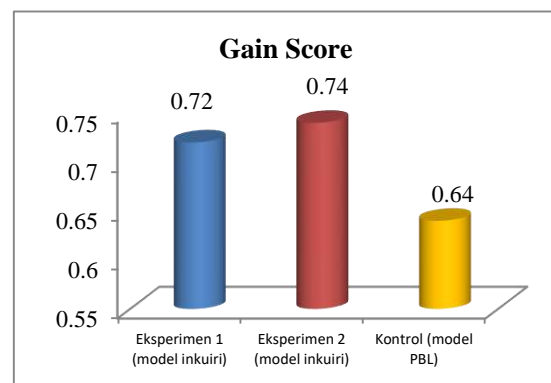
(Sumber: Data primer yang diolah, 2016).

Tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa baik pada peserta didik kelas eksperimen 1 maupun peserta didik kelas eksperimen 2 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0.31 dalam kategori efektivitas sedang. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0.06 dalam kategori efektivitas rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima yaitu penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil *gain score*.

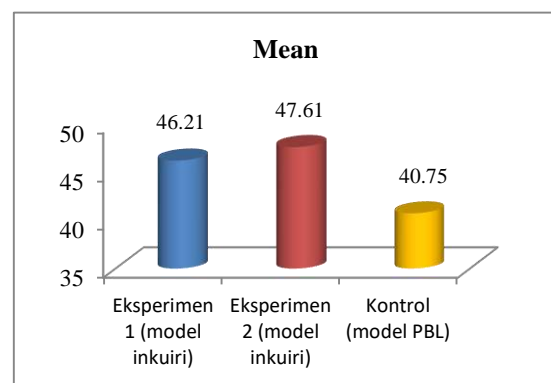
Dari hasil analisis data diketahui bahwa pengaruh model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil *gain score*. Pada kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,058 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,003 < 0,01$). Sementara kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,245 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$).

Peserta didik kelas eksperimen 1 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0.72 dalam kategori efektivitas tinggi. Kemudian pada kelas eksperimen 2 yang juga menggunakan model pembelajaran inkuiri memperoleh skor 0.74 dalam kategori efektivitas tinggi. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0.64 dalam kategori efektivitas sedang. Hasil perbandingan *gain score* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Peroleh *Gain Score* Keterampilan Berpikir Kritis.

Hasil perbandingan mean (skor rata-rata) juga menunjukkan peserta didik kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran inkuiri lebih memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning*. Peserta didik kelas eksperimen 1 memperoleh skor mean sebesar 46.21, kelas eksperimen 2 memperoleh skor mean 47,61 dan kelas kontrol sebesar 40.75. Hasil perbandingan perolehan skor *mean* keterampilan berpikir kritis dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Perolehan Skor Mean Keterampilan Berpikir Kritis

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibrahim (2012) dengan judul *Pengaruh Metode Inkuiri dan Pemberian Tugas Terhadap Aktivitas dan Pemahaman Konsep Sains Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep sains peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB secara signifikan dan penerapan metode inkuiri dan pemberian tugas dalam pembelajaran sains mempunyai perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep sains peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Telu Kabupaten Sumbawa-NTB. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Hamdayama (2014, p. 31) bahwa model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.

Model pembelajaran inkuiri adalah sebuah pendekatan dalam pelajaran yang mengharuskan peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang topik masalah-masalah atau membutuhkan lebih banyak lagi dari sekedar menjawab pertanyaan atau mendapatkan jawaban yang benar. Hal ini menjadikan model pembelajaran inkuiri secara langsung membangkitkan kemampuan atau keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam menanggapi permasalahan, baik yang bersifat individu maupun kelompok.

Sementara model pembelajaran *problem basic learning* pada kelas kontrol tampak peserta didik kurang memahami tentang alasan masalah-masalah yang harus dipecahkan dan peserta didik kurang percaya diri dalam memecahkan masalah, sehingga motivasi belajar juga menjadi kurang maksimal, sehingga berdampak pula pada peningkatan keterampilan berpikir kritis yang kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Shoimin (2014, pp. 86-87) bahwa model pembelajaran inkuiri dianggap pembelajaran yang lebih bermakna karena menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang.

Hasil temuan lainnya juga menunjukkan bahwa mayoritas kecenderungan keteram-

pilan berpikir kritis pada peserta didik kelas eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran inkuiri dalam kategori baik sebesar 58,6%. Demikian pula dengan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran inkuiri menunjukkan mayoritas kecenderungan keterampilan berpikir kritis pada kategori baik sebesar 42,9%. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* menunjukkan mayoritas kecenderungan keterampilan berpikir kritis pada kategori cukup sebesar 60,6%. Hal ini berarti model pembelajaran inkuiri baik pada kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2 lebih baik dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning*.

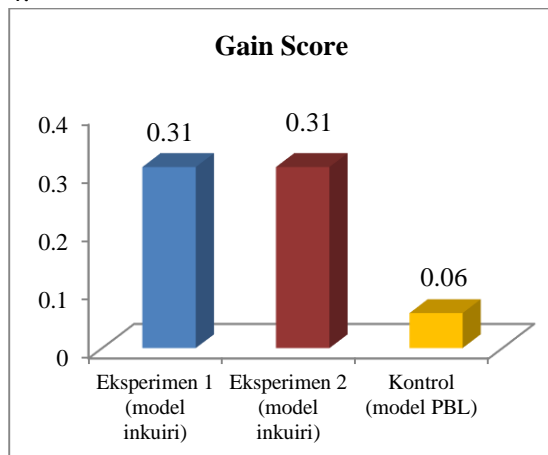
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan hasil *gain score*. Pada kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,498 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Sementara kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,349 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$).

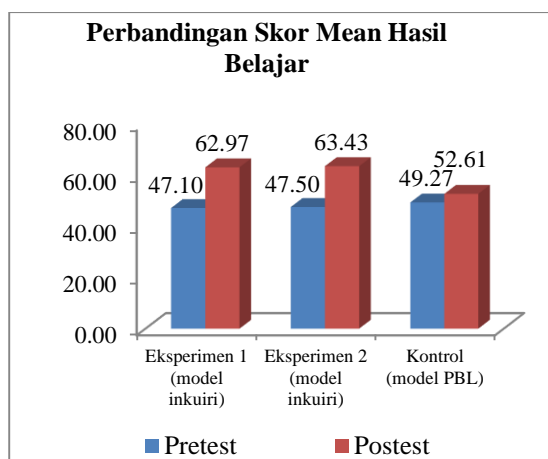
Peserta didik kelas eksperimen 1 maupun eksperimen 2 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0.31 masing-masing dalam kategori efektivitas sedang. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0.06 dalam kategori efektivitas rendah. Hasil perbandingan *gain score* dapat dilihat pada gambar 3.

Hasil perbandingan mean (skor rata-rata) juga menunjukkan peserta didik kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran inkuiri lebih memperoleh skor yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning*. Peserta didik kelas eksperimen 1 pada saat pretest

memperoleh skor mean sebesar 47,10 dan saat postest menjadi 62,97. Kelas eksperimen 2 pada saat pretest memperoleh skor mean 47,50 dan saat postest menjadi 63,43. Sementara kelas kontrol saat pretest sebesar 49,27 dan saat postest menjadi 52,61. Hasil perbandingan *mean* hasil belajar dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 3. Perbandingan Peroleh *Gain Score* Hasil Belajar



Gambar 4. Perbandingan Peroleh Skor *Mean* Hasil Belajar

Hasil penelitian ini juga menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taat Wulandari (2009) dengan judul *Metode Inkuiri Dalam Pembelajaran IPS (Tesis)* yang membuktikan bahwa hasil belajar dengan menggunakan metode inkuiri lebih besar dibanding dengan hasil peserta didik dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F sebesar 59,040 dengan p sebesar $0.000 < 0.05$. Selain itu juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2011) dengan judul *Kontribusi Model Pembelajaran Kontekstual Tipe Inkuiri Dalam*

Memingkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Peserta didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik setelah mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual tipe inkuiri. (2) terdapat perbedaan peningkatan motivasi dan prestasi belajar antara peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran konvensional dengan peserta didik yang belajar dengan model pembelajaran kontekstual tipe inkuiri.

Pembelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah dalam membangun pengetahuan atau keterampilan melalui metode ilmiah, salah satunya yaitu melalui model inkuiri. Model pembelajaran inkuiri akan dapat menjembatani atau memberi solusi terhadap pembelajaran PPKn di sekolah yang masih menyimpan berbagai persoalan mengenai model pembelajaran yang diterapkan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa model pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap hasil belajar.

Pada kelas eksperimen 1 maupun kelas eksperimen 2 dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri tampak bahwa guru memberikan kesempatan belajar untuk memperoleh keterampilan dengan menyajikan situasi nyata, dan untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Hal ini tentunya menuntut peserta didik untuk berpikir dan mencari solusi dengan sebuah permasalahan yang diberikan oleh pendidik, serta membuat peserta didik mempunyai pengalaman belajar menjadi suatu yang bermakna dalam kehidupan nyata. Dengan model pembelajaran inkuiri, peserta didik dibiasakan untuk produktif, analitis, dan kritis. Apabila peserta didik aktif dalam menemukan sendiri fakta, konsep, dan generalisasi, maka apa yang telah ditentukan secara langsung tersebut akan senantiasa diingat serta dipahami oleh peserta didik, sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Shoimin (2014, pp. 86-87) yang menjelaskan bahwa model pembelajaran inkuiri memiliki banyak keunggulan dibandingkan model pembelajaran lainnya. Keunggulan tersebut antara lain: model pembelajaran inkuiri yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna serta dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan model pembelajaran inkuiri sesuai dengan kurikulum saat ini dan terbukti efektif meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran PPKn.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. (1) Pengaruh model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 dan *gain score*. Pada kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,058 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,003 < 0,01$). Sementara kelas eksperimen 2 dengan kelas kontrol memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,245 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Peserta didik kelas eksperimen 1 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0,72 dalam kategori efektivitas tinggi, peserta didik kelas eksperimen 2 yang juga menggunakan model pembelajaran inkuiri memperoleh skor 0,74 dalam kategori efektivitas tinggi. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0,64 dalam kategori efektivitas sedang. (2) Pengaruh model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran PPKn berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PPKn di SMA Negeri 3 Lumajang. Hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 dan hasil *gain score*. Pada kelas eksperimen 1 dengan kelas kontrol nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,498 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Sementara kelas eksperimen 2

dengan kelas kontrol memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,349 > 2,000$) atau nilai p lebih kecil dari 0,01 ($p = 0,000 < 0,01$). Peserta didik kelas eksperimen 1 maupun eksperimen 2 dengan model inkuiri memperoleh *gain score* sebesar 0,31 masing-masing dalam kategori efektivitas sedang. Sementara pada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran *problem basic learning* memperoleh *gain score* sebesar 0,06 dalam kategori efektivitas rendah.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipaparkan, maka dapat diberikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut. (1) Pengaruh model pembelajaran inkuiri dilakukan secara kelompok, sehingga kemungkinan ada anggota yang kurang aktif, sehingga mengakibatkan keterampilan berpikir kritisnya juga kurang optimal. Oleh karena itu, hendaknya guru dapat membangkitkan peserta didik agar aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan bimbingan, motivasi, dan monitoring pada setiap kelompok. (2) Hendaknya guru membiasakan diri untuk menerapkan model pembelajaran inkuiri dengan persiapan yang baik termasuk dari segi peserta didik maupun instrumen yang dibutuhkan, sehingga hasil belajar peserta didik dapat lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Hamdayama, J. (2014). *Model dan metode pembelajaran kreatif dan berkarakter*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ibrahim. (2012). Pengaruh metode inkuiri dan pemberian tugas terhadap aktivitas dan pemahaman konsep sains siswa kelas VII SMP Negeri 1 Telu Kabupaten Sumbawa-NTB. Tesis Magister, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D., et al. (2000). *Inteructional Technology for Teaching and Learning*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Purwanto. 2014. *Evaluasi hasil belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puskur. 2010. *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Jakarta: Puskur Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.

- Samsuri. (September 2013). Paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013. *In Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. FKIP Universitas Ahmad Dahlan.
- Samsuri. (2006). Pembentukan warga negara demokratis dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *PKn Progresif*, 1(1).
- Shoimin, A. (2014). *68 Model pembelajaran inovatif dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Silalahi, R. (2011). Kontribusi model pembelajaran kontekstual tipe inkuiri dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Edisi Khusus*(2).



PEMANFAATAN METODE *ACTIVE DEBATE* UNTUK PENINGKATAN HASIL BELAJAR DAN KARAKTER KESANTUNAN DALAM PEMBELAJARAN PKn DI SMP

Dwi Cahyaningtyas *¹, Marzuki²

¹SMP Negeri 6 Yogyakarta

²Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. R.W. Monginsidi No.1, Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta, 55233 Yogyakarta Indonesia

²Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: cahyaningtyas09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan karakter kesantunan dengan memanfaatkan metode *Active Debate*. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII F SMP Negeri 6 Yogyakarta. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan metode *Active Debate* dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan hasil belajar dan karakter kesantunan peserta didik kelas VIII F SMP Negeri 6 Yogyakarta tahun ajaran 2015-2016. Hal ini terbukti dari kenaikan nilai rata-rata hasil belajar dari 60,64 menjadi 73,79 pada akhir siklus 1 dan menjadi 80,16 setelah siklus 2. Skor kesantunan pada kondisi awal 45,54 menjadi 65,14 pada akhir siklus 1 dan menjadi 80,54 setelah siklus 2. Terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dengan rata-rata 13,15 (21,99%) pada akhir siklus 1 menjadi 6,37 (8,89%) pada akhir siklus 2 dengan kategori baik, dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 87,50%. Terjadi peningkatan sikap kesantunan dalam berpendapat pada siklus 1 dengan rata-rata 19,61 (48,29%) menjadi 15,40 (24,28%). Total peningkatan pada siklus 2 sebesar 35,01 (80,54%) dan skor tersebut telah mencapai kategori baik.

Kata kunci: *metode active debate, hasil belajar, karakter kesantunan*

THE USE OF THE ACTIVE DEBATE METHOD TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOME AND CHARACTER OF POLITENESS IN THE TEACHING CIVICS EDUCATION IN SMP

Abstract

This research was action research which was carried out in two cycles aims to determine of learning outcome and character politeness by utilizing the method of Active Debate. The subjects of this research were VIII F students of SMPN 6 Yogyakarta. The analysis technique used in this research was descriptive qualitative. The result shows that the use of the Active Debate method in teaching Civics Education could improve the learning outcome and the character of politeness of VIII F students of SMPN 6 Yogyakarta in 2015-2016. This was proven by: (1) The increase of the average score of learning outcomes in the initial condition after cycle 1 60.64 to become 73.79 and after cycle 2 to 80.16. The score of politeness character was 45.54 in the initial conditions and after cycle 1 it increased 65.14 and after cycle 2 to 80.54. There is an improvement in the students' learning outcome with the average score of 13.15 (21.9%) in the first cycle and 6.37 (8.89%) in the second cycle, which is in a good category with the classical learning mastery of 87.50%. There is an improvement in students' politeness character in expressing opinions with the average score of 19.61 (48.29%) in the first cycle and 15.40 (24.28%) in the second cycle. The total improvement in the second cycle is 35.01 (80.54%) which is in a good category.

Keywords: *Active Debate method, learning outcome, polite character*

Pendahuluan

Perubahan paradigma pembelajaran dalam kurikulum membutuhkan peran penting dari guru. Peran penting guru adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan aktivitas yang interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif.

Agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran maka metode pembelajaran perlu disiapkan oleh guru sedemikian rupa sehingga peserta didik bebas menumbuhkan kreativitasnya dan menjadi manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan kuat, belajar melakukan pengendalian diri, melatih kepribadian, meningkatkan kecerdasan, berakhlak mulia dan berlatih keterampilan dengan bimbingan dari guru.

Di era global seperti sekarang ini untuk menghadapi berbagai persaingan maka sekolah dipandang perlu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didiknya dalam menghadapi berbagai persaingan dan sekaligus dapat meningkatkan karakter peserta didik terutama karakter kesantunan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian tentang pemanfaatan metode *Active Debate* untuk meningkatkan hasil belajar dan karakter kesantunan peserta didik.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki berbagai tujuan yang akan dikembangkan pada diri peserta didik yaitu: (1) mengembangkan kemampuan berpikir kritis (daya pikir), pengetahuan dan keterampilan; (2) mengembangkan kesadaran dan semangat berbangsa sehingga dapat melahirkan warga negara yang baik; (3) mempersiapkan generasi agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mampu menghilangkan berbagai problem masyarakat dan berbagai penyakit masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran; (4) mempersiapkan kemampuan dan keterampilan peserta didik agar siap memasuki pasar tenaga kerja yang siap bersaing di kawasan ASEAN apalagi sejak diberlakukannya MEA (Zamroni, 2015, p. 35).

Berpandangan dari pendapat tersebut peneliti berasumsi bahwa dengan pembelajaran yang dirancang dengan baik oleh pendidik sesuai dengan tujuan pembelajaran maka dapat menambah pengetahuan peserta didik seka-

ligus dapat merubah tingkah laku peserta didik sedikit demi sedikit kearah kebaikan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pendapat senada dikemukakan Majid (2015, p. 284), dalam pembelajaran yang terjadi adalah proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik yang bertujuan agar peserta didik menerima pesan dengan baik dan dapat mempengaruhi pemahaman dan perubahan tingkah laku dari peserta didik. Sehingga keberhasilan pendidikan tergantung kepada efektivitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran itu. Menurut Huda (2015, p. 3), ketika pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam tingkah laku, tindakan, cara, dan performa, maka konsekuensinya sangat jelas, yaitu guru bisa mengobservasi dan menverifikasi pembelajaran itu sendiri sebagai objek.

Pada dasarnya proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan yang merupakan kognitif, afektif maupun psikomotor. Dan proses perubahan tersebut dapat terjadi dari yang paling sederhana sampai pada yang paling kompleks yang bersifat pemecahan masalah dan pentingnya peranan perubahan kepribadian dalam proses belajar dan hasil belajar (Daryanto & Rahardjo, 2012, p. 27).

Makna dari pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dalam pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan satu-satunya harapan mata pelajaran yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (*Character Building*) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti luhur, serta musyawarah mufakat yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala. Musyawarah mufakat yang terkandung dalam demokrasi Pancasila dilakukan dengan: (1) semangat kekeluargaan dan kegotong-ro-yongan; (2) mengambil keputusan dengan adil-adilnya; (3) tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan

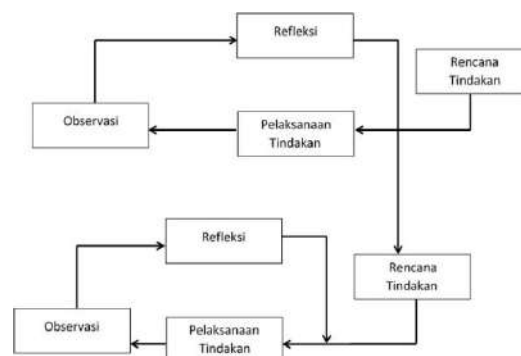
kewajiban; (4) menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau gagasan yang disampaikan orang lain; (5) semangat tolong menolong dan bekerja sama untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi; (6) berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial (Samsuri, 2011, p. 378).

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu agar peserta didik menjadi generasi penerus yang berakhlak mulia, berilmu, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea keempat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada khususnya, hasil belajar peserta didik harus baik dan terjadi peningkatan perilaku atau peningkatan karakter. Agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat dan peserta didik merasa senang dalam mengikuti pembelajaran maka perlu dicari strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang tidak membosankan dan membuat peserta didik tertarik.

Metode Penelitian

Penelitian berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/*Classroom Action Research* (CAR). Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Desain penelitian menggunakan model Kemmis dan Mc. Taggart yang dikembangkan pada 1988. Mereka menggunakan empat langkah pengembangan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi dalam system spiral yang terkait antara satu dengan yang lainnya (Sukardi, 2013, pp. 5-6). Kedua ahli ini memandang empat langkah pengembangan tersebut sebagai langkah dalam pelaksanaan siklus, sehingga mereka menyatukan pelaksanaan tindakan dan observasi menjadi satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini kemudian dijadikan dasar untuk langkah berikutnya yaitu refleksi untuk mencermati apa yang sudah terjadi (*reflecting*). Setelah selesai melakukan refleksi lalu disusun sebuah modifikasi yang diaktualisasikan dalam bentuk rangkaian tindakan dan pengamatan lagi, begitu seterusnya (Arikunto, 2010, p. 131).

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu desain penelitian tindakan kelas, maka alur penelitiannya adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Diadopsi dari Kemmis dan Taggart

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus pada tahun ajaran 2015-2016 di kelas VIII F SMP Negeri 6 Yogyakarta.

Prosedur penelitian ini terdiri atas dua siklus penelitian. Tiap-tiap siklus penelitian terdiri atas tahapan perencanaan, melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, melakukan pengamatan bersama dengan pelaksanaan tindakan, dan melakukan refleksi untuk memproses data yang didapat pada saat dilakukan pengamatan dan hasil kerja.

Indikator keberhasilan pada siklus 1 adalah: (1) terjadi perubahan suasana kelas menjadi lebih dinamis; (2) peserta didik mengikuti pembelajaran PKn dengan metode *Active Debate* dengan penuh antusias; (3) peserta didik dapat mengemukakan pendapat dan bertanya dengan baik, mampu menggunakan kaidah bahasa yang baik, mampu memilih kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain, mampu menghargai pendapat temannya, dan tidak memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain.

Indikator keberhasilan pada siklus 2 adalah: (1) hasil belajar peserta didik meningkat yang dapat dilihat dari hasil belajar berupa ulangan harian yang diberikan oleh guru; (2) terjadi perubahan suasana kelas menjadi lebih dinamis; (3) peserta didik mengikuti pembelajaran dengan semangat tinggi; (4) peserta didik paham dan mengerti terhadap metode yang dipakai guru dan mampu mengeluarkan pendapat dengan santun; (5) terjadi perubahan dalam pembelajaran secara signifikan, yaitu dari yang tadinya kurang menyenangkan, menjadi menyenangkan; (6) terjadi perubahan karakter kesantunan dalam berpendapat pada peserta didik.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengamatan pada setiap situasi dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan Teknik Pengumpulan data hasil belajar peserta didik dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan ulangan harian yang dilakukan pada akhir siklus penelitian tindakan.

Secara spesifik pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan teknik sebagai berikut: (1) observasi/pengamatan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran dengan metode *Active Debate* berlangsung. Pada pelaksanaan observasi, peneliti dibantu oleh seorang kolaborator yang bertugas untuk mengamati kesantunan peserta didik dengan instrumen observasi yang telah disusun sebelumnya; (2) tes hasil belajar yang berupa ulangan harian untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara tertulis pada akhir siklus penelitian; (3) dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti bersama kolaborator untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tertulis maupun tidak tertulis pada penelitian. Dokumentasi tertulis antara lain hasil pengamatan kesantunan peserta didik dalam mengemukakan pendapat, kegiatan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan karakter peserta didik khususnya kesantunan dalam berpendapat, sedangkan dokumen yang tidak tertulis berupa gambar atau foto pada waktu kegiatan berlangsung. Catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat secara detail peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Catatan lapangan ini terkait dengan pencatatan peristiwa pada saat pembelajaran PKn dengan menggunakan metode *Active Debate*.

Indikator kinerja dalam penelitian ini diukur dengan: (1) kategori dalam melakukan aktivitas kesantunan mengemukakan pendapat sangat baik (76-100%); (2) nilai hasil belajar (ulangan harian) peserta didik minimal sama dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah 75.

Data hasil penelitian yang sudah terkumpul ditabulasi kemudian dianalisis untuk

mencapai tujuan-tujuan penelitian. Uji analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik yang terdiri dari analisis data kuantitatif menggunakan deskriptif presentase, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rumus Rerata: } \% \bar{X} = \frac{fx}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

- \bar{X} = rerata skor
 - x = nilai /skor
 - f = frekuensi kategori
 - n = Jumlah subjek
- (Sukardi, 2011, p. 38)

Berikutnya dilakukan Uji t, yaitu untuk menguji apakah peningkatan hasil belajar dan kesantunan belajar peserta didik menunjukkan perbedaan yang signifikan (nyata), dengan rumus,

$$t = \frac{X - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

- T = nilai t yang dihitung
- X = nilai rata-rata
- μ_0 = nilai yang dihipotesiskan
- S = simpangan baku sampel
- n = jumlah anggota sampel

Selanjutnya untuk pengolahan analisis uji beda nyata (uji t) digunakan fasilitas bantuan melalui program komputer *Statistical Package Social Science* (SPSS) 17.0

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data observasi sikap kesantunan peserta didik sebelum tindakan, setelah tindakan pada siklus 1 dan setelah tindakan pada siklus 2. Data hasil belajar peserta didik diperoleh dari hasil *pretest*, ulangan harian sesudah melakukan tindakan pada siklus 1, dan ulangan harian setelah melakukan tindakan pada siklus 2.

Pada lembar observasi sikap kesantunan yang dilakukan peneliti, indikatornya terdiri dari 21 pernyataan disertai 4 jawaban dan diberi skor skala Linkert, maka kriterianya adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Skor Sikap Kesantunan Mengemukakan Pendapat

Rentang Skor	Kriteria
72 – 84	Sangat baik
59 – 71	Baik
46 – 58	Cukup
33 – 45	Kurang baik
21 – 32	Tidak baik

Jika sikap kesantunan mengemukakan pendapat peserta didik pada saat pembelajaran baik, maka skornya akan berada di atas 59. Sebaliknya jika kesantunan mengemukakan pendapat peserta didik pada saat pembelajaran kurang baik, maka skornya berada dibawah 45. Berdasarkan pendapat dari Kunandar (2014, p. 320) tugas sekolah adalah memberikan pengalaman belajar yang tepat bagi peserta didik, sedangkan tugas guru adalah membantu peserta didik menjalin pengalaman belajar yang satu dengan yang lain. Jika peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang langsung mempraktekkan bagaimana mengemukakan pendapat dengan santun, maka peserta didik akan mengetahui tentang cara-cara mengemukakan pendapat dengan santun untuk kemudian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan keteladanan dari lingkungannya. Hal senada dikemukakan Aqib (2015, p. 28) pendidikan karakter di sekolah apabila pelaksanaannya dengan memberikan pendekatan yang komprehensif, maka budaya moral yang positif akan tercipta di sekolah yaitu sebuah lingkungan sekolah yang secara keseluruhan mendukung penanaman nilai-nilai di kelas. Hal ini dapat diwujudkan melalui keteladanan kepala sekolah, disiplin, kepekaan, demokrasi dan peluang untuk menghargai kepedulian moral. Sekolah bersama-sama orang tua dan masyarakat sekitar memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun karakter melalui keteladanan. Hal ini memperkuat pendapat Risthantri & Sudrajat (2015, p.2) bahwa pembentukan sopan santun dimulai dari keluarga. Anak akan meniru perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang mempunyai perilaku sopan dapat dipastikan keluarganya juga sopan.

Hasil skor kesantunan berpendapat peserta didik di kelas VIII F seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor Kesantunan Berpendapat Peserta Didik

No.	Skor sebelum tindakan	Skor siklus 1	Skor siklus 2	Persentase peningkatan	
				Siklus 1	Siklus 2
1	30	48	64	60,00	33,33
2	32	55	69	71,88	25,45
3	20	45	57	125,00	26,67
4	56	59	71	5,36	20,34
5	34	49	63	44,12	28,57
6	45	50	59	11,11	18,00
7	43	59	71	37,21	20,34
8	57	63	72	10,53	14,29
9	30	50	67	66,67	34,00
10	29	45	58	55,17	28,89
11	28	44	59	57,14	34,09
12	30	44	56	46,67	27,27
13	32	55	72	71,88	30,91
14	33	57	70	72,73	22,81
15	29	42	56	44,83	33,33
16	31	55	68	77,42	23,64
17	36	58	71	61,11	22,41
18	23	44	54	91,30	22,73
19	44	65	77	47,73	18,46
20	43	63	74	46,51	17,46
21	56	68	76	21,43	11,76
22	58	66	76	13,79	15,15
23	45	58	74	28,89	27,59
24	44	56	71	27,27	26,79
25	41	64	75	56,10	17,19
26	35	58	68	65,71	17,24
27	37	57	72	54,05	26,32
28	40	62	76	55,00	22,58
29	43	61	74	41,86	21,31
30	38	48	58	26,32	20,83
31	39	46	64	17,95	39,13
32	43	57	73	32,56	28,07
Jml	1224	1751	2165	1545,28	776,95
Skor ideal	2688	2688	2688		
Rerata %	45,54	65,14	80,54	48,29%	24,28

Terlihat pada Tabel 2 bahwa sebelum dilakukan tindakan terdapat 28 peserta didik memiliki skor dibawah 45, dan hanya 4 peserta didik yang memiliki skor diatas 46. Peneliti berupaya meningkatkan karakter kesantunan mengemukakan pendapat dengan menggunakan metode yang dirancang agar peserta didik mengalami sendiri dalam proses pembelajaran. Hal senada dikemukakan oleh Purwanto (2004, pp. 86-88) antara proses belajar dan proses kematangan keduanya berhubungan erat satu sama lain saling menguatkan. Belajar mem-

butuhkan suatu kegiatan yang disadari yang berupa aktivitas-aktivitas dan latihan serta konsentrasi dari yang bersangkutan sedangkan kematangan datang dengan sendirinya jika sudah tiba saatnya. Belajar juga berhubungan erat dengan pengalaman karena keduanya merupakan proses yang dapat merubah sikap, perilaku dan pengetahuan. Belajar dan latihan juga mempunyai persamaan karena keduanya menyebabkan perubahan atau proses dalam tingkah laku, sikap dan pengetahuan. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 hanya terdapat 6 peserta didik yang memiliki skor dibawah 45, dan 26 peserta didik memiliki skor diatas 46. Pada siklus 2 tidak terdapat peserta didik yang memiliki skor 45 kebawah. Dari data tersebut peneliti berpendapat bahwa setelah melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode debat, dapat diamati perubahan perilaku peserta didik dilihat dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Metode *Active Debate* merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpendapat peserta didik. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. Peserta didik dibagi ke dalam dua kelompok dan setiap kelompok terdiri dari tiga orang atau lebih. Di dalam kelompoknya, peserta didik mengambil posisi pro dan tiga orang/lebih yang lainnya dalam posisi kontra melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap peserta didik tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran *Active Debate* (Dananjaya, 2012, p. 77).

Metode *Active Debate* pelaksanaannya berbentuk pertukaran pikiran secara berhadapan-hadapan namun didalamnya terdapat usaha untuk melemahkan atau mematahkan pendapat lawan dan mempertahankan pendapat sendiri dengan mencari alasan yang kuat dan tegas. Sifat dan ciri debat dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) bertujuan membenarkan pendapat sendiri dengan melemahkan pendapat lawan; (2) berusaha membuktikan kebenaran pendapat yang dikemukakan atau pernyataan yang dikemukakan; (3) bertujuan mengubah pendapat pendengar agar mendukung pendapat pembicara sekaligus menolak pendapat lawan. (Semi, 2008, p. 81).

Menurut Warsono & Hariyanto (2013, p. 84), dalam pelaksanaan teknik debat, kelas dibagi menjadi 2 kelompok yang sama jumlah anggotanya. Kedua kelompok merupakan kelompok pro dan kontra atau kelompok dengan pemikiran alternatif. Masing-masing harus mempertahankan pendapatnya dengan argumen yang relevan dan logis. Subjek yang akan diperdebatkan didiskusikan terlebih dahulu oleh semua anggota kelompok. Subjek yang dipilih bisa karena menarik, kekinian, atau karena derajat kepentingannya. Bahan yang diperdebatkan tidak harus bersifat faktual, tetapi yang penting bersifat problematik.

Lickona (2013, p. 85) berpendapat bahwa penggunaan bahasa yang baik dapat menciptakan sebuah budaya karakter karena bahasa dapat membentuk karakter. Karakter merupakan karakteristik dalam diri seseorang yang menunjukkan adanya pengetahuan dan keinginan untuk selalu berperilaku moral.

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor kesantunan peserta didik dalam mengemukakan pendapat sebelum dilakukan tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode *Active Debate* dan setelah tindakan pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 makin meningkat. Sebelum tindakan pembelajaran sebesar 45,54%; setelah tindakan pembelajaran dengan metode *Active Debate* pada siklus 1 sebesar 65,14%; dan setelah tindakan pembelajaran pada siklus 2 sebesar 80,54%.

Karakter kesantunan merupakan etika, yang dapat dikembangkan melalui pelatihan dalam proses pembelajaran dengan mengembangkan Pendidikan Etis Integratif melalui kepekaan etis, pertimbangan etis, fokus etis dan tindakan etis yang merupakan keterampilan penting bagi kecerdasan sosial dan emosional dan kehidupan yang baik pada umumnya. Keterampilan ini juga penting untuk menjadi warga negara global yang aktif. Para ahli kebijakan dalam Proyek Studi Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan mengidentifikasi nilai-nilai kebaikan atau karakter kesantunan yang harus dimiliki warga dunia abad 21 (Nucci & Narvaez, 2014, p. 464).

Dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa tentu ada aturan atau norma yang harus ditaati, bagaimana caranya berbahasa yang santun dan tidak benar jika ada budaya yang membiarkan masyarakatnya tidak menurut aturan kesantunan. Menggunakan suara de-

ngan keras atau pelanpun pasti ada norma-norma kesantunan (Chaer.2010, p. 5). Menurut Pranowo (2012, p. 126), bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Jika setiap orang mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun, hubungan antar manusia akan harmonis, suasana kehidupan akan tenang, cita-cita untuk mewujudkan keluarga, bangsa, dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera akan terwujud. Berkomunikasi menggunakan bahasa merupakan kebutuhan hakiki manusia. Ketika manusia sedang berpikir, mengungkapkan hasil pikiran mereka sudah menggunakan bahasa tidak mungkin tanpa bahasa. Begitu juga dengan mitra tutur, ketika menangkap informasi yang dikemukakan oleh penutur juga menggunakan bahasa. Informasi yang ditangkap dari penutur bisa berupa bahasa lisan, bahasa tulis, maupun bahasa nonverbal yang berupa tatapan mata, gerak-gerik anggota tubuh, lambaian tangan, tudingan dan lain-lain. Pertemuan manusia dalam komunikasi bisa menimbulkan dampak positif seperti suasana kondusif, kerja sama, penuh rasa cinta kasih, saling tenggang rasa dan sebagainya. Namun bisa juga berdampak negatif seperti misalnya terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik, salah paham, bertengkar, mengumpat, kebencian, iri, dengki, acuh tak acuh, bahkan adu fisik yang bisa diminimalisir jika komunikasi itu menggunakan bahasa yang santun.

Deskripsi Hasil Belajar Peserta Didik

Sebelum melakukan tindakan, peneliti terlebih dahulu melakukan *pretest* untuk mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan peserta didik kelas VIII F terhadap materi pelajaran PKn yang akan di ajarkan. Hal tersebut dimaksudkan agar tindakan pembelajaran yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran sehingga perkembangan penguasaan materi ajar oleh peserta didik dapat di ukur secara tepat pula. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan metode *Active Debate* dimaksudkan juga untuk memberi motivasi peserta didik agar dapat meningkatkan hasil belajarnya selain meningkatkan karakter kesantunan. Menurut Sanjaya (2013, p. 28), dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik kurang berprestasi bukan disebabkan karena kemampuannya yang kurang melainkan karena kurang adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak

berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Menurut Aunurrahman (2014, p. 114), motivasi adalah tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energy atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Motivasi sebagai suatu kekuatan yang mampu mengubah energi dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.

Peneliti membuat pembagian rentang nilai menjadi 5 bagian seperti tertulis pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Nilai yang Diperoleh Peserta Didik

Rentang Nilai	Kriteria
87 – 100	Sangat baik
73 – 86	Baik
60 – 72	Cukup
45 – 58	Kurang
0 – 45	Sangat kurang

Berdasarkan kriteria penilaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh guru PKn adalah 75. Oleh karena itu, peserta didik dikatakan berhasil tuntas dalam penguasaan pengetahuan materi ajar dalam pembelajaran jika dalam tes hasil belajar telah memperoleh skor minimal 45 atau setara dengan nilai KKM yaitu 75. Oleh karenanya dari 60 pertanyaan didalam tes hasil belajar, dapat dibuat kategori tingkat skor keberhasilan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan materi ajar seperti tertulis pada tabel berikut.

Tabel 4. Kriteria Perolehan Skor Hasil Belajar Berdasarkan KKM

Skor yang diperoleh	Kriteria
52 – 60	Sangat baik
44 – 51	Baik
36 – 43	Cukup
28 – 35	Kurang
0 – 27	Sangat kurang

Nilai hasil belajar sebelum dilakukan tindakan dan sesudah pelaksanaan siklus 1 seperti tertulis pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Belajar Peserta Didik sebelum Tindakan dan setelah Siklus 1

No.	Skor Sebelum Tindakan	Nilai Sebelum Tindakan	Skor Siklus 1	Nilai Siklus 1	Peningkatan (%)
1	38	63,46	43	71,81	13,16
2	35	58,45	40	66,80	14,29
3	35	58,45	39	65,13	11,43
4	38	63,46	47	78,49	23,68
5	40	66,80	52	86,84	30,00
6	37	61,79	41	68,47	10,81
7	37	61,79	42	70,14	13,51
8	43	71,81	45	75,15	4,65
9	36	60,12	39	65,13	8,33
10	39	65,13	46	76,82	17,95
11	35	58,45	42	70,14	20,00
12	33	55,11	40	66,80	21,21
13	37	61,79	47	78,49	27,03
14	37	61,79	41	68,47	10,81
15	38	63,46	44	73,48	15,79
16	37	61,79	39	65,13	5,41
17	32	53,44	45	75,15	40,63
18	33	55,11	41	68,47	24,24
19	34	56,78	43	71,81	26,47
20	36	60,12	44	73,48	22,22
21	34	56,78	48	80,16	41,18
22	39	65,13	49	81,83	25,64
23	42	70,14	53	88,51	26,19
24	38	63,46	45	75,15	18,42
25	36	60,12	40	66,80	11,11
26	36	60,12	47	78,49	30,56
27	35	58,45	45	75,15	28,57
28	36	60,12	47	78,49	30,56
29	34	56,78	46	76,82	35,29
30	33	55,11	43	71,81	30,30
31	33	55,11	45	75,15	36,36
32	36	60,12	46	76,82	27,78
Jml	1162	1940,54	1414	2361,38	703,58
	3200	3200	3200	3200	3200
Rerata	36,31	60,64	44,19	73,79	21,99

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dilakukan penilaian. Penilaian mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran, menurut Basuki & Hariyanto (2015, p. 8) definisi tentang penilaian adalah proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang keberhasilan belajar peserta didik secara keseluruhan dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Nilai hasil belajar pada pelaksanaan siklus 1 dan sesudah pelaksanaan siklus 2 seperti tertulis pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Belajar Peserta Didik pada Siklus 1 dan Siklus 2

No.	Skor Siklus 1	Nilai Siklus 1	Skor siklus 2	Nilai siklus 2	Peningkatan (%)
1	43	71,81	47	78,49	9,30
2	40	66,80	46	76,82	15,00
3	39	65,13	45	75,15	15,38
4	47	78,49	49	81,83	4,26
5	52	86,84	54	90,18	3,85
6	41	68,47	46	76,82	12,20
7	42	70,14	46	76,82	9,52
8	45	75,15	47	78,49	4,44
9	39	65,13	45	75,15	15,38
10	46	76,82	48	80,16	4,35
11	42	70,14	46	76,82	9,52
12	40	66,80	48	80,16	20,00
13	47	78,49	50	83,50	6,38
14	41	68,47	47	78,49	14,63
15	44	73,48	49	81,83	11,36
16	39	65,13	46	76,82	17,95
17	45	75,15	47	78,49	4,44
18	41	68,47	45	75,15	9,76
19	43	71,81	48	80,16	11,63
20	44	73,48	47	78,49	6,82
21	48	80,16	53	88,51	10,42
22	49	81,83	52	86,84	6,12
23	53	88,51	55	91,85	3,77
24	45	75,15	49	81,83	8,89
25	40	66,80	42	70,14	5,00
26	47	78,49	50	83,50	6,38
27	45	75,15	48	80,16	6,67
28	47	78,49	50	83,50	6,38
29	46	76,82	48	80,16	4,35
30	43	71,81	47	78,49	9,30
31	45	75,15	48	80,16	6,67
32	46	76,82	48	80,16	4,35
Jml	1414	2361,38	1536	2565,1	284,48
	3200	3200	3200	3200	3200
Rerata	44,19	73,79	48,00	80,16	8,89

Berdasarkan data pada tabel 5 dan 6 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai penguasaan pengetahuan peserta didik terhadap materi ajar sebelum tindakan pembelajaran menggunakan metode *Active Debate* dan setelah tindakan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 makin meningkat. Sebelum tindakan pembelajaran sebesar 60,64 setelah tindakan pembelajaran siklus 1 sebesar 73,79 dan setelah tindakan pembelajaran siklus 2 sebesar 80,16. Penerapan tindakan pembelajaran dengan menggunakan metode *Active Debate* dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan materi ajar yang lebih baik. Hal tersebut, terlihat adanya peningkatan nilai hasil belajar peserta didik pada tiap siklus, pada siklus 1 kemampuan dalam penguasaan penge-

tahuan peserta didik meningkat dengan rata-rata sebesar 13,15 atau sebesar 21,99% dan pada siklus 2 meningkat rata-rata sebesar 6,37 atau sebesar 8,89 %. Tingkat kemampuan penguasaan pengetahuan peserta didik terhadap materi ajar pada akhir tindakan 2 rata-ratanya mencapai sebesar 80,16 dan nilai tersebut setelah dimasukkan ke dalam kategori rentangan skor masuk pada tingkat kategori baik dengan persentase sebesar 80,16 %. Hal tersebut dikarenakan, dalam pembelajaran menggunakan metode *Active Debate*, peserta didik akan semakin terpacu dan termotivasi untuk betul-betul belajar agar mampu menguasai materi ajar sehingga dapat berdebat dengan baik dan lancar serta sesuai dengan materi ajar. Hal demikian itu otomatis menjadikan para peserta didik betul-betul dapat menguasai pengetahuan materi ajar yang diajarkan oleh guru. Akhirnya saat mereka diberikan test hasil belajar penguasaan pengetahuan materi ajar yang telah diajarkan yang berupa ulangan harian dapat memberikan jawaban yang tepat dan benar.

Berdasarkan tingkat keberhasilan belajar secara klasikal yang telah ditetapkan sebesar 85 %, berdasarkan perhitungan ternyata telah mencapai 87,50 %, yang berarti telah melampaui target minimal ketuntasan belajar secara klasikal. Untuk 4 peserta didik yang belum berhasil memperoleh nilai penguasaan materi ajar minimal sesuai KKM yang ditetapkan, dimungkinkan karena memang kemampuan dan kecerdasan berfikirnya rendah dan hal tersebut perlu dikaji lagi berdasarkan data-data lain yang mendukung salah satunya perlu konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Akan tetapi apabila hal tersebut ingin diselesaikan secara mudah dan praktis maka cukup peserta didik tersebut diberikan remedial pembelajaran atau diberikan tugas-tugas khusus yang menyangkut dengan materi ajar yang ada untuk menambah nilai mencapai batas KKM yang ditetapkan.

Pembelajaran dengan metode *Active Debate* menurut peneliti tepat digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik sekaligus peningkatan kemampuan dalam menyampaikan pendapat dengan baik dan santun. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul ditabulasi kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Kaufman dkk berpendapat,

The function analysis process analyzes what should be accomplished and gives

the proper order of subordinate, lower-order products (e.g., jobs or tasks), required to achieve the mission objective and its performance requirements. Function analysis: analyzes, identifies, and orders (Kaufman, 1996, p. 134)

Proses analisa berfungsi untuk menganalisis apa yang harus dicapai dan memberikan urutan yang tepat dari yang terendah, hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi analisis untuk menganalisa, mengidentifikasi dan memberi perintah. Analisis data dalam penelitian tindakan ini adalah untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi peningkatan hasil belajar dan kesantunan belajar peserta didik pada diri peserta didik seperti yang diharapkan. Selanjutnya diperspektifkan ke dalam tetapan hasil kualitatif.

Deskripsi Data secara Analisis

Hasil uji t pada tahap sebelum tindakan pembelajaran dengan setelah tindakan pembelajaran siklus 1 diperoleh nilai t-hitung sebesar -20.601. Untuk hasil uji t antara tahap sebelum tindakan pembelajaran dengan setelah tindakan pembelajaran siklus 2, nilai t-hitung sebesar -30.005. Begitu pula untuk tahap pembelajaran antara siklus 1 dengan siklus 2 diperoleh nilai t-hitung sebesar -31.871. Nilai t hitung pada masing-masing tahap tindakan pembelajaran tersebut ternyata harganya lebih kecil dari nilai t-tabel = 2.042 pada taraf sig.0.05

Berdasarkan uji beda nyata terhadap perubahan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah mengalami tindakan pembelajaran menggunakan metode *Active Debate* pada tiap tahap tindakan menggunakan uji t, diperoleh nilai t-hitung masing-masing tahap nilainya lebih kecil dari nilai t-tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pembelajaran dengan metode *Active Debate* meningkatkan hasil belajar dan karakter kesantunan peserta didik dalam pembelajaran PKn dengan ditandai meningkatnya skor nilai penguasaan pengetahuan dan meningkatnya skor kesantunan belajar peserta didik dengan menunjukkan perbedaan secara nyata dan signifikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan metode *Active Debate* peserta didik

terdorong untuk lebih mempersiapkan diri dalam menguasai materi pembelajaran karena peserta didik berusaha agar dalam pembelajaran dapat menyampaikan pendapat dan dapat berargumentasi lebih baik.

Dengan debat peserta didik dapat dilatih sejak awal untuk terbiasa mengimplementasikan apa yang dipikirkannya secara kritis. Hanya dengan kebebasan berpikirlah peserta didik dapat berkembang. Peserta didik dapat belajar untuk berargumentasi, beratih diri untuk berani mengemukakan pendapat dan guru dapat berperan untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik tentang karakter kesantunan didalam mengemukakan pendapat.

Guru dapat berperan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dengan baik sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan metode *Active Debate* agar peserta didik dapat menyampaikan argumentasi dengan baik dan kritis dan argumentasi itu dapat diperoleh jika peserta didik menguasai materi pembelajaran dengan baik sebelum pembelajaran dengan metode debat dimulai. Dengan mempelajari materi yang akan diajarkan terlebih dahulu maka penguasaan materi oleh peserta didik menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan hasil belajarnya.

Motivasi dari guru diperlukan mengingat peserta didik sebagaimana individu pada umumnya selalu memerlukan dorongan atau motivasi untuk melakukan sesuatu atau menentukan arah perbuatannya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Peran guru dalam kegiatan pembelajaran sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Guru harus dapat meyakinkan peserta didik bahwa hasil belajar akan didapat dengan baik jika peserta didik merasa bahwa hasil belajar yang baik adalah merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan memanfaatkan metode pembelajaran *Active Debate* maka peserta didik dapat belajar melalui pengalaman langsung tentang cara berbicara atau mengemukakan pendapat dengan baik dan santun. Dengan mengalami secara langsung akan lebih efektif untuk membina sikap santun dalam berpendapat, mempertahankan argumentasi dengan baik, terampil bertanya, mampu menunjukkan cara berpikir kritis dan lain-lain. Metode dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik sekaligus

dapat meningkatkan karakter kesantunan dalam mengemukakan pendapat.

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran agar para guru di SMP maupun SMA dapat menerapkan metode *Active Debate* untuk meningkatkan hasil belajar peserta didiknya maupun untuk melatih karakter kesantunan baik dalam bersikap, emosi, maupun tutur kata.

Metode *Active Debate* sangat tepat untuk diterapkan oleh guru mata pelajaran PKn di sekolah masing-masing karena guru dapat melakukan penilaian secara langsung terhadap karakter dan sikap peserta didik terutama dalam mengemukakan pendapat serta sekaligus dapat melakukan pembimbingan untuk mengemukakan pendapat dengan baik dan santun. Kalau diterapkan di SD kemungkinan masih belum bisa dilaksanakan. Kalau mencoba dilaksanakan kemungkinan para guru masih harus bersabar dalam melakukan pembimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqib, Z. (2015). *Pendidikan karakter di sekolah*. Membangun karakter dan kepribadian anak. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aunurrahman. (2014). *Belajar dan pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Basuki, I & Hariyanto. (2015). *Asesmen pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan berbahasa*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dananjaya, U. (2012). *Media pembelajaran aktif*. Bandung: Nuansa
- Daryanto & Rahardjo, M. (2012). *Model pembelajaran inovatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huda, M. (2015). *Model-model pengajaran dan pembelajaran. Isu-isu metodis dan paradigmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kunandar. (2014). *Penilaian autentik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Kaufman, R & Herman, J & Watters, K.(2002). *Education planning, strategic tactical operational*. USA. Manufactured.
- Lickona, T. (2013). *Character matters. Persoalan karakter. Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Majid, A. (2015). *Strategi pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nucci, L, P & Narvaez, D. (2014). *Handbook pendidikan moral dan karakter*. Bandung. Nusa Media.
- Pranowo. (2012). *Berbahasa secara santun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwanto, N.(2004). *Psikologi pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Risthantri, P., & Sudrajat, A. (2015). Hubungan antara pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun peserta didik. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(2), 191-202. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/7670>
- Samsuri.(2011). *Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana membangun karakter warganegara demokratis*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sanjaya, W. (2013). *Strategi pembelajaran. Berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Semi, A.(2008). *Terampil berdiskusi dan berdebat*. Bandung: Angkasa
- Sukardi.(2011). *Statistika pendidikan untuk penelitian dan pengelolaan lembaga diklat*. Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Sukardi.(2013). *Metode penelitian pendidikan tindakan kelas implementasi dan pengembangannya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Warsono & Hariyanto.(2013). *Pembelajaran aktif, teori dan asesmen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zamroni. (2014). *Percikan pemikiran pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Ombak.



**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DEMOKRATIS MELALUI
PEMBELAJARAN PPKn PADA SISWA KELAS XII**

Endrise Septina Rawanoko *¹, Wuri Wuryandani¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: endriseseptina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter demokratis pada siswa di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang melalui pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data saat proses pembelajaran berlangsung. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari guru dan siswa di SMA Negeri 1 Kesamben Kabupaten Jombang. Data dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa perangkat pembelajaran yang dimiliki guru yaitu RPP. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai karakter demokratis di masukkan guru melalui mata pelajaran PPKn dengan menggunakan metode diskusi. Sedangkan evaluasi dari penanaman karakter demokratis dilakukan dengan evaluasi tertulis dan tidak tertulis untuk melihat *moral knowing*, *moral feeling*, and *moral action*.

Kata Kunci: *pendidikan karakter demokratis, pembelajaran PPKn*

***THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CHARACTER EDUCATION THROUGH
PANCASILA AND CIVIC IN GRADE XII***

Abstract

This research was aimed to explain the implementation of a democratic character education through Pancasila and civics in grade XII students of senior high school. This was a descriptive qualitative study. The research data were collected through observation, interview and documentation. The observation was used to obtain data during the learning process. Interview was used to obtain data from the teacher and students in Senior High School in Kesamben Jombang Regency. The document used as information research way a set of lesson plan. Data validity of this research was obtained through triangulations technique (observation, interview, and documentation) and data theory verification. Data analyses used were data reduction, data presentation, and data verification. This research showed that the implementation of a democratic character education through the Pancasila and civics in grade XII students of senior high school could be applied well using a discussion learning method. The evaluation for character democratic used written evaluation and non test evaluation for know a moral knowing, moral feeling, and moral action.

Keywords: *democratic character education, Pancasila and civic learning*

Pendahuluan

Pendidikan karakter saat ini dibutuhkan untuk meminimalisir kemerosotan moral anak didik. Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan dan masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (Presiden Republik Indonesia, 2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemerosotan moral anak didik dapat dilihat dari fenomena tawuran antarpelajar yang semakin hari semakin marak, dan perilaku anarkisme yang semakin memecah belah Indonesia.

Merubah karakter anak didik membutuhkan pembiasaan yang secara terus menerus untuk mengoptimalkan hasil pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak terbentuk secara instan melainkan melalui proses yang panjang, untuk menghasilkan sikap yang positif dibutuhkan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, pembiasaan untuk bersikap sopan, dan lain sebagainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Anarkisme yang semakin marak terjadi akibat kurangnya implementasi karakter demokratis. Seharusnya hal ini dapat diminimalisir oleh pihak sekolah melalui pembelajaran PPKn untuk mengimplementasikan karakter demokratis sehingga dapat membekali siswa-siswi di SMA muatan karakter yang positif. Pendidikan karakter demokratis bagi siswa sangat dibutuhkan, karena muatan karakter demokratis merupakan suatu cara berpikir dan bertindak memiliki kedudukan yang sama antara hak dan kewajiban. Kivisto & Faist (2007, p. 51) dalam bukunya *Citizenship: Theory, and Transnasional Prospects* menyatakan bahwa *"The citizen in modern democracies has a right to participate political decision making*. Berdasarkan pada teori tersebut warganegara pada demokrasi modern memiliki hak untuk membuat keputusan pada partisipasi politik. Demokrasi pada saat ini meletakkan partisipasi warga negara pada konten sebagai hak warga negara bukan kewajiban warga negara, sehingga dengan demikian negara harus bekerja lebih

giat untuk membuat warga negara turut berpartisipasi dalam demokrasi.

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah dapat diintegrasikan dalam proses belajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Muatan pendidikan karakter dapat disesuaikan pada mata pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang paling berkompeten untuk menyampaikan karakter demokratis, karena materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipraktikkan (Kurniawan, 2013, p. 47).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dipandang dapat menjadi wahana pembentuk karakter demokratis. Perilaku demokrasi di Indonesia masih banyak disalah artikan oleh mayoritas warga negara Indonesia. Demokrasi masih banyak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dalam bertindak dan berekspeksi tanpa menghiraukan hak-hak asasi orang lain. Sebagai sebuah bangsa yang didirikan dengan modal persamaan nasib serta cita-cita yang bersendikan pada nilai-nilai luhur yang terkristalkan ke dalam dasar negara Pancasila, demokrasi dapat menjadi pilar penjaga karakter Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 8).

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan rakyat bebas menentukan pilihannya dan bebas menyuarakan pendapatnya. (Robinson, 1996, p. 623) menjelaskan: *"Since democracy is a universal aspiration and the claim to promote it has mass appeal, "democracy promotion" has a crucial ideological dimension"*. Demokrasi adalah aspirasi universal dan tuntutan untuk mempromosikannya memiliki daya tarik massa (masyarakat), promosi demokrasi sebagai dimensi ideologis yang penting. Berdasarkan pada teori Robinson bahwa demokrasi adalah suatu aspirasi masyarakat dan merupakan alat politik untuk menarik massa (masyarakat) pada suatu Pemilu.

Demokrasi di Indonesia sudah menjadi pilihan yang tepat, dibandingkan dengan sistem lainnya. Namun, demokrasi di Indonesia merupakan hal yang mahal karena suara rakyat bisa dibeli dengan uang. Hal ini semakin marak ketika diadakan Pilkada pada tahun 2015, karena rakyat Indonesia dapat menyuarakan pilihan kepada siapa mereka ingin dipim-

pin melalui Pilkada. Kasus yang menyita perhatian publik adalah dengan adanya kerusuhan saat kampanye terbuka yang diadakan pada hari Minggu, 22 November 2015. Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan, petugas telah mengamankan puluhan kayu, balok, dan senjata tajam saat kampanye terbuka. Selain itu, petugas juga mengamankan beberapa minuman beralkohol. Aksi anarkis yang dilakukan saat kampanye terbuka adalah perusakan dan penganiayaan mobil Toyota Yaris (Jawa Pos, Selasa 24 November 2015).

Menjelang Pilkada 2015 banyak kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Anarkisme yang dilakukan oleh beberapa massa pendukung calon bupati merupakan salah satu dampak negatif yang dapat merugikan orang lain. Sementara itu, menjelang pilkada di Sleman Polisi intensifkan razia pada Jum'at, 27 November 2015. Kapolres Sleman, AKBP Faried Zulkarnain mengatakan razia ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya keributan antarpemilih karena pengaruh miras selama proses pilkada. Razia juga dilakukan agar Sleman tetap dalam keadaan kondusif. Pengungkapan kasus peredaran juga terjadi di wilayah Godean (Tribun Jogja, Jum'at 27 November 2015).

Sementara itu aksi anarkisme di Jombang kembali terjadi. Siswa STM YP 17 Jombang menyerang siswa MAN 3 Jombang. Puluhan siswa STM YP 17 Jombang ini menyerang melalui pintu belakang sekolah MAN 3 Jombang, akibatnya sebanyak 4 siswi MAN 3 Jombang langsung pingsan (Memo Timur On Line, 31 Januari 2015).

Pentingnya pendidikan karakter demokratis sangat berhubungan dengan partisipasi masyarakat pada kegiatan politik. Melalui kegiatan politik seperti pemilihan umum maka masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya melalui hak pilih. Biesta (2011, p. 1) menyampaikan bahwa *"learning and democratic citizenship from this wider angle, emphasizing the importance of the democratic quality of the processes and practices that make up the everyday lives of children, young people and adults for there on going formation as democratic citizens. In other word democracy is learned in school and in society."*

Berdasarkan penjelasan Biesta pembelajaran dan warga negara demokratis dari sudut pandang yang lebih luas, menekankan pentingnya kualitas demokratis dari proses dan

praktek yang membentuk kehidupan sehari-hari pada anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk menunjukkan pembentukan sebagai warga negara demokratis. Dengan kata lain, demokrasi dipelajari di sekolah dan masyarakat. Warga negara dapat mempelajari demokrasi baik di sekolah dan masyarakat melalui proses dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karakter demokratis sebagai pendukung dalam kegiatan politik agar masyarakat bisa memiliki sikap positif pada kegiatan pemilu. Pada siswa kegiatan politik dimulai saat mereka melakukan pemilihan ketua OSIS, dan akan berlanjut saat mereka menginjak pada usia 17 tahun, yaitu saat mereka menginjak kelas XII SMA, diusia itu siswa dapat menyuarakan hak pilih mereka dalam Pemilu.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah suatu jenjang pendidikan formal yang ada di Indonesia. Umumnya pelajar SMA berusia antara 16-18 tahun. Pada usia 17 tahun siswa bisa memberikan aspirasi saat Pemilu maupun Pilkada, karena pada usia 17 tahun seluruh penduduk Indonesia memiliki hak untuk memilih. Dengan adanya hak pilih maka siswa bisa memilih calon legislatif ataupun calon presiden yang mereka inginkan. Pada akhirnya akan ada calon terpilih dan tidak terpilih, ketika pilihan mereka tidak terpilih maka akan rentan adanya protes yang dipicu dengan perpecahan. Untuk itu para siswa-siswi di SMA khususnya pada kelas XII harus dibekali dengan pendidikan yang dapat memunculkan nilai-nilai demokrasi mereka agar mereka tidak mudah terpecah dengan adanya perbedaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah satu pelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi karena pada mata pelajaran ini banyak muatan yang positif mengenai warga negara yang baik, demokrasi, rasa cinta tanah air, juga hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aziz & Sapriya (2011, p. 42) menegaskan proses pendidikan demokrasi yang sangat strategis khususnya untuk generasi mendatang adalah melalui proses pembelajaran di lingkungan masyarakat sekolah. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa-siswi agar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa-siswa dipersiapkan untuk dapat berperan aktif sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban-

nya dan menjadi warga negara yang mempunyai rasa demokrasi dan toleransi yang tinggi karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat.

Dalam masyarakat demokratis, semua masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, PPKn dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Bersandar pada ketetapan perundangan ini, keberadaan inovasi pendidikan demokrasi dan HAM yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan sebuah instrumen pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 4).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah merupakan salah satu sarana untuk membentuk siswa memiliki karakter demokratis. Bahmueller & Patrick (1999, p. 10) menyampaikan bahwa “*The first objective of education for democratic citizenship is to teach thoroughly what a democracy is, and what it is not.*” Tujuan pertama pendidikan untuk warga negara demokratis adalah untuk mengajarkan apa itu demokrasi dan apa yang bukan demokrasi. Jadi melalui PPKn adalah wadah yang dimiliki oleh guru untuk membekali siswa memiliki sikap demokratis sebelum siswa itu terjun di masyarakat. (Aziz & Sapriya, 2011, p. 35) menambahkan bahwa PPKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warganegara untuk kemajuan diri dan lingkungannya. Melalui pembelajaran PPKn dapat menghasilkan warga negara yang cerdas dalam berdemokrasi untuk kemajuan diri dan lingkungannya.

Sebagai wahana PPKn yang demokratis maka kurikulum dan pembelajaran pada PPKn memerlukan pembenahan untuk mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada sikap demokrasi. Guru sebagai tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas belajar meng-

ajar harus menguasai kompetensi dan aspek keilmuan sesuai dengan bidang mata pelajarannya masing-masing. Dalam bidang PPKn maka guru dituntut untuk menanamkan pilar-pilar kebangsaan pada anak didik.

Pentingnya pendidikan karakter demokratis bagi pelajar merupakan bagian integral dari PPKn, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan individu menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizens*). Bernstein (2008, p. 6) menyatakan “*As a society, we must learn how to inject politics with civility; failure to do so can have the effect of turning young people off to politics even more than they are today*”. Sebagai warganegara, kita harus mempelajari bagaimana cara berpolitik dengan kesopanan, kegagalan dalam melakukannya dapat menimbulkan efek balik pada anak-anak muda yang saat ini berada di dunia politik. Maka itu, internalisasi karakter demokrasi dalam pembelajaran PPKn di sekolah menuntut perubahan cara berpikir, terutama bagi para pengambil keputusan pendidikan di pusat dan di daerah dalam menyikapi dan memprogramkan pendidikan karakter demokrasi bagian integral dari PPKn dan proses demokratisasi secara keseluruhan. Secara tidak langsung memasukkan karakter demokratis pada pembelajaran PPKn akan mempengaruhi cara berpikir semua orang di lingkungan tersebut, baik itu guru, siswa, dan masyarakat luas.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kesamben berada di Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur. Merupakan salah satu Sekolah yang sangat mendukung pengembangan karakter demokratis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, siswa siswi di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang sangat aktif dalam berdemokrasi, contohnya pada pemilihan anggota OSIS. Pada saat pemilihan OSIS siswa siswi yang ada di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang tanpa adanya paksaan dan dengan kesadaran yang tinggi sebagai salah satu sarana melakukan pembiasaan dalam karakter demokrasi. Selain itu, karakter demokrasi dapat dilihat setelah adanya pemilihan anggota OSIS siswa siswi SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang dapat menerima dengan lapang dada keputusan yang ada, baik menang ataupun kalah dalam berpartisipasi. Dapat dipastikan tidak ada pergolakan yang berarti di SMAN 1 Kesamben Ka-

bupaten Jombang setelah diadakannya pemilihan anggota OSIS.

Nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh siswa-siswi SMAN Kesamben Kabupaten Jombang dapat dilihat melalui kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswi SMAN Kesamben Kabupaten Jombang antara lain; paskibra, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), karawitan, sepak bola, basket, menari, paduan suara, dan jurnalistik. Ekstrakurikuler yang ada di sekolah menjembatani apresiasi siswa-siswi agar dapat mewedahi bakat-bakat yang dimiliki, selain itu berbagai macam ekstrakurikuler adalah wujud sekolah yang demokratis karena memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kesamben Kabupaten Jombang menjembatani kegiatan demokrasi dalam pemilihan OSIS. Untuk menyuarkan hak pilihnya pada pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada seorang pemilih harus berusia 17 tahun. Usia 17 tahun pada tingkat sekolah yaitu pada jenjang pendidikan di SMA yang berada pada kelas XII, untuk itu siswa siswi di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang perlu pendidikan karakter demokratis yang lebih intensif agar pada saat Pemilu mereka tidak terjerumus dalam kerusuhan kampanye menjelang Pemilu, maupun pasca Pemilu.

Pada masyarakat luas pesta demokrasi merupakan suatu ajang aspirasi rakyat dalam menyuarkan pilihannya melalui Pemilu. Kerusuhan kampanye menjelang Pemilu sering mewarnai pesta demokrasi di masyarakat. Salah satu cara untuk meminimalisir adanya kerusuhan saat kampanye baik menjelang Pemilu maupun setelah Pemilu maka dibutuhkan pendidikan karakter demokratis. Pendidikan karakter demokratis yang lebih intensif diberikan pada siswa siswi SMA khususnya pada kelas XII, karena pada saat siswa-siswi kelas XII memiliki usia 17 yang memiliki hak untuk memilih atau menyuarkan pendapatnya saat pemilu berlangsung. Tujuan pendidikan karakter demokratis diberikan pada peserta didik tidak hanya untuk membekali saat Pemilu dan politik saja, akan tetapi karakter demokratis juga dibutuhkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi karakter

demokratis melalui pembelajaran PKn kelas XII di SMA, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn kelas XII di SMA.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifat dan tujuannya merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sugiyono, 2014, p. 6). Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Penelitian kualitatif deskriptif suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok.

Penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan yang lengkap mendukung data yang diperoleh. Mengungkap gejala-gejala yang ada yang mendeskripsikan implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn di kelas XII SMA

Penentuan tempat lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa di SMAN 1 Kesamben Jombang yang berada di Jombang memiliki karakter demokrasi yang lebih unik dari pada sekolah lainnya, peserta didik aktif dan berani menyampaikan pendapat dari pada di sekolah lain.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2016. Pengumpulan data menggunakan; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi karakter demokratis melalui ma-

ta pelajaran PKn yang di lakukan pada kelas XII SMAN 1 Kesamben Jombang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pertama, dilakukan melalui pembelajaran PKn yang tertuang dalam RPP. Kedua, dilakukan dalam proses pembelajaran disekolah baik di dalam kelas maupun diluar kelas.

Pada pelaksanaan pembelajaran metode pembelajaran yang digunakan oleh guru PPKn adalah diskusi, diskusi adalah cara efektif memunculkan sikap demokratis pada siswa. Metode diskusi adalah cara metode pembelajaran dimana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Proses belajar mengajar terjadi pada saat diskusi berlangsung yaitu saat interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah.

Pada dasarnya penggunaan metode pembelajaran tidak hanya diskusi saja, banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi seperti (1) metode proyek; (2) metode eksperimen; (3) metode tugas dan resitasi; (4) metode sosiodrama; (5) metode demonstrasi; (6) metode problem solving (7) metode karyawisata; dan (8) metode latihan (Djamarah & Zain, 2013, p. 7).

Pada implementasi pendidikan karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn pada siswa kelas XII di SMA tidak hanya metode saja yang berpengaruh dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, namun guru adalah komponen terpenting. Guru dituntut untuk dapat melakukan tiga hal yaitu: (1) kemampuan membuka dan menutup pelajaran, (2) kemampuan menjelaskan materi pelajaran, (3) kemampuan memotivasi peserta didik agar berani bertanya (Suyadi, 2013, p. 19). Ketiga kemampuan dasar diatas dapat dipraktikkan oleh guru dalam pembelajaran sehingga guru dapat terampil untuk menerapkan pembelajaran berkarakter.

Pendidikan karakter demokratis dibutuhkan, ada 3 pendekatan di sekolah untuk mendidik warga negara yang demokratis, dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

“(1) The first approach utilises citizenship theory that argues citizenship is a legal status of rights and responsibilities in a democratic system. (2) A second approach contends that citizenship is about active

participation within societal structures and processes, such as voting and engaging in civic activities in the context of a democracy. (3) Third, citizenship is more about supporting participation of all people in a democracy, Print (2008).”

Penjelasan Print mengkategorikan tiga pendekatan di sekolah untuk mendidik warga negara yang demokratis yaitu: (1) Pendekatan pertama menggunakan teori kewarganegaraan bahwa kewarganegaraan adalah status hukum hak dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam sistem demokrasi. Sehingga pendidikan kewarganegaraan demokrasi harus mempersiapkan cara untuk memahami dan bertindak atas hak dan tanggung jawab sebagai warganegara. (2) Teori kedua berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah tentang partisipasi aktif dalam masyarakat dalam kegiatan sipil dalam konteks dari demokrasi, sehingga pendidikan untuk kewarganegaraan aktif memerlukan keaktifan dalam partisipasi masyarakat maupun pemerintahan. (3) Teori ketiga berpendapat bahwa kewarganegaraan adalah bagaimana cara mendukung partisipasi semua orang dalam demokrasi, di mana warganegara mengejar keadilan social untuk mengubah kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan RPP yang dibuat oleh guru kegiatan inti pembelajaran menggunakan diskusi kelas. Proses pembelajaran PPKn yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan dengan cara diskusi di kelas sehingga memunculkan hak dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam sistem demokrasi, sehingga siswa-siswi bertindak atas hak dan tanggung jawab sebagai warganegara yang baik, selain itu memunculkan partisipasi aktif dalam berpendapat. Djamarah & Zain (2013, p. 13) menjelaskan bahwa metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Proses belajar mengajar terjadi, interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah.

Implementasi pendidikan karakter demokratis dibentuk untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, yang meliputi nilai-nilai demokrasi adalah toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, me-

mahami keanekaragaman dalam bermasyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri atau tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni, 2001, p. 32). Untuk menumbuhkan karakter demokratis maka dibutuhkan suatu pengetahuan moral, perasaan moral, dan aksi moral. Lickona (1991, p. 53) menjelaskan:

“components of good character is: (1) moral knowing (moral awareness, knowing moral values, perspective-taking, moral reasoning, decision-making, dan self-knowledge); (2) moral feeling (conscience, self esteem, empathy, loving the good, self-control, humility); and (3) Moral action (competence, will, habit).”

Komponen karakter yang baik yaitu: (1) pengetahuan moral (kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, mengambil sudut pandang, penalaran moral, pengambilan keputusan, pengetahuan tentang diri sendiri); (2) perasaan tentang moral (hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, kerendahan hati); (3) tindakan moral (kompetensi, keinginan, kebiasaan). Pengetahuan moral yang merupakan kesadaran tentang moral, pengetahuan nilai-nilai moral, serta sudut pandang moral yang menjadi tolak ukur baik tidaknya perilaku. Sedangkan perasaan moral yang merupakan hati nurani, empati, mencintai kebaikan, dan pengendalian diri mengantarkan diri memiliki hati nurani yang baik dan pada akhirnya akan melakukan tindakan moral yang baik. Untuk menumbuhkan *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* maka dibutuhkan adanya strategi untuk mengintegrasikan dalam karakter siswa.

Lickona (1997, pp. 66-76) menambahkan komponen di kelas dalam membentuk pendidikan karakter, sebagai berikut:

“Classroom components are: (1) The teacher as caregiver, moral, model, and moral mentor. (2) Creating a caring classroom community. (3) Moral discipline. (4) Creating a democratic classroom environment. (5) Teaching values through the curriculum. (6) Cooperative learning. (7) The conscience of craft. (8) Ethical reflection. (9) Teaching conflict resolution.”

Komponen dalam membentuk pendidikan karakter di ruang kelas yaitu: (1) guru sebagai pengasuh, moral, model, dan mentor moral; (2) menciptakan kelas yang peduli pada kelompoknya; (3) disiplin moral; (4) menciptakan lingkungan kelas yang demokratis; (5) mengajarkan seluruh nilai pada kurikulum; (6) pembelajaran secara kerja sama; (7) menggunakan hati nurani; (8) merenungkan etika; (9) mengajarkan penyelesaian konflik. Komponen dalam membentuk pendidikan karakter di ruang kelas ada 9 yang menitik beratkan peran guru sebagai pengasuh moral, model, dan mentor moral. Guru dituntut untuk menciptakan kelas yang demokratis melalui pengajaran nilai dan pembelajaran kerjasama dan mengajarkan penyelesaian konflik.

Penerapan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai strategi pengintegrasian, berdasarkan hasil wawancara guru melakukan strategi keteladanan, kegiatan spontan, teguran, dan pengkondisian lingkungan untuk pengintegrasian nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh pendapat (Muslich, 2011, pp. 175-176) yang menjelaskan ada 5 macam strategi yaitu dalam kegiatan sehari-hari sebagai berikut: (1) keteladanan atau contoh; (2) kegiatan spontan; (3) teguran; (4) pengkondisian lingkungan; dan (5) kegiatan rutin.

Pendidikan karakter di sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua pelajaran. Hal ini bertujuan untuk penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh. Penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai yang dirujuk oleh sekolah (Kesuma, Triatna, & Permana, 2013, pp. 5-6). Sekolah merupakan tempat bagi siswa untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan perilaku didasari oleh nilai seperti penjelasan (Lickona, 1991, p. 102) bahwa:

“There are least ten good reasons why schools should be making a clearheaded and wholehearted commitment to teaching moral values and developing good character: (1) There is a clear and urgent need. (2) Transmitting values is and always has been the work of civilization. (3) The school’s role as moral educator becomes even more vital at a time when

millions of children get little moral teaching from their parents and when value-centered influences such as church or temple are also absent from their lives. (4) There is common ethical ground even in our value-conflicted society. (5) Democracies have a special need for moral education, because democracy is government by the people themselves. (6) There is no such thing as value-free education. (7) Moral questions are among the great questions facing both the individual person and the human race. (8) There is broad-based, growing support for values education in the schools. (9) An unabashed commitment to moral education is essential if we are to attract and keep good teachers. (10) Values education is a double job."

Pada penjabaran Lickona ada 10 alasan positif mengapa sekolah harus mengajarkan nilai-nilai moral dan membangun karakter yang baik bagi anak didiknya. Sekolah harus berperan maksimal untuk memberikan pengajaran moral agar tidak terjadi kemerosotan nilai di masyarakat. Pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru PPKn di SMA Negeri 1 Kesamben adalah menumbuhkan karakter demokratis melalui pembelajaran, agar mereka peduli terhadap hak-hak orang lain dan harus melaksanakan kewajibannya sebagai tanggung jawab warga negara yang demokratis.

Membangun karakter di sekolah bukan merupakan hal yang mudah, karena ini merupakan sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan. Karakter adalah ukuran utama dari seorang individu dan juga ukuran utama dari sebuah bangsa. Kesadaran dalam membangun karakter untuk mengajarkan nilai-nilai positif menjadi kebutuhan yang mendesak karena untuk merombak sebuah bangsa yang berkarakter maka dibutuhkan perombakan pada individunya yaitu melalui pendidikan.

Implementasi pendidikan karakter demokratis tidak hanya dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas saja, namun dapat diintegrasikan dalam budaya sekolah. Pengintegrasian budaya sekolah di SMAN Kesamben Kabupaten Jombang dapat dilihat melalui kegiatan yang ada di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa-siswi SMAN

Kesamben Kabupaten Jombang antara lain; paskibra, pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), karawitan, sepak bola, basket, menari, paduan suara, dan jurnalistik.

Ekstrakurikuler yang ada di sekolah menjembatani apresiasi siswa-siswi agar dapat mewadahi bakat-bakat yang dimiliki, selain itu berbagai macam ekstrakurikuler adalah wujud sekolah yang demokratis karena memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan. Sesuai teori (Wibowo, 2012, pp. 83-91) Pengintegrasian pendidikan karakter dalam budaya sekolah yaitu: (1) Kelas; (2) Sekolah; (3) Luar sekolah yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik.

Implementasi pendidikan karakter demokratis dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas dan dapat diterapkan melalui budaya sekolah. Implementasi pendidikan karakter demokratis yang diterapkan melalui pembelajaran di kelas dapat diintegrasikan melalui pembelajaran PPKn. Sedangkan implementasi pendidikan karakter demokratis yang diterapkan melalui budaya sekolah salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan evaluasi yang dilakukan guru untuk melihat penerapan karakter disiplin dilakukan dengan menggunakan skala sikap. Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya, afeksi berkenaan dengan perasaan dalam menanggapi objek tersebut, sedangkan konasi berkenaan dengan kecenderungan berbuat terhadap objek tersebut. Skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden, apakah pernyataan itu didukung atau ditolakinya, melalui rentangan nilai tertentu. Sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik di SMAN 1 Kesamben Jombang berkarakter demokratis sesuai dengan konasi yang mereka tunjukkan, seperti mampu mengeluarkan pendapat, protes atas kebijakan sekolah dan mampu menghargai sesama teman saat berdiskusi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PPKn kelas XII di SMAN 1 Kesamben Jombang menunjukkan hasil yang baik dan terlihat dari

sikap yang ditampilkan oleh para peserta didik di kelas XII. Penerapan karakter demokratis terlihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di buat oleh guru dan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi dari atas penerapan karakter demokratis terlihat dari hasil tes tertulis dan tidak tertulis. Sikap demokratis terlihat saat di dalam kelas maupun diluar kelas. Di dalam kelas terlihat ketika berdiskusi dan berinteraksi dengan teman maupun guru, sedangkan di luar kelas seperti saat pelaksanaan ekstrakurikuler terlihat dari keaktifan peserta didik dan interaksi peserta didik dengan lingkungan dan pleatih ekstrakurikuler. Mereka menunjukkan sikap mampu mengeluarkan pendapat, memberikan saran atau masukan, bahkan protes dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan simpulan, penelitian ini memberikan saran kepada Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang lain untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi pada siswa seperti: (1) metode proyek; (2) metode eksperimen; (3) metode sosiodrama; (4) metode demonstrasi; (5) metode karyawisata; dan (6) metode latihan. Guru dapat menggunakan strategi-strategi tertentu dalam pendidikan karakter demokratis di kelas seperti: (1) penggunaan karya fiksi dan nonfiksi; (2) pengajaran empati; (3) diskusi dilema moral; (4) evaluasi diri; (5) keterampilan berpikir kritis; dan (6) keterampilan mengatasi konflik. Implementasi pendidikan karakter demokratis tergantung pada peran guru PPKn yang menerapkan secara langsung pada pembelajaran PPKn pada siswa kelas XII di sekolah. Maka, diharapkan kepala sekolah, guru, dan karyawan ikut membantu menerapkan karakter demokratis pada kehidupan sehari-hari di sekolah

Daftar Pustaka

- Aziz, A. & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Bahmueller, C. F., & Patrick, J. J. (1999). *Principles and practices of democratic citizenship: Internasional perspektif and projects*. Indiana University. U.S. Departement Of Education: Education Resources Information Center (ERIC).
- Bernstein, L. J. (2008). Cultivating civic competence: simulations and skill building in an introductory government class. *Journal of Political Science Education*, 4(1), 1-20.
- Biesta, G. J. J. (2011). *Learning democracy in school and society*. Rotterdam/Boston/Taipei. Sense Publisher.
- Djamarah, S. B. & Zain, A. (2013). *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2013). *Pendidikan karakter kajian teori dan praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kivisto, P., & Faist, T. (2007). *Citizenship: theory, and transnational prospects*. Blackwell Publishing Ltd.
- Kurniawan, S. (2013). *Pendidikan karakter: konsepsi dan implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character how our schools can teach respect and responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland. Bantam Books.
- Lickona, T. (1997). The teacher's role in character education. *Journal of Education*, 179(2).
- Print, M. (2008). *Education for democratic citizenship in Australia*. The SAGE Handbook of Education for Citizenship and Democracy.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Robinson, I. W. (1996). Globalization, the world system, and "democracy promotion" in U. S. Foreign Policy. *Theory and Society*, 25(5), 615-665.

- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. (2013). *Strategi pembelajaran pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ubaidillah, A., & Rozak, A. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan (civic education) demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: strategi membangun karakter bangsa berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi tantangan menjuj civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.



FAKTOR DETERMINASI PROFESIONALISME GURU

Syamsuriyanti *¹, Sukirno¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: syamsuriyanti30@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) kualifikasi pendidikan terhadap profesionalisme guru, (2) sikap inovatif terhadap profesionalisme guru, (3) etos kerja terhadap profesionalisme guru, dan (4) pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos kerja secara simultan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kausal-komparatif yang bersifat *ex post facto*. Penelitian menggunakan populasi sebesar 119 orang guru IPS. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh kualifikasi pendidikan terhadap profesionalisme guru, (2) terdapat pengaruh sikap inovatif terhadap profesionalisme guru, (3) terdapat pengaruh etos kerja terhadap profesionalisme guru, dan (4) terdapat pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos kerja secara simultan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa.

Kata kunci: *profesionalisme guru, kualifikasi pendidikan, sikap inovatif, etos kerja*

FACTORS DETERMINATION PROFESSIONALISM OF TEACHER

Abstract

The study aimed to know the effect of (1) the educational qualifications of the professionalism of teachers, (2) innovative attitude towards professionalism of teachers, (3) the work ethic in the professionalism of teachers, and (4) the effect of educational qualifications, innovative attitude and work ethic simultaneously in the professionalism of teachers IPS SMP in Gowa. Population on this study was 119 junior high social studies teacher in Gowa. Collected data using questionnaire. Data analysis was using multiple linear regression. The results of this study showed: (1) there were significant educational qualifications in the professionalism of teachers, (2) there were significant influences innovative attitude towards professionalism of teachers, (3) there were significant effect of the work ethic in the professionalism of teachers, and (4) there were significant effect of educational qualifications, innovative attitude and work ethic simultaneously in the professionalism of junior high social studies teacher in Gowa.

Keywords: *professionalism of teachers, educational qualifications, innovative attitude, work ethic*

Pendahuluan

Pendidikan memegang peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan nasional itu sendiri, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sisdiknas). Oleh sebab itu, perlu peningkatan kualitas pendidikan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Peningkatan kualitas pendidikan juga harus memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan. Komponen-komponen pendidikan tersebut saling berinteraksi guna mencapai tujuan pendidikan. Hubungan dan interaksi antar komponen pendidikan terwujud dalam pembelajaran. Pendidik atau guru memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola pembelajaran agar menjadi bermakna (UCLA, 2008, p. 3).

Pentingnya peran guru dalam pembelajaran menjadikan guru harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Profesional merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidik profesi (UU RI No. 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 tentang Guru dan Dosen). Keahlian kemahiran, dan kecakapan yang dimiliki guru tidak serta merta ada pada dirinya, namun melalui proses pendidikan maupun pelatihan.

Menurut Demirkasimoglu (2010, p. 2048), "professionalism is a multi dimensional structure including one's work behaviors and attitudes to perform the highest standards and improve the service quality". Profesionalisme guru dapat dilihat dari kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas (Cole, 2012, p. 18). Pembelajaran yang berkualitas membutuhkan keterampilan adaptif, dan penilaian yang sistematis dari pengetahuan profesional dan tindakan-terhadap berbagai kriteria yang berasal dari teori, penelitian, pengalaman profesional dan bukti-untuk perbaikan serta inovasi (Caena, 2013, pp. 12-13). Pengembangan profesionalisme guru pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila

dampaknya dapat menumbuhkan sikap inovatif. "Improving attitudes is first and essential step for teacher professional development in science education" (van Aalderen Smeets & Molen, 2015, p. 2). Kalimat tersebut menjelaskan bahwa keprofesionalan seorang guru dapat dikembangkan dengan meningkatkan sikap guru terlebih dahulu. Sikap yang harus dikembangkan yaitu sikap inovatif. Soreide (2007, p. 146) menjelaskan bahwa "*an innovative teacher can handles most challenges, when it comes to subject knowledge, children, pedagogical methods, order in the classroom and so on.*" Guru yang inovatif adalah guru yang dapat menangani sebagian besar tantangan ketika sedang menjalankan tugasnya. Guru dapat mengatasinya dengan baik dengan pengetahuan dan keterampilan/ kemampuannya dalam mengelola kelas yang dikembangkan sesuai dengan kondisi/keadaan saat itu, sehingga siswa dapat kembali mengikuti pembelajaran. Guru harus memiliki sikap inovatif untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa agar siswa mampu menghadapi perkembangan zaman (Zuljan & Vogrinc, 2010, p. 458). Berdasarkan hal tersebut, guru harus berinovasi agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, sehingga sikap inovatif guru sangat dibutuhkan dalam pencapaian profesionalisme guru. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk melakukan berbagai upaya agar profesionalisme guru terus meningkat. Selain itu, dari pihak guru sendiri juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan profesionalismenya.

Usaha yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismenya, seperti yang dikutip oleh Hatta (2015), yaitu dengan memahami tuntutan standar profesi yang ada. Selain itu, guru juga harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Guru harus membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk melalui organisasi profesi. Guru harus mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bemutu tinggi kepada konstituen. Komari & Djafar (2013, p.110) mendefinisikan etos kerja sebagai "*a normative rule that contains the value system and moral principle as a guideline for employees to do their work within the organization*". Etos kerja merupakan aturan normatif sistem nilai dan prinsip moral sebagai pedoman bagi setiap orang dalam melakukan pekerjaannya. Artinya, etos kerja merujuk pada sikap/moral seseorang yang

digunakan untuk melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Guru juga diharuskan untuk mengembangkan kreativitasnya (inovatif) dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar tidak ketinggalan dalam kemampuan mengelola pembelajaran.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki intelektual, skill, moral, dan semangat juang tinggi yang disertai dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta memiliki etos kerja yang kuat yang meliputi disiplin kerja, menghargai waktu, berprestasi, dan menjadikan profesionalisme sebagai motivasi bagi pengembangan dirinya (Mahanani, 2011, p. 11). *“Teacher professionalism has relevant significance in education in that it affects the role of the teacher and his or her pedagogy, which in return affects the student’s ability to learn effectively”* (Tweve, 2011, p. 4). Hasil penelitian Dhiatmika, Dantes & Yudana (2013, p. 1), menyatakan terdapat determinasi yang signifikan antara etos kerja (X_1) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 35,300%. Hal ini menunjukkan bahwa etos kerja cukup berpengaruh terhadap kinerja guru, kinerja guru sangat berkaitan dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mencapai guru yang profesional.

“A qualification is a formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to a given standard” (Cedefop, 2009, p. 11). Kualifikasi pendidikan guru SMP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29, yang menyebutkan bahwa Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MT. Perbedaan kualifikasi pendidikan yang dimiliki masing-masing guru akan menjadikan perbedaan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya (Richardson, 2008, p. 83). Tugas guru sesuai dengan kualifikasi bidang pendidikan yang ditempuhnya di bangku kuliah. Hal ini dimaksudkan guru yang mengajar sesuai bidang kuliahnya lebih menguasai pelajaran tersebut, sehingga guru tersebut dapat memberikan pengetahuan yang baik dan benar.

Tingkat profesionalisme guru dapat diketahui melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilakukan pemerintah. UKG dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kompetensi guru. Berdasarkan hasil UKG yang dilaksanakan pemerintah secara nasional, seperti yang dikutip oleh Panga (2015), kemampuan guru masih sangat memprihatinkan. Rata-rata nilai UKG tahun 2015 yaitu 47 dengan nilai ideal 100. Daerah dengan nilai UKG di bawah rata-rata nasional tersebut yaitu Sulawesi Selatan. Selain itu, pada pre tes calon peserta TEQIP (*Teacher Quality Improvement Program*) yang dilakukan oleh Isnandar (2014, p.786), guru pada bidang studi matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di seluruh Indonesia sejak tahun 2010-2014, menunjukkan nilai yang masih rendah, yaitu di bawah 50.

Permasalahan terkait dengan latar belakang pendidikan tidak bisa dipungkiri ada banyak kasus di sekolah guru yang mengampu suatu mata pelajaran yang bukan haknya (Arikunto & Yuliana, 2008, p. 370). Menurut Ketua Komisi IV DPRD Bangka Belitung, Hardiyono (2015), diketahui bahwa masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang kompetensinya dikarenakan seseorang memilih bekerja sebagai guru karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan, sehingga pekerjaan guru tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam mengajar. Selain itu, sekolah mengalami kekurangan guru pada suatu bidang dan tidak ada guru dengan bidang terkait sehingga harus diisi oleh guru yang dianggap mampu mengajar mata pelajaran tersebut.

Menurut Alpha seperti yang dikutip oleh Maskur (2014), menyatakan bahwa hanya 37% dari seluruh guru di Indonesia, yang berjumlah 3,5 juta guru, yang memiliki kualifikasi minimum Sarjana atau Diploma IV sebagaimana disyaratkan. Guru yang hanya memiliki ijazah SMA dan bahkan di bawahnya sebanyak 25%. Selain kualifikasi pendidik yang belum memadai, kompetensi guru juga masih bermasalah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan atau diklat yang dapat membantu meningkatkan kualitas/kompetensi guru sehingga terciptalah guru yang profesional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, guru yang mengajar pada tingkat SMP diketahui berjumlah 1024 orang pada tahun 2014-2015. Namun, guru yang berpendidikan terakhir sampai Diploma 3

sebanyak 240 orang (23,44%), dan guru yang telah bersertifikasi sebanyak 784 orang (76,56%). Hal tersebut menunjukkan bahwa guru pada tingkat SMP di Kabupaten Gowa masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat sebagai pendidik yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, diketahui bahwa di Kabupaten Gowa sendiri untuk guru tingkat SMP pada bidang studi IPS masih terdapat guru yang tidak mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, yaitu sebanyak 38,700%. Sebanyak 31,100% orang guru menyatakan sering atau setidaknya pernah terlambat dalam mengajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru masih belum memiliki etos kerja/disiplin kerja yang tinggi karena kurang menghargai waktu.

Guru di Makassar sendiri masih ada yang tidak dapat menggunakan komputer. Hal tersebut sesuai dengan yang dikutip oleh Susanti (2015) bahwa dalam mengerjakan UKG secara *online*, guru masih terlihat gagap teknologi. Guru tidak bisa menggunakan perangkat komputer yang digunakan untuk UKG. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tidak mau berusaha untuk mengikuti perkembangan jaman, sehingga dalam praktek mengajarnya tidak melibatkan perangkat teknologi dalam penyampaian materi.

Berita lain yang ditulis oleh Aminah (2015), menjelaskan bahwa penyebaran guru di Sulawesi Selatan belum merata. Hal ini ditunjukkan tidak sedikit guru yang mengajar di luar bidang dan kompetensinya. Penyebab tidak meratanya penyebaran ini di antaranya guru yang sesuai bidangnya tidak memiliki jam pelajaran karena terdapat beberapa mata pelajaran yang dihapus (seperti TIK untuk SMA dan Bahasa Inggris untuk SD), dan kurangnya guru yang sesuai bidangnya. Keadaan ini menimpa lebih dari setengah guru di Indonesia, baik SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50% guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar.

Selain itu, menurut Tagor Alamsyah Harahap, Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikutip oleh Linggasari (2015), jumlah guru di beberapa kota sangat banyak. Jumlah guru matematika di Yogyakarta yang ada di lapangan sebanyak 726 orang. Jumlah ini termasuk sa-

ngat banyak jika dilihat dari jumlah yang dibutuhkan, yaitu 520 orang. Jumlah guru di beberapa daerah lain, seperti di Papua dan daerah perbatasan, masih sangat minim guru. Permasalahan ini lah yang mengakibatkan kurangnya guru di beberapa daerah dan membuat seorang guru harus mengajarkan beberapa bidang disiplin ilmu. Hal ini mengakibatkan kualitas mengajar guru menjadi rendah karena tidak memiliki kompetensi dalam bidang yang diajarkannya, sehingga dapat berdampak pada kompetensi siswanya.

Profesionalisme guru tercermin dalam penampilan guru saat melaksanakan tugas-tugasnya. Berbagai tugas tersebut dapat terlaksana jika guru memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya, serta keterampilan/kemampuan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang baik (Sutarmanto, 2012, p.19). Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru, yaitu penguasaan terhadap bidang ilmu tertentu, penguasaan terhadap metode, media maupun strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajarannya. Penguasaan terhadap bidang ilmu tertentu menunjukkan kesungguhan guru dalam memperdalam bidang tersebut dan memiliki pengetahuan yang lebih dibanding dengan guru yang mempelajari berbagai disiplin ilmu. Guru yang menguasai berbagai metode media dan strategi pembelajaran dapat menciptakan suasana dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan serta dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Rendahnya kualitas guru ini dapat berdampak pada rendahnya kompetensi siswa yang nantinya akan memengaruhi kemajuan bangsa. Guru yang memperoleh nilai di atas 50 kebanyakan berada di pulau Jawa, khususnya di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa profesionalisme guru sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang berintelektual, kreatif dan mandiri, sehingga profesionalisme guru perlu ditingkatkan melalui beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, seperti kualifikasi pendidikan, sikap inovatif, dan etos kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualifikasi pendidik terhadap profesionalisme guru, sikap inovatif terhadap profesionalisme guru, etos kerja terhadap profesionalisme guru, dan pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap

inovatif, dan etos kerja secara simultan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah ilmu pendidikan khususnya dalam peningkatan profesionalisme guru, dan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah serta Guru mata pelajaran IPS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011, p. 8). Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang disusun oleh peneliti. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian kausal-komparatif yang bersifat *ex post facto*, artinya penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian tersebut. Artinya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2015 – Maret 2016. Subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh guru tingkat SMP di Kabupaten Gowa, Makassar. Guru SMP di Kabupaten Gowa sebanyak 1024 orang guru yang tersebar dalam 107 sekolah negeri dan swasta, serta mampu berbagai bidang disiplin ilmu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 149 orang guru mata pelajaran IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Jumlah tersebut digunakan untuk uji coba instrument (validitas dan reliabilitas) sebanyak 30 orang, dan sisanya 119 orang responden digunakan untuk penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menyusun proposal dan instrumen penelitian. Berdasarkan proposal dan instrumen tersebut, kemudian dilakukan pengambilan data di lapangan. Data diperoleh langsung dari responden penelitian, yaitu guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa. Data yang telah diperoleh dengan instrumen tersebut kemudian diolah

dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan teknik yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan kuesioner, sehingga instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan kuesioner/angket. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dengan nara sumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan/pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2010, p.194).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Secara empirik, data dideskripsikan berdasarkan nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi sesuai data yang telah diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Analisis inferensial yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos kerja terhadap profesionalisme guru. Analisis berganda dapat dilakukan setelah dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik tersebut dilanjutkan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan di awal mengenai pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos kerja terhadap profesionalisme guru. Uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji regresi berganda. Berdasarkan uji regresi berganda tersebut dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (uji statistik *t*), pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Persamaan

yang dapat disusun dari uji regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

- Y : Profesionalitas Guru IPS
 a : bilangan konstanta
 b_{1-3} : Bilangan koefisien X
 X_1 : Kualifikasi Pendidikan
 X_2 : Sikap Inovatif
 X_3 : Etos Kerja

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data sebanyak 119 orang guru Mata Pelajaran IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh berupa karakteristik responden serta variabel penelitian. Karakteristik responden yang diperoleh terdiri atas jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki, linearitas pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, status sertifikasi serta program sertifikasi yang diikuti, disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	F	%
Pendidikan Terakhir:		
1. S-1	114	95,798%
2. S-2	5	4,202%
Linearitas Pendidikan:		
1. Linear	73	61,345%
2. Tidak Linear	46	38,655%
Status Sertifikasi:		
1. Sudah Sertifikasi	93	78,151%
2. Belum Sertifikasi	26	21,849%
Program Sertifikasi:		
1. PPG	60	50,420%
2. Portofolio	33	27,731%
3. Belum Mengikuti	26	21,849%

Berdasarkan Tabel 1, mayoritas guru IPS bergelar Sarjana S-1, yaitu sebanyak 114 orang (95,798%). Berdasarkan linearitas pendidikan, sebanyak 73 orang (61,345%) guru IPS memiliki pendidikan yang linear dengan mata pelajaran yang diampu. Berdasarkan status sertifikasi, mayoritas guru IPS telah bersertifikasi pendidik, yaitu sebanyak 93 orang atau sebesar 78,151%. Berdasarkan program sertifikasi yang diikuti, sebanyak 60 orang atau sebesar 50,420% guru IPS mengikuti program sertifikasi PPG, sebanyak 33 orang atau sebesar 27,731% guru IPS mengikuti program

sertifikasi Portofolio, sedangkan 26 orang guru lainnya belum mengikuti program sertifikasi.

Tabel 2. Deskriptif Variabel Penelitian

	Profesio- nalisme Guru	Kualifi- kasi Pendi- dikan	Sikap Inova- tif	Etos Kerja
Maks:				
Ideal	80,000	28,000	60,000	76,000
Empirik	77,000	26,000	60,000	76,000
Min:				
Ideal	20,000	7,000	15,000	19,000
Empirik	57,000	17,000	42,000	54,000
Mean:				
Ideal	50,000	17,500	37,500	47,500
Empirik	66,261	21,244	49,067	63,050
SD:				
Ideal	10,000	3,500	7,500	9,500
Empirik	4,441	2,285	4,067	4,787

Tabel 2 tersebut menunjukkan jumlah skor yang diperoleh untuk tiap variabel penelitian. profesionalisme guru jika dilihat dari nilai meannya secara empirik lebih tinggi dibanding dengan nilai ideal. Perbedaan nilai tersebut dapat diartikan bahwa penilaian terhadap profesionalisme guru di atas nilai standarnya (nilai ideal). Variabel Kualifikasi Pendidikan jika dilihat dari nilai meannya secara empirik lebih tinggi dibanding dengan nilai ideal. Perbedaan nilai tersebut dapat diartikan bahwa penilaian terhadap Kualifikasi Pendidikan di atas nilai standarnya (nilai ideal). Variabel Sikap Inovatif jika dilihat dari nilai meannya secara empirik lebih tinggi dibanding dengan nilai ideal. Perbedaan nilai tersebut dapat diartikan bahwa penilaian terhadap Sikap Inovatif di atas nilai standarnya (nilai ideal). Variabel Etos Kerja jika dilihat dari nilai meannya secara empirik lebih tinggi dibanding dengan nilai ideal. Perbedaan nilai tersebut dapat diartikan bahwa penilaian terhadap Etos Kerja di atas nilai standarnya (nilai ideal).

Berdasarkan skor variabel yang diperoleh, dapat diketahui item mana yang memiliki nilai tertinggi dibanding item lain pada tiap variabel. Berikut disajikan item dengan skor tertinggi dan terendah untuk tiap variabel.

Tabel 3. Deskriptif Item Tertinggi dan Terendah Tiap Variabel

Item	Profesi- onalisme Guru	Kualifikasi Pendidikan	Sikap Inova- tif	Etos Kerja
Maks:				
tertinggi	4,000	4,000	4,000	4,000
terendah	4,000	4,000	4,000	4,000
Min:				
tertinggi	3,000	2,000	3,000	3,000
terendah	1,000	1,000	1,000	1,000
Mean:				
tertinggi	3,521	3,437	3,429	3,563
terendah	2,168	2,429	3,067	2,807
SD:				
tertinggi	0,502	0,515	0,497	0,498
terendah	0,795	0,671	0,578	0,728

Berdasarkan Tabel 3, pada variabel Profesionalisme Guru item dengan mean skor tertinggi sebesar 3,521, yaitu pada pernyataan “membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar”. Artinya, sebagian besar guru IPS bersedia memberikan bantuan kepada siswa yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut dapat berdampak pada siswa yang tidak malu untuk bertanya jika sedang mengalami kesulitan belajar, dan pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, item yang berisi pernyataan “berusaha mendapatkan sertifikasi karena tunjangan yang diperoleh cukup besar” mendapatkan nilai mean terendah. Artinya, guru berusaha untuk mendapatkan sertifikasi hanya untuk mendapatkan tunjagannya. Tunjangan yang diberikan bagi guru bersertifikasi tergolong besar. Jika guru hanya bertujuan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka bisa saja guru setelah mendapatkan sertifikasi dengan tunjagannya yang besar tidak lagi meningkatkan/ mengembangkan profesionalitasnya sebagai guru, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas mengajar guru serta prestasi belajar siswa yang menurun.

Pada variabel Kualifikasi Pendidikan, item dengan skor item tertinggi sebesar 3,437, yaitu “memperoleh gelar kependidikan setelah mengikuti pendidikan dibangku kuliah”. Artinya, responden dalam penelitian ini memperoleh gelar kependidikannya setelah lulus dari perguruan tinggi. Guru yang lulus dari perguruan tinggi telah dibekali dengan berbagai kompetensi mengajar. Dengan demikian, seharusnya guru dapat memberikan pengajaran

yang baik sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya di perguruan tinggi. Nilai mean terendah sebesar 2,429, yaitu “dapat mengajar mata pelajaran lain selain yang diampu”. Artinya, guru tidak hanya dapat mengajar satu bidang studi. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru tidak fokus pada satu bidang studi, yang dapat berakibat pada kompetensi yang dimiliki menjadi kurang maksimal atau hanya setengah-setengah.

Pada variabel Sikap Inovatif, item dengan skor item tertinggi sebesar 3,429, yaitu “menggunakan sumber belajar lain (seperti majalah, koran dan sebagainya) dalam menyampaikan materi pelajaran”. Artinya, guru telah memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekolah. Hal tersebut dapat memberikan suasana yang berbeda dalam belajar yang tidak hanya menggunakan buku paket/LKS saja. Siswa diajarkan pula dengan melihat peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat yang sesuai dengan materi pelajaran. Item dengan mean terendah sebesar 3,067, yaitu “berani membuat inovasi berani mengambil risiko yang dapat ditimbulkan”. Artinya, guru belum berani mengambil risiko dalam berinovasi. Inovasi yang dilakukan tidak selamanya berhasil dilakukan. Namun, untuk mendapatkan hasil yang baik, harus berani mengambil risiko yang ada. Jika guru tidak mau mengambil risiko yang dalam berinovasi maka guru tidak akan bisa berinovasi lebih luas.

Pada variabel Etos Kerja, mean skor item tertinggi sebesar 3,563, yaitu “bekerja sebagai guru merupakan bentuk pengabdian yang saya lakukan kepada masyarakat, bangsa dan Negara”. Artinya, tujuan responden menjadi guru yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi guru yang dijalani dilakukan dengan sepenuh hati untuk masyarakat luas. Dengan demikian, guru dapat bekerja tanpa terbebani dengan besaran pendapatan yang diperoleh sehingga tugasnya sebagai guru, yaitu mengajar/mendidik siswa, dapat dilakukan dengan baik. Item dengan mean skor terendah sebesar 2,807, yaitu “tidak pernah terlambat dalam mengajar”. Artinya, guru pernah/ sering terlambat dalam mengajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru telah mengambil hak belajar siswa yang seharusnya dua jam pelajaran menjadi kurang dari itu. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu guru dapat mengajar

dengan tergesa-gesa menyesuaikan dengan sisa jam pelajaran yang ada, sehingga siswa menjadi kurang menguasai materi yang diberikan dan pada akhirnya berdampak pada prestasi belajar siswa.

Tabel 4. Deskriptif Variabel Profesionalisme Guru

Kategori	Interval Skor	f	%
Profesional	≥ 60	109	91,597%
Cukup Profesional	40 - 60	10	8,403%
Kurang Profesional	< 40	0	0,000%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan Tabel 4, pada variabel Profesionalisme Guru mayoritas penilaian yang diberikan masuk dalam kategori Profesional. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah guru yang masuk dalam kategori Profesional sebanyak 109 orang atau sebesar 91,597%, sedangkan sisanya, sebanyak 10 orang atau sebesar 8,403% masuk dalam kategori Cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa masuk dalam kategori Profesional.

Tabel 5. Deskriptif Variabel Kualifikasi Pendidikan

Kategori	Interval Skor	f	%
Sangat Sesuai	≥ 21	72	60,504%
Cukup Sesuai	14 - 21	47	39,496%
Kurang Sesuai	< 14	0	0,000%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan Tabel 5 tersebut, variabel Kualifikasi Pendidikan mayoritas masuk dalam kategori sangat sesuai. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah guru yang masuk dalam kategori sangat sesuai sebanyak 72 orang atau sebesar 60,504%, sedangkan sisanya, sebanyak 47 orang atau sebesar 39,496% masuk dalam kategori Cukup.

Tabel 6. Deskriptif Variabel Sikap Inovatif

Kategori	Interval Skor	f	%
Sangat Inovatif	≥ 45	106	89,076%
Cukup Inovatif	30 - 45	13	10,924%
Kurang Inovatif	< 30	0	0,000%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan Tabel 6, variabel Sikap Inovatif mayoritas masuk dalam kategori Sangat Inovatif. Hal tersebut ditunjukkan dengan

jumlah guru yang masuk dalam kategori Sangat Inovatif sebanyak 106 orang atau sebesar 89,076%, sedangkan sisanya, sebanyak 13 orang atau sebesar 10,924% masuk dalam kategori Cukup.

Tabel 7. Deskriptif Variabel Etos Kerja

Kategori	Interval Skor	f	%
Tinggi	≥ 57	106	89,076%
Sedang	38-57	13	10,924%
Rendah	< 38	0	0,000%
Jumlah		119	100%

Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Etos Kerja mayoritas masuk dalam kategori Profesional. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah guru yang masuk dalam kategori Profesional sebanyak 106 orang atau sebesar 89,076%, sedangkan sisanya, sebanyak 13 orang atau sebesar 10,924% masuk dalam kategori Cukup.

Hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Z	Sig
Profesionalisme Guru	0,806	0,534
Kualifikasi Pendidikan	1,198	0,113
Sikap Inovatif	1,175	0,126
Etos Kerja	1,192	0,117

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa variabel Profesionalisme Guru, Kualifikasi Pendidikan, Sikap Inovatif dan Etos Kerja memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berdistribusi normal.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kualifikasi Pendidikan	0,929	1,076
Sikap Inovatif	0,648	1,544
Etos Kerja	0,641	1,559

Berdasarkan Tabel 9, diketahui bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,929 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF sebesar 1,076 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian, variabel Kualifikasi Pendidikan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

<i>du</i>	<i>Durbin-Watson</i>	<i>4-du</i>
1,736	1.924	2,264

Berdasarkan Tabel 10, diketahui bahwa nilai Durbin Watson pada persamaan regresi ini sebesar 1,924. Nilai *du* dengan sampel sebanyak 119 orang dan jumlah variabel independen sebanyak 3 pada taraf signifikansi 5% diperoleh sebesar 1,736, sehingga nilai *4-du* diperoleh sebesar 2,264 ($4-1,736$). Dengan demikian, nilai Durbin Watson yang diperoleh (1,924) berada di antara *du* (1,736) dan *4-du* (2,264), sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Kualifikasi Pendidikan	0,083
Sikap Inovatif	0,529
Etos Kerja	0,597

Berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,083. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan tidak terdapat heteroskedastisitas. Variabel Sikap Inovatif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,529. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Inovatif tidak terdapat heteroskedastisitas. Variabel Etos Kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,597. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Etos Kerja tidak terdapat heteroskedastisitas

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Beta	t	Sig.
<i>(Constant)</i>	21,351	4,655	0,000
Kualifikasi Pendidikan	0,881	6,491	0,000
Sikap Inovatif	0,207	2,261	0,026
Etos Kerja	0,255	3,271	0,001

Berdasarkan hasil uji regresi berganda tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 21,351 + 0,881 \text{ Kualifikasi Pendidikan} + 0,207 \text{ Sikap Inovatif} + 0,255 \text{ Etos Kerja}$$

Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa nilai *t* hitung untuk variabel Kualifikasi Pendidikan Guru sebesar 6,491 dengan nilai signifikansi 0,000 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualifikasi Pendidikan Guru secara signifikan berpengaruh positif terhadap Profesionalisme Guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a1} yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kualifikasi pendidikan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa” diterima, dan H_{o1} ditolak.

Nilai *t* hitung untuk variabel Sikap Inovatif sebesar 2,261 dengan nilai signifikansi 0,026 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Inovatif secara signifikan berpengaruh positif terhadap Profesionalisme Guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a2} yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh sikap inovatif terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa” diterima, dan H_{o2} ditolak.

Nilai *t* hitung variabel Etos Kerja sebesar 3,271 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Etos Kerja secara signifikan berpengaruh terhadap Profesionalisme Guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a3} yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh etos kerja terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa” diterima, dan H_{o3} ditolak.

Tabel 13. Hasil Uji Statistik F

Nilai F hitung	Nilai Signifikansi
35.186	0.000

Berdasarkan Tabel 13, diketahui nilai F hitung sebesar 35,186 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,005. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan, Sikap Inovatif dan Etos Kerja secara simultan (bersama-sama) signifikan berpengaruh terhadap Profesionalisme Guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_{a4} yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos kerja terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa” diterima, dan H_{o4} ditolak.

Tabel 14. Hasil Uji Determinasi

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
0.692	0.479	0.465	3.24811

Berdasarkan Tabel 14, diketahui bahwa nilai adjusted R square untuk persamaan regresi penelitian ini yaitu sebesar 0,465. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel Kualifikasi Pendidikan, Sikap Inovatif dan Etos Kerja memberikan pengaruh sebesar 46,50% terhadap Profesionalisme Guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa, sedangkan sisanya, sebesar 53,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 15. Sumbangan Relatif

Variabel	Sumbangan Relatif
Kualifikasi Pendidikan	53,401%
Sikap Inovatif	17,962%
Etos Kerja	28,637%
Jumlah	100,000%

Berdasarkan Tabel 15, diketahui bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan memberikan sumbangan relatif sebesar 53,401%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualifikasi Pendidikan memberikan pengaruh sebesar 53,401% terhadap Profesionalisme Guru pada persamaan regresi dalam penelitian ini. Variabel Sikap Inovatif memberikan sumbangan relatif sebesar 17,962%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Inovatif memberikan pengaruh sebesar 17,962% terhadap Profesionalisme Guru pada persamaan regresi dalam penelitian ini. Etos Kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 28,637%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Etos Kerja memberikan pengaruh sebesar 28,637% terhadap Profesionalisme Guru pada persamaan regresi dalam penelitian ini.

Tabel 16. Sumbangan Efektif

Variabel	Sumbangan Efektif
Kualifikasi Pendidikan	24,832%
Sikap Inovatif	8,352%
Etos Kerja	13,316%
Jumlah	46,500%

Berdasarkan Tabel 16, diketahui bahwa variabel Kualifikasi Pendidikan memberikan sumbangan efektif sebesar 24,832% dari

46,500%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kualifikasi Pendidikan memberikan pengaruh sebesar 24,832% terhadap Profesionalisme Guru dari keseluruhan efektifitas persamaan regresi dalam penelitian ini. variabel Sikap Inovatif memberikan sumbangan efektif sebesar 8,352%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Inovatif memberikan pengaruh sebesar 8,352% terhadap Profesionalisme Guru dari keseluruhan efektifitas persamaan regresi dalam penelitian ini. Etos Kerja memberikan sumbangan efektif sebesar 13,316%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Etos Kerja memberikan pengaruh sebesar 13,316% terhadap Profesionalisme Guru dari keseluruhan efektifitas persamaan regresi dalam penelitian ini.

Kualifikasi pendidikan tentunya memiliki pengaruh terhadap profesionalisme guru. Apabila kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi tidak dipungkiri akan banyak ilmu yang dimiliki pula, terutama bagi seorang guru yang akan mendidik anak murid-muridnya. Kualifikasi pendidikan tentunya berpengaruh, karena ilmu yang didapat dari kualifikasi pendidikan yang semakin tingginya akan semakin banyak atau semakin kaya akan ilmu pengetahuan.

Ilmu yang didapat dari jenjang pendidikan yang tinggi membuat guru memiliki profesionalisme kerja, karena kualifikasi pendidikan yang tinggi didapat oleh seorang guru maka guru mendapatkan ilmu lebih banyak. Apabila seorang guru mau mengikuti seminar pendidikan, diklat serta pelatihan tentunya ilmu yang didapat bertambah. Ilmu-ilmu yang didapat dapat diaplikasikan pada murid-murid.

Guru yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dinilai lebih terampil dalam mengajar karena saat menempuh pendidikan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan serta keterampilan/kompetensi dalam mengajar. Tentunya siswa yang diajar oleh guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimum dapat lebih mudah menerima pelajaran karena guru mampu menerangkan mata pelajaran yang diampunya dengan baik. Siswa yang mudah menerima pelajaran tentunya dengan mudah menuai prestasi yang membanggakan sekolah pada umumnya dan mendapat kepuasan pribadi pada khususnya. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya. Guru yang mengajar diluar kualifikasi pendidikan-

nya tidak memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pengetahuan, sehingga memungkinkan materi yang disampaikan kurang mendalam dan pembelajaran juga dapat menjadi membosankan karena guru lebih berfokus pada buku pelajaran saja.

Kualifikasi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.000. Hal tersebut sama dengan penelitian Awe (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualifikasi akademik dengan kinerja guru, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dengan kinerja guru, (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru, 4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kualifikasi akademik, kompetensi, motivasi kerja dengan kinerja guru.

Inovasi yang dilakukan oleh guru seperti menggunakan sumber pelajaran lain berupa majalah atau koran menandakan bahwa guru tersebut merupakan guru yang memiliki profesionalitas. Inovasi yang dilakukan guru juga seperti memberikan contoh nyata mengenai suatu permasalahan sosial melalui drama yang dimainkan siswa, mengajak siswa untuk menemukan bahan/materi pelajaran yang ada di lingkungan sekitar, membuat suasana belajar menjadi lebih efektif, profesionalisme guru akan terlihat dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada anak muridnya. Guru yang profesional menggunakan alat peraga, mengaitkan materi pembelajaran dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat, mau mengikuti perkembangan zaman yang terjadi untuk meningkatkan kualitas mengajar, menggunakan internet sebagai sarana untuk belajar dan mengajar, serta mau mengambil resiko yang dapat ditimbulkan. Ke-profesioanlisme guru akan terlihat dengan beberapa inovasi yang dilakukan oleh guru di atas. Inovasi-inovasi yang dilakukan guru tentunya membutuhkan ide-ide, ide tersebut tercurah karena profesionalitas kerja guru yang memang benar-benar didedikasikan untuk anak muridnya.

Sikap inovatif guru IPS tentunya membantu murid untuk menerima pelajaran, karena mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang banyak menghafal oleh karena

itu dibutuhkan inovasi agar mata pelajaran IPS mudah diterima oleh siswa. Inovasi yang dilakukan baik dalam media pembelajaran maupun sumber belajar. Media pembelajaran yang menarik serta sumber belajar yang berbeda dinilai lebih menarik perhatian siswa, dan siswa menjadi lebih fokus dan memperhatikan pelajaran. Tentunya efektifitas belajar siswa menjadi meningkat dan dapat lebih menyukai pelajaran IPS yang notabennya banyak menghafal sehingga menjenuhkan para siswa. Pihak sekolah juga diuntungkan apabila nilai-nilai siswa banyak yang di atas rata-rata dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan karena sikap inovasi yang ditunjukkan guru.

Sikap inovatif berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.207. Sama dengan penelitian Sirait (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap inovatif, profesionalisme guru, dan motivasi kerja guru berpengaruh terhadap kinerja guru. Sama juga dengan penelitian Dhiatmika, Dantes & Yudana (2013), hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama terdapat determinasi yang signifikan antara etos kerja (X1) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 35,30%. Kedua terdapat determinasi yang signifikan antara motivasi berprestasi (X2) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 24,80%. Ketiga terdapat determinasi yang signifikan antara kreativitas (X3) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 25,90%. Keempat bahwa etos kerja, motivasi berprestasi dan kreativitas secara bersama-sama memberikan determinasi yang signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri Sekecamatan Sukawati sebesar 53,10%.

Sebagai guru, etos kerja sangat penting. Guru harus memiliki semangat, kemauan, serta inovasi dan kreativitas, sehingga mampu mewujudkan etos kerja dengan sebaik-baiknya (Mulyana, 2010, p. 23). Sejalan dengan hal tersebut, Surya (2004, p. 39) menyebutkan bahwa etos kerja merupakan landasan utama bagi unjuk kerja semua aparat dalam berbagai jenis dan jenjang. Pembinaan dan pengembangan profesionalitas guru senantiasa mengacu pada etos kerja yang mencakup beberapa hal, yaitu disiplin kerja, kerja keras, menghargai waktu, dan berprestasi.

Etos kerja dapat terlihat dari usaha seorang guru untuk mengerjakan setiap tugas secara mandiri, tidak bergantung dengan bantuan orang lain, berani mengambil keputusan untuk

mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi secara mandiri, memberikan perlakuan yang sama antara satu siswa dengan siswa lainnya tanpa membedakan, berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu, menyelesaikan setiap pekerjaan sebaik mungkin, tidak pernah terlambat dalam mengajar. Motivasi-motivasi tersebut apabila diterapkan maka etos kerja seorang guru memiliki keprofesionalisme. Etos kerja seorang guru juga terlihat apabila seorang guru masih mau menegur seorang siswa yang tidak menaati tata tertib sekolah, memberi sanksi bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan, bekerja sebagai guru merupakan bentuk suatu pengabdian. Etos kerja seperti diatas merupakan semangat keprofesionalisme seorang guru. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang berusaha dan berupaya membuat anak-anak menjadi pandai. Oleh karena itu etos kerja membuat cerdas anak-anak merupakan sebuah pertanda dari seorang guru yang memang profesional pada pekerjaannya.

Etos kerja berpengaruh terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa dibuktikan dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.001. Hal tersebut sama dengan penelitian Fajriani (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah dan etos kerja guru berpengaruh terhadap kinerja guru. Sama juga dengan penelitian Dhiatmika, Dantes & Yudana (2013), hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama terdapat determinasi yang signifikan antara etos kerja (X1) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 35,30%. Kedua terdapat determinasi yang signifikan antara motivasi berprestasi (X2) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 24,80%. Ketiga terdapat determinasi yang signifikan antara kreativitas (X3) terhadap kinerja guru (Y) sebesar 25,90%. Keempat bahwa etos kerja, motivasi berprestasi dan kreativitas secara bersama-sama memberikan determinasi yang signifikan terhadap kinerja guru di SMP Negeri Sekecamatan Sukawati sebesar 53,10%.

Nilai *adjusted R square* untuk persamaan regresi penelitian ini yaitu sebesar 0,465. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel Kualifikasi Pendidikan, Sikap Inovatif dan Etos Kerja memberikan pengaruh sebesar 46,5% terhadap Profesionalisme Guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa, Makassar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah (Suprihatiningrum, 2014, p. 24). Guna mencapai derajat profesionalisme, seorang guru membutuhkan proses profesionalisasi. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang ikut menentukan profesionalisme guru, yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk panataran, pembinaan dari organisasi profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, serta besarnya gaji (Suprihatiningrum, 2014, p. 82). Profesionalisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu pekerjaan memperoleh status profesional. Variabel kualifikasi pendidikan, etos kerja, dan sikap inovatif memiliki pengaruh terhadap profesionalisme guru.

Ketiga variabel independen yang diteliti, yaitu kualifikasi pendidikan, sikap inovatif dan etos berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru. Guru dengan profesionalitas yang tinggi akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengajar, pengetahuan, berinovasi serta tidak mudah puas dengan apa yang telah didapat. Guru dengan profesionalisme yang tinggi akan berusaha mengembangkan segala kemampuan/kompetensinya guna memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa yang memiliki rasa senang terhadap pelajaran dan guru yang mengajar akan menjadikannya memiliki keinginan kuat untuk belajar karena guru yang mengampu mata pelajaran IPS sangat berkompeten dalam bidangnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan pelajaran yang diampu, memiliki sikap inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Pihak sekolah juga dapat diuntungkan dengan adanya kualifikasi pendidikan, sikap inovasi dan etos kerja dari seorang guru IPS untuk mengantarkan siswa-siswanya untuk memahami pelajaran IPS.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualifikasi Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai *t* hitung sebesar 6,491 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050. Besar sumbang-

an efektif Kualifikasi Pendidikan Guru terhadap perubahan Profesionalisme Guru adalah 24,832%.

Sikap Inovatif berpengaruh signifikan terhadap Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai t hitung 2,261 dan nilai signifikansi 0,026 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,050. Besar sumbangan efektif Sikap Inovatif terhadap perubahan Profesionalisme Guru adalah 8,352%.

Etos Kerja berpengaruh signifikan terhadap Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 3,271 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Besar sumbangan efektif Etos Kerja terhadap perubahan Profesionalisme Guru adalah 13,316%.

Kualifikasi Pendidikan Guru, Sikap Inovatif dan Etos Kerja secara simultan berpengaruh terhadap Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 35,186 dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,005. Besarnya sumbangan efektif Kualifikasi Pendidikan, Sikap Inovatif dan Etos Kerja secara simultan terhadap perubahan Profesionalisme Guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan adalah 46,500%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan guru berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru IPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan yang dimiliki guru dapat meningkatkan profesionalisme guru, tentu saja kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki menunjukkan kemampuannya dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu seharusnya guru dengan kualifikasi pendidikan yang sama/ sesuai dengan mata pelajaran yang diampu memiliki profesionalisme yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap inovatif guru berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru IPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap inovatif guru dapat meningkatkan profesionalisme guru. Sikap inovatif menunjukkan bahwa guru senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Guru yang mau mengikuti perkembangan teknologi tersebut akan berusaha untuk menciptakan suatu media, sumber belajar, metode ataupun strategi pembelajaran yang lebih baik dan menarik bagi siswa, sehingga kegiatan pembelajaran tidak lagi membosankan dan

siswa menjadi lebih aktif untuk menunjukkan kemampuannya. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki sikap inovatif untuk meningkatkan profesionalismenya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etos kerja guru berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru IPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa etos kerja guru dapat meningkatkan profesionalisme guru. Etos kerja menunjukkan semangat kerja guru dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugasnya. Guru dengan etos kerja tinggi ditunjukkan dengan menghargai setiap waktu yang ada, mengajar dengan sepenuh hati bukan karena tunjangan yang akan diperoleh, bekerja merupakan suatu bentuk ibadah, memanfaatkan waktu luang untuk berinovasi dan sebagainya. Oleh karena itu, guru seharusnya memiliki etos kerja yang tinggi sehingga profesionalisme yang dimiliki juga makin baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat diberikan saran untuk guru yaitu meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki berpengaruh terhadap profesionalisme guru, lebih berani lagi dalam berinovasi meskipun terdapat risiko kegagalan dalam pelaksanaannya karena melalui kegagalan itulah keberhasilan akan didapatkan, untuk terus meningkatkan etos kerjanya sebagai guru. Guru diharapkan dapat memberikan pelajaran sesuai dengan jam yang ditentukan dengan tidak datang terlambat. Jika pun harus datang terlambat/tidak bisa hadir dapat memberikan penugasan untuk dikumpulkan di mana pada pertemuan selanjutnya dapat dibahas bersama-sama, sehingga siswa tidak tertinggal pelajaran dengan kelas/sekolah lain.

Saran yang dapat diberikan untuk kepala sekolah yaitu dapat membantu sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru, khususnya guru IPS, dengan memberikan beasiswa kepada guru atau mengadakan pelatihan-pelatihan setiap periode tertentu guna meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi pendidikan guru, sehingga sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru dalam berinovasi, sehingga guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih variatif.

Saran untuk Dinas Pendidikan setempat yaitu terus mendukung peningkatan profesionalisme guru dengan memberikan kesempatan kepada setiap guru IPS untuk melanjutkan

studinya kejenjang yang lebih tinggi serta mengadakan pendidikan dan pelatihan setiap periode tertentu atau secara rutin untuk mengembangkan profesionalisme guru melalui pengembangan sikap inovatif dan etos kerjanya.

Daftar Pustaka

- Aminah, A.N. (24 Maret 2015). Banyak guru tak sesuai kompetensinya. *Republika*. Diakses tanggal 27 Oktober 2015 dari: <http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/15/03/24/nlpfpgp16-banyak-guru-tak-sesuai-kompetensinya>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S., & Yuliana, L. (2008). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Awe, E. Y. (2014). Hubungan antara kualifikasi akademik, kompetensi, motivasi kerja dengan kinerja gurum sekolah dasar (sd) di kecamatan bajawa, kabupaten ngada. *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Dasar*, 4.
- Hardiyono. (2014). Banyak guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya. (24 Agustus 2015). *Radar Bangka*. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 dari <http://www.radarbangka.co.id/rubrik/pdf/edukasi/899>
- Caena, F. (2013). Supporting teacher competence development for better learning outcomes. *Education & Training European Commission*.
- Cedefop. (2009). *The dynamics of qualifications: defining and renewing occupation and educational standards*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Cole, P. (2012). *Linking effective professional learning with effective teaching practice*. Australia: Standing Council on School Education and Early Childhood.
- Demirkasimoglu, N. (2010). Defining “teacher professionalism” from different perspectives. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9 (2010) 2047-2051.
- Dhiatmika, N.W.A., Dantes, N., & Yudana, I.M. (2013). Determinasi etos kerja, motivasi berprestasi, dan kreativitas terhadap kinerja guru di smp negeri sekecamatan sukawati. *e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan*, (4), 1-10.
- Fajriani, Y. (2013). Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan etos kerja guru terhadap kinerja guru (studi pada al-azhar syifa budi solo). *Jupe UNS*, 1(1), 1-11.
- Hatta, R. (22 Juli 2015). Menuju profesionalisme guru. *Tempo*. Diakses tanggal 1 November 2015 dari: <http://www.tempo.co/read/news/2015/07/22/278685565/menuju-profesionalisme-guru>
- Isnandar. (2014). Peran teqip dalam peningkatan mutu pendidikan di indonesia. *Prosiding Seminar Nasional TEQIP (Teacher Quality Improvement Program)*. 1 Desember 2014. 786-827.
- Komari, N., & Djafar, F. (2013). Work ethics, work satisfaction and organizational commitment at the sharia bank, indonesia. *International Business Research*, 6(12), 107-117.
- Linggasari, Y. (25 Juni 2015). Pemerataan guru masih terkendala di pemda. *CNN Indonesia*. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2015 dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150624195621-20-62185/pemerataan-guru-masih-terkendala-di-pemda/>
- Mahanani, A. (2011). *Buku pintar PLPG (pendidikan & latihan profesi guru)*. Yogyakarta: Araska.
- Maskur, F. (26 November 2014). GIP: kualifikasi pendidikan guru di

- indonesia rendah. Diakses tanggal 1 November 2015 dari <http://kabar24.bisnis.com/read/20141126/255/275628/gip-kualifikasi-pendidikan-guru-di-indonesia-rendah>
- Mulyana, A. Z. (2010). *Rahasia menjadi guru hebat*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Panga, N.J. (2015). Hasil uji kompetensi guru sulusel rendah. *Antara News*. Diakses tanggal 1 November 2015 dari: <http://www.antarasulusel.com/berita/66308/hasil-uji-kompetensi-guru-sulusel-rendah>
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (2003). Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. (2005).
- Presiden. (2005). UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Richardson, A.R. (2008). An examination of teacher qualifications and student achievement in mathematics. *Disertasi*. Graduate Faculty of Auburn University.
- Sirait, B. (2012). Pengaruh sikap inovatif, profesionalisme guru, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. *Tesis*. Medan: Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana UNIMED.
- Soreide, G. E. (2007). The publik face of teacher identity-narrative construction of teacher identity in public policy documents. *Journal of Education Policy*, 22(2), 129-146.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatiningrum, J. (2014). *Guru profesional, pedoman kinerja, kualifikasi & kompetensi guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Surya, M. (2004). *Bunga rampai guru dan pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susanti, A. (20 November 2015). Gaptek, guru kesulitan kerjakan uk. Diakses tanggal 5 April 2016 dari: <http://news.okezone.com/read/2015/11/20/65/1252727/gaptek-guru-kesulitan-kerjakan-ukg>
- Sutarmanto. (2012). Kompetensi dan profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*. 16-31.
- Tweve, J. T. (2011). Teacher professionalism and professional abuse towards education development in tanzania. *Journal*. Tanzania: University Dar es Salaam College. 1-19.
- UCLA. (2008). *Enhancing classroom approaches for addressing barriers to learning: classroom-focused enabling*. Los Angeles: Center for Mental Health in Schools.
- van Aalderen Smeets, S. I., & Molen, J. H. W. (2015). Improving primary teacher's attitudes toward science by attitude-focused professional development. *Journal of Research in Science Teaching*. 1-25.
- Zuljan, M.V & Vogrinc, J. (2010). *Facilitating effective student learning through Teacher Research and Innovation*. Slovenia: Faculty of Education, University of Ljubljana.



KEEFEKTIFAN METODE *ROLE PLAYING* TERHADAP KEAKTIFAN DAN KERJA SAMA SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS

Risva Anggriani, Ishartiwi

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: risvaanggriani.ra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan keefektifan metode *role playing* dibandingkan dengan metode ceramah dalam peningkatan: (a) keaktifan siswa dan (b) kerja sama siswa dalam pembelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 Marioriawa. Penelitian ini merupakan penelitian *quasi experimental* dengan *pretest-posttest control group design*. Populasi penelitian ini adalah semua kelas VIII SMP Negeri 1 Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Sampel penelitian ini adalah dua kelas dari lima kelas, dipilih satu kelas kontrol menggunakan metode ceramah dan kelas eksperimen menggunakan metode *role playing* ditentukan dengan teknik *simple random sampling* dengan memilih secara acak. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dengan skala *Likert* dan panduan observasi. Validitas instrumen yang digunakan adalah validitas isi dan validitas empiris. Pengujian realibilitas dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis uji-t. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Metode *role playing* lebih efektif terhadap peningkatan keaktifan siswa dibandingkan dengan metode ceramah. (2) Metode *role playing* lebih efektif terhadap peningkatan kerja sama siswa dibandingkan dengan metode ceramah. *Role* atau peran yaitu siswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama sebagai pemain peran dan kelompok kedua sebagai pengamat. *Playing* atau bermain yaitu siswa memainkan peran dalam topik musyawarah dan gotong royong dalam menciptakan keamanan desa. Dengan metode *role playing*, siswa dapat aktif dan bekerja sama pada saat memainkan peran atau karakter.

Kata kunci: *metode role playing, keaktifan, kerja sama*

THE EFFECTIVENESS OF *ROLE PLAYING* METHOD IN INCREASING THE ACTIVENESS AND COOPERATION IN SOCIAL STUDIES

Abstract

This study aims to reveal the effectiveness of the role playing method compared with the lecture method in creasing: (a) the activeness and b) the cooperation in social studies of grade VIII students of SMP Negeri 1 Marioriawa. This study was quasi-experimental with the pretest-posttest control group design. The population was all students of class VIII of SMP Negeri 1 Marioriawa, Soppeng, South Sulawesi. The research sample was two out of five classes, one control class taught using the lecture method and one experimental class taught using the role playing method. The instrument used to collect data was a questionnaire with Likert scale and an observation. The validity of the instruments used content validity and empirical validity . Testing reliability by using Cronbach 's Alpha. The data analysis technique used was the t-test analysis technique. The results are as follows. (1) The role playing method is more effective in improving student activeness compared with the lecture method, (2) The role playing method is effective in improving cooperation compared with the lecture method. The role that the students were divided into two groups, the first group as a role player and the second group as observers. Playing that students play a role in the topic of discussion and mutual assistance in creating a security village. With this method of role playing, students can be active and work at the time played a role or character.

Keywords: *role playing method, activeness, cooperation:*

Pendahuluan

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya). IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial (Trianto, 2012, p. 171).

Berdasarkan standar isi dalam KTSP mata pelajaran IPS diberikan mulai dari tingkat SD/MI/SDLB sampai dengan SMP/MTs/SMPLB. Mata pelajaran IPS memiliki banyak cabang ilmu pengetahuan yang terintegrasi menjadi satu. Menurut *National Council for Social Studies* (NCSS, 1997, p.15) mengenai definisi dari IPS, yaitu: *Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such discipline as anthropology, archeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematic, and natural science.*

Dari definisi mata pelajaran IPS yang dikemukakan oleh NCSS dapat dipahami bahwa mata pelajaran IPS merupakan integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam pembelajaran di sekolah, IPS diberikan secara selaras dan sistematis yang menggambarkan seluruh cabang ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsofi, politik, psikologi, agama, sosiologi, maupun ilmu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, matematika dan ilmu alam.

Mata pelajaran IPS di SMP dan MTs merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTs sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2012, p.12) bahwa IPS pada kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 yang berbunyi bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ilmu pengetahuan sosial”.

Sumaatmadja (1980, p.20) menyatakan bahwa mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat”.

Tujuan pembelajaran IPS dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan guru IPS sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tasrif (2008, pp. 30-31) sebagai berikut: (1) guru harus mampu memodifikasi dan menyusun konsep-konsep disiplin ilmu sosial dengan disiplin ilmu pendidikan, (2) membina dan mengembangkan pendidikan IPS, terutama metode pembelajaran dan strategi belajar IPS sehingga mampu memberikan kemudahan bagi peserta didik yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kecerdasan, minat belajar.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa guru IPS mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik siswanya agar lebih mudah memahami materi yang diberikan. Hal yang bisa dilakukan oleh guru yaitu menerapkan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami semua materi IPS, dan memanfaatkannya dalam lingkungan kehidupan siswa.

Menurut Suryobroto (2002, p. 43), “metode pembelajaran berfungsi sebagai alat dalam mencapai berbagai tujuan pengajaran”. Dengan metode pembelajaran, diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa agar tercipta interaksi edukatif. Proses interaksi akan berjalan baik kalau siswa lebih banyak aktif dibanding guru.

Sanjaya (2009, p. 147) mengemukakan “keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran”. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara yang diterapkan agar strategi pembelajaran berhasil. Menurut Sudjana (2005, p. 76) “peranan metode pembelajaran adalah alat untuk menciptakan proses pembelajaran”. Dengan metode pembelajaran dapat menciptakan interaksi edu-

katif antara guru dan siswa. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan siswa yang harus aktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2007, p. 5) menjelaskan masalah yang sering muncul dalam proses pembelajaran adalah: (1) antusiasme siswa dalam belajar rendah, hal ini tampak ketika siswa memasuki ruangan kelas dan dimulai dengan belajar pengetahuan sosial para siswa kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pengetahuan sosial, sehingga siswa cenderung tidak aktif dan tidak merasa menjadi bagian dari kelas. Gejala-gejala tersebut ditunjukkan dengan beberapa sikap siswa seperti: sering mengobrol ketika pembelajaran berlangsung, menggambar tidak pada waktunya, dan sering keluar masuk kelas; (2) materi pengetahuan sosial yang terlalu bersifat informatif dan menuntut aspek kognitif (hapalan) saja membuat para siswa malas untuk memahami informasi-informasi baik yang terdapat dalam buku maupun yang disampaikan oleh guru; 3) lingkungan yang kaku dan membosankan untuk belajar, baik dalam tata cahaya maupun dalam penempatan tempat duduk yang monoton dan membosankan dimilikinya.

Pertiwi (2015, pp. 3-4) dalam penelitiannya memaparkan rendahnya minat dan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS sejarah. Pembelajaran kurang optimal, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga tidak melibatkan siswa secara aktif, membuat siswa bosan dan sulit untuk memahami materi.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan (19 Oktober 2015), siswa SMP Negeri 1 Marioriawa berpendapat bahwa mata pelajaran IPS akan lebih menarik untuk dipelajari jika proses pembelajaran dilakukan lebih bervariasi. Pembelajaran dianggap kurang bervariasi karena hanya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pembelajaran IPS dihadapkan dengan tugas-tugas yang ada di buku yang dikerjakan secara individual. Kegiatan untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran misalnya bekerja sama untuk saling membantu dalam diskusi dan laporan sangat kurang.

Berdasarkan temuan tersebut, permasalahan utama dalam pembelajaran IPS adalah proses pembelajaran dan metode yang digunakan untuk bisa meningkatkan keaktifan dan kerja sama siswa dalam belajar. Untuk mengatasi hal yang demikian itu, maka metode pembelajaran mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu me-

tode pembelajaran yang efektif dalam upaya untuk meningkatkan keaktifan dan kerja sama siswa dalam pembelajaran IPS adalah metode *role playing* (Lickona, 2013). Metode *role playing* merupakan salah satu metode pembelajaran untuk menirukan atau memperagakan peristiwa-peristiwa sosial yang sesuai dengan materi pelajaran. Tujuan dari *role playing* dalam pembelajaran adalah untuk membantu siswa mengkaji dan menganalisa situasi atau proses sosial dalam dunia nyata dan juga melibatkan siswa dalam memerankan secara langsung karakter dan bisa berinteraksi satu sama lain.

Hal ini dinyatakan oleh Curran (2010) bahwa bermain peran (*role playing*) merupakan sebuah permainan yang setiap pesertanya (siswa mengambil peran dan memainkan karakter) yang ada dalam skenario yang telah ditentukan. Karakter yang diperankan terkadang tidak sesuai dengan kepribadian seseorang, tetapi itu harus dilakukan dengan tujuan bisa memahami karakter sendiri dan orang lain.

Dengan demikian, pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, realistis dan menyenangkan apabila menggunakan metode bermain peran (*role playing*). Metode *role playing* dalam pembelajaran IPS disesuaikan dengan materi pelajaran mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah itu, sehingga bisa mewujudkan tujuan pembelajaran IPS yaitu menjadikan siswa agar terampil dalam kehidupan sosial.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai keefektifan metode *role playing* terhadap peningkatan keaktifan dan kerja sama siswa melalui pembelajaran IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 Marioriawa. *Role* atau peran yaitu siswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama sebagai pemain peran dan kelompok kedua sebagai pengamat. *Playing* atau bermain yaitu siswa memainkan peran dalam topik musyawarah dan gotong royong dalam menciptakan keamanan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (*quasi experimental design*). Penelitian ini melibatkan dua kelompok responden yang masing-masing ditetapkan sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kon-

trol. Kepada kelompok eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan metode *role playing*. Kepada kelompok kontrol diberikan perlakuan dengan menggunakan metode ceramah serta ditinjau dari keaktifan dan kerja sama siswa. Desain penelitian ini yaitu *pretest-posttest control group design* digambarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Desain Penelitian

Kelompok	Pretest	Perlakuan (X)	Posttest
KE	O ₁	Role Playing	O ₂
KK	O ₃	Ceramah	O ₄

Keterangan:

KE : Kelas Eksperimen

KK : Kelas Kontrol

X : Perlakuan

O₁ dan O₃ : Pretest

O₂ dan O₄ : Posttest

Variabel terikat atau *dependent variable* dalam penelitian ini berupa keaktifan dan kerjasama siswa. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan untuk *treatment* yaitu metode pembelajaran. Variabel bebas atau *independent variable* dalam penelitian ini yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan untuk eksperimen yaitu metode *role playing*. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu metode ceramah.

Keaktifan siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik pada diri siswa karena adanya interaksi antara individu dengan individu, dan individu dengan lingkungan. Indikator keaktifan siswa yaitu: (1) *visual activities*: memperhatikan penjelasan guru pada saat menyampaikan materi, (2) *oral activities*: mengemukakan pendapat di kelas (3) *listening activities*: memperhatikan dan mendengarkan ketika ada sis lain yang bertanya, (4) *writing activities*: menulis pertanyaan-pertanyaan yang muncul, (5) *motor activities*: bertanya apabila yang disampaikan guru kurang jelas, (6) *mental activities*: mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, (7) *emotional activities*: merasa gembira saat pelajaran berlangsung.

Kerja sama siswa dapat diartikan sebagai sebuah interaksi atau hubungan antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kerja sama siswa yaitu: (1) saling mem-

bantu sesama anggota dalam kelompok (mau menjelaskan kepada anggota kelompok yang belum jelas), (2) setiap anggota ikut memecahkan masalah (meminta ide dan pendapat) dalam kelompok sehingga mencapai kesepakatan, (3) menghargai pendapat setiap anggota kelompok, (4) setiap anggota kelompok mengambil giliran dan berbagi tugas, (5) ikut serta dalam kegiatan kelompok, (6) mengerjakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab anggota kelompok, (7) mendorong siswa yang malas untuk berpartisipasi dalam tugas kelompok, (8) menyelesaikan tugas tepat waktu.

Metode bermain peran (*role playing*) merupakan metode pengajaran berdasarkan pengalaman berkenaan dengan isu-isu sosial dapat memberikan kesempatan komunikasi interpersonal di dalam kelas. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode *role playing* sebagai berikut: (1) *Playing* atau bermain yaitu siswa memainkan peran dalam topik musyawarah dan gotong royong dalam menciptakan keamanan desa. (2) *Role* atau peran yaitu siswa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama sebagai pemain peran yang memainkan peran sebagai ketua RT serta warga masyarakat dan kelompok kedua sebagai pengamat yang memantau jalannya permainan. Sebaliknya dalam pertemuan selanjutnya kelompok pertama menjadi pengamat dan kelompok kedua menjadi pemain peran.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Marioriawa yang beralamat di Desa Batu-batu Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2015 sampai Maret 2016. Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada semester genap bulan Januari sampai Maret 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP Negeri 1 Marioriawa Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2015/2016. Jumlah populasi sebanyak lima kelas terbagi dalam kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIID dan VIIIE dengan siswa berjumlah 112 siswa.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas yang diambil dari lima kelas yang ada. Teknik *simple random sampling* dilakukan dengan menggunakan undian gulungan kertas. Pada kertas kecil-kecil dituliskan nomor subjek, satu nomor untuk setiap kertas, kemudian kertas digulung. Dengan tanpa prasangka, diambil dua gulungan kertas, dari dua gulungan kertas yang telah diambil yaitu kelas VIIIB sebagai kelompok eksperimen menggunakan

metode *role playing* yang berjumlah 22 siswa dan kelas VIIID sebagai kelompok kontrol menggunakan metode ceramah yang berjumlah 22 siswa. Jumlah keseluruhan kelompok sampel sebanyak 44 siswa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non tes. Teknik non tes berupa kuesioner dan observasi keaktifan dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan metode *role playing*. Kuesioner dalam penelitian ini ditujukan kepada siswa. Siswa mengisi kuesioner dengan memberikan tanda *check list* (✓) sesuai kondisi yang dialaminya pada setiap pernyataan dan lembar observasi diisi oleh observer yaitu peneliti.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner berisi pernyataan yang diajukan untuk mengetahui keaktifan dan kerjasama siswa. Penelitian ini menggunakan Kuesioner tertutup dan terstruktur dimana siswa memberikan tanda *check list* (✓) untuk mengisi kuesioner. Skala kuesioner dalam penelitian ini adalah skala Likert dengan skor alternatif pilihan jawaban meliputi: Selalu (SL) = 4, Sering (SR) = 3, Kadang-kadang (KD) = 2, dan Tidak Pernah (TP) = 1. Lembar observasi merupakan lembar pengamatan untuk melakukan pencatatan kegiatan siswa dalam pembelajaran. Lembar observasi kegiatan siswa berupa aspek-aspek keaktifan dan kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. Kriteria pencatatan observasi dilakukan dengan memberikan angka 0, 1 atau 2 jika subjek melakukan tindakan.

Validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian berupa kuesioner keaktifan berjumlah 25 butir, sedangkan kuesioner kerjasama siswa berjumlah 25 butir sebelum validitas. Pada dasarnya, semua validitas instrumen menggunakan *expert judgment*. Uji validitas instrumen hasil belajar aspek pengetahuan menggunakan validitas isi berupa uji coba instrumen dan validitas logis. Pertama, peneliti menggunakan validitas logis yang berupa *expert judgment* untuk mengetahui sejauh mana instrumen soal yang digunakan telah sesuai dan dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan/indikator pembelajaran. Setelah itu diujicobakan dan diukur dengan iteman untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya beda dan pengecoh. Uji validitas

angket gaya belajar, sikap dan keterampilan siswa menggunakan *expert judgment* dan diujicobakan. Selanjutnya dianalisis menggunakan analisis faktor yaitu *principle component analysis*.

Pengujian realibilitas dapat dihitung dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60.

Adapun hasil uji reliabilitas untuk angket keaktifan siswa adalah 0,832 dan angket kerjasama siswa adalah 0,749. Hal ini berarti butir pernyataan pada angket keaktifan dan kerjasama siswa dapat dikatakan reliabel, karena nilai koefisiennya > 0,60.

Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik dengan menggunakan uji *t-test* yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan metode *role playing* dalam meningkatkan keaktifan dan kerja sama siswa pada pembelajaran IPS. Analisis data dilakukan pada hasil penelitian dengan menggunakan analisis statistik *independent-sample t-test* terhadap *gain score* (selisih antara *pretest* dan *posttest*).

Pengambilan keputusan juga dapat didasarkan pada probabilitas yang diperoleh, yaitu jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima atau tidak terdapat terdapat keefektifan metode *role playing* dalam meningkatkan keaktifan dan kerjasama siswa pada pembelajaran IPS di kelas VIII SMPN 1 Marioriawa. Sedangkan, jika probabilitas < 0,05 maka H_0 diterima atau terdapat terdapat keefektifan metode *role playing* dalam meningkatkan keaktifan dan kerja sama siswa pada pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 1 Marioriawa.

Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil dikatakan normal apabila nilai signifikan > 0,05.

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua sampel berasal dari varian yang sama. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Levene*. Data dikatakan memiliki homogenitas apabila nilai signifikan > 0,05.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data hasil kuesioner keaktifan siswa yang dideskripsikan terdiri dari data *pretest*. *Pretest* merupakan angket yang diberikan pada kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) sebelum dilaksanakannya *treatment*. Pemberian kuesioner keaktifan siswa bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa sebelum *treatment*.

Setelah data keaktifan siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan, kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil *Pretest* Angket Keaktifan Siswa

Deskripsi Data	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
Jumlah siswa	22	22
Rata-rata	71,00	67,27
Standar deviasi	5,00	7,15
Skor terendah	62,00	56,00
Skor tertinggi	83,00	81,00

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa pada kelompok pembelajaran dengan metode *role playing* dengan jumlah 22 siswa memiliki rata-rata 71,00, standar deviasi 5,00, skor terendah 62, dan skor tertinggi 83. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan jumlah siswa 22 memiliki rata-rata 67,27, standar deviasi 7,15, skor terendah 56, dan skor tertinggi 81. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, namun perbedaannya hanya 3,73 sehingga dapat kita katakan bahwa data keaktifan siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol seimbang.

Data hasil angket keaktifan siswa yang dideskripsikan terdiri dari data *posttest*. *Posttest* merupakan angket yang diberikan pada kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) setelah dilaksanakannya *treatment*. Pemberian angket keaktifan siswa bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa setelah *treatment*.

Setelah data keaktifan siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan, kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam Tabel 3.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data pada tabel 3 menunjukkan bahwa, pada pembelajaran IPS metode *role playing* dengan jumlah siswa 22 memiliki rata-rata 80,91, standar deviasi 4,41, skor terendah 70, dan skor ter-

tinggi 88. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan jumlah siswa 22 siswa memiliki rata-rata 77,59, standar deviasi 4,83, skor terendah 68, dan skor tertinggi 86.

Tabel 3. Hasil *Posttest* Angket Keaktifan Siswa

Deskripsi Data	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
Jumlah siswa	22	22
Rata-rata	80,91	77,59
Standar deviasi	4,41	4,83
Skor terendah	70,00	68,00
Skor tertinggi	88,00	86,00

Data hasil angket keaktifan siswa yang dideskripsikan terdiri dari data *pretest*. *Pretest* merupakan angket yang diberikan pada kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) sebelum dilaksanakannya *treatment*. Pemberian angket kerja sama siswa bertujuan untuk mengetahui kerja sama siswa sebelum *treatment*.

Setelah data kerja sama siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan, kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil *Pretest* Angket Kerja Sama Siswa

Deskripsi Data	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
Jumlah siswa	22	22
Rata-rata	69,14	65,55
Standar deviasi	5,64	7,84
Skor terendah	60,00	53,00
Skor tertinggi	81,00	80,00

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa pada kelompok pembelajaran dengan metode *role playing* dengan jumlah 22 siswa memiliki rata-rata 69,14, standar deviasi 5,64, skor terendah 60, dan skor tertinggi 81. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan jumlah siswa 22 memiliki rata-rata 65,55, standar deviasi 7,84, skor terendah 53, dan skor tertinggi 80. Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol, namun perbedaannya hanya 3,59 sehingga dapat kita katakan bahwa data keaktifan siswa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol seimbang.

Data hasil angket kerja sama siswa yang dideskripsikan terdiri dari data *posttest*. *Posttest* merupakan angket yang diberikan pa-

da kedua kelompok (eksperimen dan kontrol) setelah dilaksanakannya *treatment*. Pemberian angket kerja sama siswa bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa setelah *treatment*.

Setelah data kerja sama siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol didapatkan kemudian dilakukan analisis deskriptif dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil *Posttest* Angket Kerja Sama Siswa

Deskripsi Data	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
Jumlah siswa	22	22
Rata-rata	80,77	76,77
Standar deviasi	4,43	4,28
Skor terendah	70,00	70,00
Skor tertinggi	88,00	85,00

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data pada tabel 5 menunjukkan bahwa, pada pembelajaran IPS metode *role playing* dengan jumlah siswa 22 memiliki rata-rata 80,77, standar deviasi 4,43, skor terendah 70, dan skor tertinggi 88. Sedangkan pada kelompok kontrol dengan jumlah siswa 22 siswa memiliki rata-rata 76,77, standar deviasi 4,28, skor terendah 70, dan skor tertinggi 85. Dari tabel 5 diatas juga dapat dilihat bahwa rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol dengan perbedaannya mencapai 4,00.

Setelah melakukan deskripsi data, selanjutnya data tersebut diuji untuk menjawab rumusan masalah. Sebelum melakukan uji hipotesis, data harus memenuhi asumsi prasyarat analisis.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Pengujian dikatakan memenuhi syarat apabila nilai signifikansi sebesar $> 0,05$. Apabila memenuhi persyaratan, maka data berdistribusi normal. Data yang diperoleh dari *gain score*, *pretest* dan *posttest* angket keaktifan dan kerja sama siswa.

Berdasarkan hasil uji normalitas, seluruh variabel dinyatakan normal. Sesuai dengan asumsi bahwa data dikatakan normal jika nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji normalitas keaktifan siswa metode *role playing* yaitu $0,200 > 0,05$. Hasil uji normalitas keaktifan siswa ceramah yaitu $0,200 > 0,05$. Hasil uji normalitas kerja sama siswa pada metode *role playing* yaitu $0,123 > 0,05$. Hasil uji normalitas kerja sama siswa pada metode ceramah yaitu $0,200 > 0,05$.

Berdasarkan analisis tersebut, maka semua pengelompokan sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari $0,05$. Langkah selanjutnya yaitu dengan uji homogenitas.

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Levene test*. Pengujian dikatakan memenuhi syarat apabila nilai signifikansi sebesar $> 0,05$. Apabila memenuhi persyaratan, maka data adalah homogen.

Berdasarkan hasil uji homogenitas, seluruh variabel dinyatakan homogen. Sesuai dengan asumsi bahwa data dikatakan homogen jika nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji homogenitas keaktifan siswa yaitu $0,106 > 0,05$. Hasil uji homogenitas kerja sama siswa yaitu $0,434 > 0,05$.

Setelah uji asumsi terpenuhi, selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil uji-t akan menggambarkan mengenai keefektifan metode *role playing* terhadap keaktifan dan kerja sama siswa dalam pembelajaran IPS pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hasil uji hipotesis pada angket keaktifan siswa diperoleh signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat menunjukkan hipotesis nol (H_0) ditolak dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) diterima, maka dapat disimpulkan metode *role playing* "efektif" dibandingkan dengan metode ceramah. Jadi hipotesis diterima dengan pernyataan terdapat keefektifan metode *role playing* terhadap keaktifan siswa dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Mariorirawa.

Sedangkan pada hasil uji-t pada angket kerja sama siswa diperoleh signifikansi $0,038 < 0,05$ sehingga dapat menunjukkan hipotesis nol (H_0) ditolak dengan demikian hipotesis alternatif (H_a) diterima, maka dapat disimpulkan metode *role playing* "efektif" dibandingkan dengan metode ceramah. Jadi hipotesis diterima dengan pernyataan terdapat keefektifan metode bermain peran (*role playing*) terhadap kerjasama siswa dalam mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Mariorirawa.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa metode *role playing* lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah terhadap peningkatan keaktifan dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS.

Sebelum dilakukan penelitian terhadap kelompok yang dijadikan sampel (kelas VIIIB sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIID sebagai kelas kontrol) dengan menggunakan metode *role playing* pada mata pelajaran IPS terhadap peningkatan keaktifan dan kerja sama siswa masih rendah. Kondisi demikian disebabkan karena pembelajaran kurang optimal, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga tidak melibatkan siswa secara aktif, membuat siswa bosan dan sulit untuk memahami materi. Padahal idealnya pada pelaksanaan pembelajaran IPS, siswa harus ikut terlibat secara aktif supaya bisa merasakan pengalaman belajarnya, karena pembelajaran IPS harus relevan dengan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan seperti petani, pedagang, politikus, dan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial lainnya.

Pada dasarnya dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS, siswa harus berperan aktif sesuai dengan perannya sebagai subjek pembelajaran. Siswa tidak hanya pasif menerima semua yang diberikan oleh guru tetapi harus aktif mengkonstruksi pengetahuannya serta berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin mencapai cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian mencapainya secara optimal (Sardiman, 2001, p. 112).

Selain siswa harus aktif dalam pembelajaran, siswa juga harus memiliki sikap kerja sama dengan siswa yang lain. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Nasution (2000, p. 137) yang mengemukakan bahwa kerja sama atau gotong royong sangat dihargai dalam masyarakat sehingga kerjasama perlu dipupuk di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan metode *role playing* (kelas yang diberi perlakuan) terhadap peningkatan keaktifan dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS dibandingkan dengan kelas kontrol (kelas yang tidak diberikan perlakuan). Berdasarkan penemuan dalam penelitian ini, semua hipotesis penelitian terbukti atau diterima. Ini berarti bahwa pembelajaran IPS dengan menggunakan metode *role playing* efektif terhadap peningkatan keaktifan dan kerjasama siswa. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa metode *role playing* terhadap peningkatan keaktifan dan kerjasama siswa yang diterapkan

dalam pembelajaran IPS memiliki dampak yang lebih signifikan dibandingkan dengan metode ceramah.

Metode *role playing* yang diterapkan dalam pembelajaran IPS membuat siswa terlibat secara aktif dalam proses interaksi antara teman yang satu dengan teman yang lainnya dalam suatu permainan sehingga kerjasama juga dapat terjalin. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini adalah siswa harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran agar mereka tidak mudah melupakan materi yang diajarkan.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat keefektifan metode *role playing* terhadap peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS dibanding dengan menggunakan metode ceramah. Hipotesis ini diterima karena hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keaktifan siswa di kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan keaktifan di kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari nilai *t test* metode *role playing* terhadap peningkatan keaktifan siswa dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti terdapat keefektifan metode *role playing* terhadap peningkatan keaktifan siswa. Hal ini juga menggambarkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rerata kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Alasan lain mengapa metode *role playing* lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa adalah karena dalam metode *role playing* terdapat peran yang harus dijalankan oleh siswa selama *role playing* berlangsung. Dalam proses *role playing*, masing-masing siswa aktif dalam melakukan peran yang dimainkan. Dalam hal ini, siswa harus aktif dalam memainkan suatu peran yang telah diberikan dalam kelas.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat keefektifan metode *role playing* terhadap peningkatan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS dibanding dengan menggunakan metode ceramah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis ini diterima karena peningkatan skor kerjasama pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan kerjasama siswa pada kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari nilai *t test* metode *role playing* terhadap peningkatan kerjasama siswa dengan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Ini berarti terdapat keefektifan metode *role playing* terhadap peningkatan kerjasama siswa.

Alasan logis mengapa metode *role playing* lebih efektif untuk meningkatkan kerja sama karena di dalam *role playing* terdapat interaksi antara satu dengan lainnya. Dalam *role playing* ini, terdapat tugas-tugas yang diemban atau dilaksanakan dimana tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan sendirian akan tetapi membutuhkan bantuan yang lainnya. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama, sehingga siswa secara otomatis belajar tentang bagaimana cara bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas atau untuk mencapai tujuan. Joyce & Weil (2000, p. 361) menyatakan bahwa: *the ultimate success of the simulation, in fact, depends partly on the cooperation and willing participation of the student. Working together, the students share ideas, which are subject to peer evaluation but not teacher evaluation. The peer social system, then, should be nonthreatening and marked by cooperation.*

Jadi, dalam *role playing* terdapat kerja sama yang menentukan keberhasilan dari *role playing* itu, siswa bekerjasama, dan berbagi ide. Dengan cara demikian ini tentu bisa meningkatkan kerjasama siswa.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Khairunnisa & Sugiharsono (2015, p.6) yang menunjukkan bahwa: (1) pada model pembelajaran kooperatif metode *Problem Solving* dan tipe *Team-Assisted Individualization* efektif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar IPS, (2) model pembelajaran kooperatif tipe *Team-Assisted Individualization* lebih efektif untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dibandingkan dengan metode *Problem Solving*, sedangkan metode *Problem Solving* lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan tipe *Team-Assisted Individualization*.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disampaikan simpulan sebagai berikut. Pertama metode *role playing* lebih efektif secara signifikan terhadap peningkatan keaktifan siswa dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran IPS dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Rata-rata hasil *posttest* siswa pada metode *role playing* (keaktifan siswa = 80,91) dan metode ceramah (keaktifan siswa = 77,59). Dari hasil observasi menunjukkan bahwa siswa yang aktif dengan

persentase tertinggi pada kelas kontrol yaitu siswa mengemukakan pendapat di kelas 78,12% dan kelas eksperimen yaitu siswa bertanya apabila yang disampaikan guru kurang jelas 89,06%.

Kedua metode *role playing* lebih efektif secara signifikan terhadap peningkatan kerja sama siswa dibandingkan dengan metode ceramah dalam pembelajaran IPS dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Rata-rata hasil *posttest* siswa pada metode *role playing* (kerja sama siswa = 80,77) dan metode ceramah (kerja sama siswa = 76,77). Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kerjasama siswa dengan persentase tertinggi pada kelas kontrol yaitu siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok 73,43% dan kelas eksperimen yaitu pada saat siswa saling membantu sesama anggota dalam kelompok (mau menjelaskan kepada anggota kelompok yang belum jelas) 90,62%.

Metode *role playing* dalam topik musyawarah dan gotong royong dalam menciptakan keamanan desa lebih efektif dibandingkan metode ceramah terhadap peningkatan keaktifan dan kerjasama siswa. Dalam pembelajaran IPS metode *role playing* efektif karena siswa dapat aktif dan bekerjasama dengan siswa lainnya. Siswa aktif bertanya dan siswa saling membantu sesama anggota dalam kelompok. Hal ini memberikan implikasi bahwa hasil penelitian ini memperkuat kebenaran teori yang ada. Oleh karena itu, perlu dikembangkan atau diterapkan metode *role playing* pada proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS.

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, disampaikan saran sebagai berikut. Bagi guru-guru IPS kelas VIII dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sebaiknya guru menerapkan metode *role playing* karena dapat meningkatkan keaktifan dan kerjasama siswa. Untuk mengoptimalkan aspek keaktifan dan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS, guru sebaiknya menerapkan metode *role playing* karena terbukti siswa dapat aktif dan bekerja sama dalam pemberian tugas yang diberikan.

Bagi siswa hendaknya mengikuti proses pembelajaran IPS dengan metode *role playing* secara aktif dan sungguh-sungguh agar siswa dapat memahami materi dalam pembelajaran IPS di kelas dan lebih meningkatkan keaktifan dan kerja sama dalam proses pembelajaran IPS.

Daftar Pustaka

- Curran, N. (2010). Stereotypes and individual differences. *International Journal of Role-Playing*, 2 (45), 44-58.
- Joyce, B., & Weil, M. (2000). *Models of teaching* (6th Ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Khairunnisa, I., & Sugiharsono, S. (2015). Keefektifan pembelajaran kooperatif problem solving dan tai untuk meningkatkan minat dan hasil belajar IPS. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(1), 12-20. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjp/article/view/4599/4493>
- Lickona, T. (2013). *Mendidik untuk membentuk karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab*. (Terjemahan Juma Abdu Wamaungo). New York: Bantam. (Buku Asli Diterbitkan Tahun 1991).
- Sudjana, N. (2005). *Dasar-dasar proses belajar mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nasution. (2000). *Didaktik asas-asas mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- NCSS. (1997). *North carolina social studies curriculum 1997*. North Carolina: North Carolina State Department of Public Instruction.
- Sumaatmadja, N. (1980). *Perspektif studi sosial*. Bandung: Alumni.
- Sapriya. (2012). *Pendidikan IPS (konsep dan pembelajaran)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, A.M. (2001). *Interaksi dan motivasi belajar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suryobroto. (2002). *Proses belajar mengajar di sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tasrif. (2008). *Pengantar pendidikan IPS*. Jakarta: Grafindo.
- Kartini, T. (2007). Penggunaan metode role playing untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pengetahuan sosial di kelas V SDN Cileunyi I Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8, 5-22.
- Trianto. (2012). *Model pembelajaran terpadu: konsep, strategi, dan implementasinya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, W. (2009). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pertiwi, W. (2015). Metode role playing untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS Sejarah di Kelas V SD. *Jurnal Antologi UPI*, 2(3), 35-64.